



Pemberdayaan dan Pembangunan Desa

Yogi Pasca Pratama
Bhimo Rizky Samudro
Sutomo



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PEMBERDAYAAN dan PEMBANGUNAN DESA

Oleh:

Yogi Pasca Pratama, SE., ME
Bhimo Rizky Samudro, SE., MSi., Ph.D
Sutomo, SE., MSi

Copyright 2018, Penerbit Draft Media.

Griya Setia Nusa Blok A9 No 5
Kualu, Tambang, Kabupaten Kampar, Riau 28293

Editor: Yunus; Andri Hendrizal
Desain sampul: Penerbit Draft Media

Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit Draft Media, Riau, Mei, 2018

ISBN: 978-602-5657-08-5



Hak cipta ini dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Pemberdayaan dan pembangunan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Epistemologi pemberdayaan seringkali dijadikan isu pro kerakyatan, faktanya merupakan usaha sistemik untuk merubah sistem dan struktur sosial masyarakat secara bertahap.

Buku **Pemberdayaan dan Pembangunan Desa** ini ditulis sebagai referensi mahasiswa Ekonomi Pembangunan yang mempelajari Ekonomi Pemberdayaan, Ekonomi Pertanian, dan Ekonomi Kerakyatan. Buku ini disusun sedemikian rupa dengan harapan dapat membantu mahasiswa dalam memahami seluk beluk kegiatan pemberdayaan petani. Para penggiat pemberdayaan juga bisa menggunakan buku ini sebagai penguat argumentasi dalam interaksinya dengan para mitra berdaya.

Buku **Pemberdayaan dan Pembangunan Desa** ini disusun berdasarkan pengalaman, referensi terkait pemberdayaan masyarakat, materi ajar kuliah ekonomi pemberdayaan dan ekonomi pertanian serta hasil penelitian yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Dekan FEB UNS dan Kaprodi EP FEB UNS atas saran yang membangun, rekan-rekan staf Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB UNS, kolega periset KIMI Institute yang telah banyak membantu selama penyusunan buku ini serta penerbit yang bersedia menerbitkan buku ini.

Semoga buku **Pemberdayaan dan Pembangunan Desa** ini bermanfaat bagi para pembaca serta memperdalam wawasan mahasiswa dan khalayak umum tentang pemberdayaan petani. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis guna kesempurnaan buku ini

Sukoharjo, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1. PENDAHULUAN: PENGERTIAN DAN KLASIFIKASI DESA.....	1
Pendefinisian Desa.....	1
Tipologi Desa.....	4
BAB 2. SISTEM PERTANIAN PEDESAAN.....	8
Pengertian, Unsur, dan Jenis Sistem Pertanian.....	8
Pola Permukiman Masyarakat Petani.....	11
BAB 3. MASYARAKAT PETANI PEDESAAN.....	13
Peasant.....	13
Perbedaan <i>Peasant</i> dan <i>Farmer</i>	16
BAB 4. KENDALA PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN.....	19
BAB 5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN.....	24
Kebijakan Pembangunan.....	24
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.....	27
BAB 6. STRATEGI PEMBANGUNAN PEDESAAN.....	29
Program Pembangunan Pedesaan.....	29
Prinsip Pembangunan Desa.....	33
BAB 7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN PEDESAAN.....	37
Tujuan Pemberdayaan.....	40
Pendekatan Pemberdayaan.....	43
Tahapan Pemberdayaan.....	45
Peran Fasilitator Pemberdayaan.....	45
Pemberdayaan Masyarakat Petani Pedesaan.....	47
Peran Stakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	50
BAB 8. INTRODUKSI TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM KERANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI PEDESAAN.....	52
Pemanfaatan Lahan pekarangan.....	55
Inovasi dan Teknologi Vertikultur Sebagai Upaya Pengembangan Potensi Desa.....	57
Tanaman Vertikultur.....	60
Kelebihan dan Kekurangan Vertikultur.....	63
Pembuatan Vertikultur.....	65
Penerapan Vertikultur.....	66

Bab 1

Pendahuluan: Pengertian dan Klasifikasi Desa

Pendefinisian Desa

Mengingat tentang desa, sebagian besar dari kita akan membayangkan pada wilayah dengan hamparan lahan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama warganya, atau juga pada desa pesisir yang sebagian besar warganya bertumpu pada laut untuk kehidupannya sebagai nelayan. Desa juga mengingatkan pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai, norma, dan kebudayaan yang secara turun temurun dilestarikan dengan masyarakat modern menyebutnya sebagai “tradisional”. Karena pada akhirnya justru tradisionalitas inilah yang mampu merawat hubungan baik antar sesama manusia serta dengan lingkungan dengan tetap memelihara kelestariannya.

Menurut Soetarto dan Sihalo (2014: 14) awal terbentuknya desa dikarenakan menetapnya suatu komunitas manusia pada lokasi tertentu

yang menjadikannya sebagai tempat bermukim serta mencari penghidupan. Desa didirikan oleh para pendiri desa yang istilahnya membuka hutan belukar dan menjadikannya sebagai tempat bermukim dalam dusun-dusun kecil, dan pada tahap selanjutnya mereka inilah yang menjadi pemimpin dusun atau bahkan pemimpin desa.

Salah satu bentuk penghormatan terhadap leluhur sebagai pendiri desa biasanya dirayakan melalui berbagai upacara adat sebagai ucapan rasa syukur. Berbagai upacara adat dalam berbagai budaya masyarakat harus dimaknai secara lebih dewasa, karena hal ini justru menunjukkan betapa masyarakat desa sangat menghargai jasa para leluhurnya dan rasa syukur nya pada Tuhan Yang Maha Esa. Serta sangat memungkinkan bahwa kesadaran dan memori tentang para leluhur dapat menjadi pemersatu warga desa untuk saling bergotong -royong menjaga dan mengembangkan desanya.

Pengertian lain tentang desa diungkapkan oleh Bergel *dalam* Hakim (2011: 10) yang mengartikan desa sebagai setiap pemukiman para petani, khususnya *peasant*, dan mempunyai karakteristik sebagai tempat tinggal yang menetap dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa desa merupakan wilayah yang ditinggali secara menetap oleh beberapa penduduk dengan mengandalkan pencaharian utama sebagai petani. Pengertian petani sendiri dikhususkan pada definisi *peasant* yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Beberapa karakteristik lain dari masyarakat desa yang diungkapkan Roucek dan Warren (*dalam* Hakim, 2011: 10) antara lain, besarnya peranan kelompok primer, pembentukan kelompok utamanya didasari alasan geografis, pola hubungan yang intim, masyarakat cenderung

homogen, mobilitas sosial cenderung rendah, keluarga sebagai unit ekonomi, dan populasi anak dalam proporsi yang lebih besar. Pernyataan ini menunjukkan bahwa memang penduduk desa cenderung homogen dan bukan tidak mungkin mereka mempunyai asal-usul keturunan yang sama, sehingga kekerabatan antar masyarakat desa menjadi sangat dekat dan intim. Menjadi hal yang biasa ketika setiap warga mengenali semua penduduk yang tinggal di desa di mana dia tinggal (hal sangat sulit ditemukan pada masyarakat perkotaan). Homogenitas masyarakat desa juga dapat dilihat dari pekerjaan utama yang berkaitan erat dengan geografis desa setempat, seperti desa nelayan, desa pertanian, desa perkebunan, dan lain sebagainya. Semua anggota keluarga pada umumnya mempunyai peran dalam membantu perekonomian keluarga, seperti keluarga petani maka baik ayah, ibu, maupun anak-anak akan ikut berperan dalam menjalankan usaha tani entah dalam tahap persiapan, perawatan, ataupun saat panen. Hal ini juga yang mendasari anggapan “banyak anak banyak rezeki”, karena dengan semakin banyak anggota keluarga maka semakin banyak yang membantu pengelolaan usaha tani.

Eko (2015: 46-47) mendefinisikan desa dari sudut pandang lain, terutama melihat desa sebagai sebuah organisasi yang dikelola oleh pemerintahan desa. Eko mengartikan desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan, dan paling dekat dengan masyarakat. Masing-masing pengertian tentang desa dengan berbagai sudut pandang dijelaskan sebagai berikut.

1. Desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil dimaksudkan bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang dijalankan pemerintahan desa mempunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota,

- provinsi maupun pusat;
2. Desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling bawah dimaksudkan bahwa desa menempati susunan pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi istilah ini tidak mengindikasikan bahwa desa langsung menjadi bawahan kabupaten/kota. Sudut pandang ini melihat desa sebagai organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung menyatu dengan kehidupan masyarakat;
 3. Desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling depan dimaksudkan bahwa desa berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Hubungan ini berlangsung baik dalam bidang pelayanan, pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan;
 4. Desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dimaksudkan bahwa memang secara administratif dan geografis, pemerintah desa dan warga masyarakat mudah untuk saling menjangkau. Istilah ini juga dapat diartikan bahwa pemerintahan desa menyatu dengan kehidupan sosial budaya sehari-hari masyarakat setempat.

Tipologi Desa

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai banyak sekali desa dengan masing-masing karakteristiknya masing-masing. Satu desa akan berbeda dengan desa lain dalam berbagai hal, seperti budaya, alam, dan penduduknya. Perbedaan karakteristik tersebut pada selanjutnya akan menimbulkan perbedaan potensi serta keterbatasan yang dihadapi

penduduk dan wilayah tempat tinggalnya. Maka dari itu, memahami desa juga sangat diperlukan suatu upaya untuk memilah desa berdasarkan ciri khas, potensi, keterbatasan yang dihadapi, serta hal lain yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pembangunan pedesaan.

Tipologi desa dapat diartikan sebagai karakteristik desa yang dilihat dari potensi sumber daya alam desa dan interaksi kegiatan sosial ekonomi masyarakat desa. Tipologi desa mempertemukan aspek sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat, pola nafkah, dan aspek kewilayahan. Serta dapat juga dilihat dari bagaimana letak geografis desa dan bagaimana peruntukan lahan yang ada di desa (Agusta, 2014: 6).

Berdasarkan telaah tipologi desa, maka banyak dicetuskan berbagai klasifikasi desa yang didasarkan pada berbagai aspek yang menonjol dari desa tersebut. Setiap ahli yang membedakan klasifikasi desa juga memiliki pertimbangan atas pengamatan masing-masing atas karakteristik desa yang ditemukannya.

Terdapat berbagai macam klasifikasi tipologi desa dari berbagai sumber yang mengelompokkan desa dengan pertimbangan karakteristik tertentu. Seperti Mubiyarto yang membagi desa tertinggal di Jawa Tengah (berdasarkan kegiatan mayoritas masyarakat desa dan basis hasil pertanian yang dibudidayakan) menjadi sembilan tipologi, yaitu desa persawahan, desa perkebunan, desa lahan kering, desa hutan, desa peternakan, desa nelayan, desa industri kecil, desa buruh industri, serta desa jasa dan perdagangan. Kemudian Soedarajad yang membagi desa menjadi empat tipologi, yaitu desa pantai, desa persawahan, desa perkebunan, dan desa perladangan. Kemudian pembagian desa dengan melihat kegiatan ekonominya berdasarkan kriteria Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan

Desa (KTP2D), desa dapat diklasifikasikan sebagai desa pertanian tanaman pangan, desa industri, desa perikanan, desa perkebunan, desa pariwisata, dan desa peternakan (Mubiyarto; Soedrajad; dalam Direktorat Permukiman dan Perumahan, Tanpa Tahun: 3-4).

Penggolongan desa menurut Saparin (dalam Hakim, 2011: 16) membagi desa ke dalam berbagai kategori, antar lain:

1. Desa tambangan, desa nelayan, dan desa pelabuhan. Desa tambangan dimaksudkan sebagai desa yang lokasinya digunakan sebagai tempat lalu lintas penyeberangan orang dan barang di mana terdapat sungai besar. Desa nelayan dimaksudkan pada desa yang mata pencaharian utamanya adalah usaha perikanan laut. Desa pelabuhan dimaksudkan pada kategori desa yang kegiatan utama di lokasinya sebagai tempat perantara hubungan dengan mancanegara, antar pulau, pertahanan/strategi perang dan sebagainya;
2. Desa perdikan. Desa ini dimaksudkan pada kategori desa dengan kegiatan memelihara sebuah makam raja-raja atau karena jasa-jasanya terhadap raja, sehingga desa ini dibebaskan dari pungutan pajak;
3. Desa penghasil usaha pertanian, kegiatan perdagangan, industri/kerajinan, pertambangan dan sebagainya;
4. Desa perintis. Desa ini dimaksudkan pada desa yang relatif awal dibentuk seperti desa yang dibentuk karena program transmigrasi;
5. Desa pariwisata. Desa ini dimaksudkan pada desa yang mempunyai objek pariwisata berupa peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, keindahan alam dan sebagainya.

Hasil analisis Agusta (2014: 7-8) tentang transformasi desa di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2011, desa-desa dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipologi, antara lain: perladangan, persawahan, perhutanan, peternakan, pesisir, perkebunan, pertambangan, serta perindustrian dan jasa. Lebih lanjut, Agusta memaparkan bahwa desa bertipologi persawahan masih mendominasi proporsi tipologi desa di Indonesia. Proporsi masing-masing tipologi desa tersebut selengkapnya sebagai berikut:

1. Desa persawahan sebanyak 31.791 desa atau 40%.
2. Desa perkebunan sebanyak 13.861 desa atau 18%.
3. Desa pesisir sebanyak 11.884 desa atau 15%.
4. Desa perladangan sebanyak 10.157 desa atau 13%.
5. Desa perindustrian dan jasa sebanyak 7.665 desa atau 10%.
6. Desa perhutanan sebanyak 2.673 desa atau 3%.
7. Desa pertambangan sebanyak 350 desa.
8. Desa peternakan sebanyak 228 desa.

Meskipun jumlah desa persawahan dan perladangan yang notabene sebagai penghasil pangan utama masih dominan pada tahun 2011, ternyata jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis seperti yang ditunjukkan Agusta. Seperti contohnya desa persawahan yang pada tahun 2003 mendominasi proporsi tipologi desa sebesar 70%, tetapi pada tahun 2011 menurun menjadi 40%.

Bab 2

Sistem Pertanian Pedesaan

Pengertian, Unsur, dan Jenis Sistem Pertanian

Hakim (2011: 28) yang mengutip Smith dan Zopf menerangkan bahwa sistem pertanian merupakan seperangkat gagasan, keterampilan teknik, budaya, praktik, prasangka, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam hubungannya dengan pengelolaan tanah pertanian. Berdasarkan pengertian ini, sistem pertanian sangat erat kaitannya dengan bagaimana manusia secara individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan pengelolaan tanah sebagai mata pencaharian. Setiap masyarakat tentu memiliki karakteristik yang berbeda yang didasari perbedaan budaya dan lingkungan tempat tinggal masing-masing termasuk dalam sistem pertanian. Sehingga pembangunan sektor pertanian sangat perlu mempertimbangkan bagaimana gagasan, kebiasaan, dan praktik masyarakat dalam mengolah lahan pertanian masing-masing.

Unsur-unsur pokok dalam pertanian menurut Harianto (2007: 2) dapat dibagi dalam empat unsur utama, yaitu petani dan keluarganya (rumah tangga petani), sumber daya alam, teknologi, dan lingkungan sosial-budaya. Harianto berpendapat bahwa unsur rumah tangga petani harus menjadi poros utama yang perlu diperhatikan dalam upaya pembangunan pedesaan. Pengembangan rumah tangga petani diharapkan bahwa kualitas petani menjadi meningkat dalam menangkap peluang dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Aspek manusia, dalam hal ini petani dan keluarganya mempunyai peran utama dalam pengembangan sektor pertanian. Peningkatan kualitas petani yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan rumah tangga petani dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan memanfaatkan potensi alam yang dibantu dengan penguasaan teknologi yang tepat guna. Pembangunan sektor pertanian dalam rangka mengembangkan pedesaan juga perlu mempertimbangkan aspek sosial budaya dalam menjalankan sistem pertanian. Selain diharapkan mampu mengembangkan masyarakat, melalui sinkronisasi semua unsur sistem pertanian, diharapkan pengembangan sektor pertanian juga berdasarkan pada komitmen untuk melestarikan lingkungan hidup masyarakat sekitar, baik lingkungan fisik maupun budaya masyarakat.

Pertanian sebagai kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat tentu memiliki berbagai peran yang tidak dapat dikesampingkan dari kehidupan masyarakat. Harianto (2007: 1) berpendapat bahwa sektor pertanian mempunyai beberapa peranan yang relatif penting dan dapat dikerucutkan menjadi empat peran. Pertama, pertanian dapat menyediakan hasil panen yang dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat, memenuhi kebutuhan bahan baku

sektor industri, dan menunjang ketahanan pangan. Kedua, sektor pertanian dapat menjadi pasar yang potensial bagi sektor industri, serta hasil perdagangan sektor pertanian dapat menghasilkan devisa. Ketiga, sektor pertanian dapat menjadi sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang dapat bermanfaat bagi sektor lain. Keempat, sektor pertanian dapat menyumbang peranan dalam pembangunan desa dan pelestarian lingkungan hidup.

Whittlesey (*dalam* Hakim, 2011: 28) mengategorikan perkembangan sistem pertanian menjadi sembilan jenis berdasarkan pengamatannya. Kesembilan sistem pertanian tersebut antara lain:

1. Pertanian di ladang (*shifting cultivation*).
2. Pertanian menetap tanpa sistem irigasi (*rudimentary sedentary cultivation*).
3. Pertanian menetap dengan sistem irigasi sederhana dan didominasi tanaman padi (*intensive subsistence tillage, rice dominant*).
4. Pertanian menetap dengan sistem irigasi sederhana dan tanpa budidaya tanaman padi (*intensive subsistence tillage, without rice*).
5. Pertanian sekitar Lautan Tengah (*Mediterranean agriculture*).
6. Pertanian buah-buahan (*specialized horticulture*).
7. Pertanian komersial dengan mekanisasi berdasarkan tanaman gandum (*commercial grain farming*).
8. Pertanian komersial dengan mekanisasi (*commercial livestock and crop farming*).
9. Pertanian perkebunan dengan mekanisasi (*commercial plantation crop tillage*).

Sedangkan Smith dan Zopf (*dalam* Hakim, 2011: 28) mengategorikan sistem pertanian menjadi enam jenis, antara lain:

1. Pertanian tepian sungai (*riverbank plantings*).
2. Pertanian sistem bakar (*fire agriculture*).
3. Sistem pertanian cangkul (*hoe culture*).
4. Sistem pertanian dengan teknik bajak sederhana (*rudimentary plow culture*).
5. Sistem pertanian dengan teknik bajak yang maju (*advanced plow culture*).
6. Pertanian mekanik (*mechanized farming*).

Pola Permukiman Masyarakat Petani

Sistem pertanian yang dijalankan masyarakat juga berpengaruh erat terhadap bagaimana cara hidup masyarakat tersebut, terutama untuk masyarakat yang memang penghidupan utamanya menggantungkan pada sektor pertanian. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana masyarakat menata pola pemukimannya terkait dengan lahan pertanian yang diolah. Masing-masing penataan permukiman penduduk dengan lahan pertanian dapat dikelompokkan menjadi beberapa pola yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat.

Pola permukiman di masyarakat petani pedesaan secara umum dikelompokkan oleh Landis (*dalam* Hakim, 2011: 24) menjadi empat kelompok, antara lain:

1. *The Farm Village Type (FVT)*

Merupakan pola pemukiman di mana penduduk atau petani tinggal dan berkelompok pada suatu tempat, serta lokasi tempat tinggal ini berdekatan dengan lahan pertanian yang berada diluar lokasi pemukiman.

2. *The Nebulous Farm Type (NFT)*

Merupakan pola pemukiman di mana penduduk atau petani tinggal secara bersama-sama pada suatu tempat tertentu dengan tambahan beberapa penduduk lain yang tinggal di luar pemukiman utama tersebut. Sedangkan lahan pertanian berada di sekitar lokasi pemukiman penduduk.

3. *The Arranged Isolated Farm Type (AIFT)*

Merupakan pola pemukiman dimana penduduk atau petani mempunyai tempat tinggal di sekitar jalan dan masing-masing berada di lahan pertanian mereka. Selain itu, penduduk juga memiliki suatu *trade center* yang berada di antara mereka.

4. *The Pure Isolated Farm Type (PIFT)*

Merupakan pola pemukiman di mana penduduk atau petani menempati tempat tinggal yang berada dalam lahan pertanian mereka masing-masing. Lokasi tempat tinggal ini biasanya terpisah dan berjauhan antar penduduk atau petani dengan suatu *trade center*.

Bab 3

Masyarakat Petani Pedesaan

Sistem pertanian menempatkan petani sebagai aktor utama. Pengembangan kualitas sistem pertanian oleh karena itu sangat diperlukan peningkatan kualitas petani. Maka dari itu, pemahaman terhadap petani perlu mendapat porsi utama dalam upaya mengembangkan sektor pertanian.

Petani secara garis besar adalah seseorang yang mengolah tanah sebagai lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi sebenarnya, petani sendiri dapat diartikan menjadi dua definisi yang berbeda, yaitu *peasant* dan *farmer*. Keduanya mempunyai karakteristik berbeda, pendekatan berbeda dalam menjalankan usaha tani, sehingga akan berdampak pada strategi berbeda dalam upaya mengembangkan sektor pertanian.

Peasant

Peasant merupakan masyarakat yang hidup dengan bermata pencaharian dengan mengolah tanah di komunitas pedesaan, menggunakan teknologi pertanian yang sederhana yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara subsisten (Rejeki, 2007: 150). Pengertian *peasant* dikaitkan dengan tempat tinggal yang menetap pada wilayah pedesaan serta penguasaan teknologi dan pengetahuan pertanian yang masih cenderung tradisional. Keterbatasan ini karena masyarakat memegang erat nilai dan norma yang telah ada secara turun-temurun sehingga mempunyai kecenderungan menutup pada kebudayaan baru dari luar, termasuk pengembangan teknologi yang tidak sesuai dengan budaya yang dianut. Selain itu dapat juga melihat bahwa rendahnya pengembangan teknologi pertanian karena memang masyarakat pedesaan mempunyai keterbatasan akses informasi atas perkembangan teknologi. Oleh karena itu jika menghendaki pengembangan masyarakat petani pedesaan dengan pengembangan teknologi, maka hal itu harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sedangkan pola hidup subsisten pada *peasant* merupakan cara hidup mereka yang relatif sederhana, di mana pekerjaan usaha tani mempunyai motif utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Peasant mempunyai suatu ideologi yang terwujud dari berbagai kegiatan yang terkait dengan usaha tani, seperti adanya ritual yang menjadi kebiasaan dan telah lama dilakukan. Kebiasaan ini menjadi kepercayaan yang mengakar pada *peasant*, bahkan akan merasa ada yang kurang jika tidak melakukan kebiasaan atau tindakan ritual tersebut. Ideologi pada *peasant* ini pada akhirnya menjadi landasan bagi pandangan *peasant*

tentang cara hidup yang baik, sehingga menjadi landasan pula dalam memperat ikatan sosial dengan masyarakat sekitar. Adanya ideologi yang mengakar pada *peasant* juga dapat menjadi solusi munculnya konflik di tengah masyarakat terkait dengan usaha tani (Wolf dalam Sjaf, 2010: 2). Sjaf (2010: 2) juga menambahkan bahwa secara geografis, *peasant* tinggal di pedesaan karena mata pencaharian utamanya adalah dengan mengolah lahan pertanian serta memanfaatkan hasil pertanian tersebut untuk memenuhi kebutuhan secara subsisten.

Beberapa pengertian lain tentang *peasant* oleh para penulis, dikutip sebagai berikut (Hakim, 2011: 20):

1. Wolf mendefinisikan *peasant* sebagai pengelola usaha pertanian yang mengerjakan tanah secara efektif dan dilakukan sebagai jalan penghidupannya atau bukan sebagai bisnis yang bersifat mencari keuntungan;
2. Firth mengartikan *peasant* berkaitan dengan referensi keekonomian, dimana sistem usaha tani yang dijalankan berskala kecil, teknologi dan peralatan yang sederhana, serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau subsisten;
3. Belshaw mengartikan *peasant* sebagai masyarakat yang mempunyai pandangan hidup dengan berorientasi pada tradisionalitas, hidup terpisah dari pusat kota meskipun tetap menjalin hubungan dengan mengkombinasikan kegiatan pasar, serta hidup dengan produksi subsisten;
4. Kroeber mengartikan *peasant* sebagai golongan kelas dari suatu populasi yang jumlahnya lebih besar yang biasanya termasuk pula di dalamnya pusat-pusat perkotaan;

5. Field mengartikan *peasant* sebagai orang-orang yang berasal dari peradaban yang tua, dengan karakteristik masyarakat desa yang menguasai dan mengolah tanah mereka untuk kehidupan secara subsisten;
6. Menurut Foster, sebenarnya komunitas *peasant* juga memiliki ikatan yang erat dengan kota-kota besar dan kecil.

Menurut Shanin yang pendapatnya dikutip oleh Sjaf (2010:3), *peasant* mempunyai empat ciri-ciri utama. Keempat ciri tersebut antara lain:

1. Rumah tangga *peasant* merupakan satuan dasar masyarakat desa yang berdimensi ganda;
2. Sumber penghidupan utama *peasant* berasal dari usaha tani dengan cara mengolah lahan pertanian;
3. *Peasant* mempunyai pola kebudayaan yang tradisional dan khas;
4. *Peasant* merupakan orang yang mempunyai posisi lemah dalam komunitas masyarakat.

Pada sisi lain, *peasant* jika dilihat dari segi ekonomi identik dengan kesederhanaan dan keterbatasan, sehingga cenderung mencukupi kebutuhan hidup secara subsisten (Sjaf, 2010: 3). Scott juga berpendapat bahwa *peasant* dalam menjalankan usaha tani mempunyai pandangan untuk mendahulukan selamat (*subsistensi*), menjaga keamanan (*security*), dan kesejahteraan (*welfare*). Oleh karena itu, *peasant* memusatkan usaha tani untuk menghindarkan jatuhnya produksi sebab enggan mengambil resiko dan memang tidak berusaha untuk berorientasi pada pemaksimalan keuntungan dari usahatani (*dalam Sjaf, 2010: 4*).

Perbedaan *Peasant* dan *Farmer*

Fery (dalam Chiari, 2015: 10) menekankan adanya perbedaan antara *peasant* dan *farmer*. *Peasant* merupakan petani dengan tujuan subsisten, yaitu usaha tani dengan mendayagunakan bantuan keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Petani yang tergolong dalam pengertian *peasant* seperti petani kecil, petani yang menyewa lahan (*tenants*), penyakap (*sharecroppers*), dan buruh tani. Sedangkan *farmer* adalah petani yang usahataniya lebih condong ke arah bisnis, sehingga bukan saja untuk keperluan pemenuhan kebutuhan keluarga tetapi lebih mengarah pada mencari margin keuntungan dengan menjual hasil usahataniya. Sjaf (2010: 5) menyimpulkan bahwa perbedaan definisi antara *peasant* dan *farmer* dapat dilihat dari sifat usahataniya. *Peasant* menjalankan usaha tani dengan mendayagunakan tenaga kerja yang berasal dari rumah tangga *peasant* sendiri dan ditujukan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga itu sendiri. Sedangkan *farmer* dalam mengolah lahan biasanya memiliki buruh tani atau petani penggarap yang orientasi utamanya adalah mencari keuntungan dengan menjual hasil pertanian ke pasar.

Pembedaan antara petani pedesaan/petani tradisional/*peasant* dan petani modern/pengusaha pertanian/petani pengusaha/*agricultural entrepreneur/farmer* juga dilakukan oleh Wolf (dalam Soetarto dan Sihalo, 2014: 19) pada analisisnya. Wolf mengungkapkan bahwa *peasant* merupakan golongan petani yang usaha pertaniannya masih tergantung pada alam dengan penggunaan teknologi serta pengetahuan tradisional yang relatif sederhana. Produksi pertanian yang dihasilkan oleh *peasant* mempunyai tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga

sendiri dan bukan untuk mengejar keuntungan. Sebaliknya *farmer* merupakan golongan petani yang usaha pertaniannya pada umumnya mempunyai tujuan untuk mengejar keuntungan. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka tanaman budidaya disesuaikan dengan komoditas pertanian yang laku di pasar. Sistem pertanian juga tergolong maju dengan penggunaan teknologi dan sistem pengelolaan usaha modern demi mencapai tujuan mengejar keuntungan tersebut.

Warsana (2008: 2-10) mengartikan *farmer* sebagai petani pengusaha, dalam arti bahwa usaha tani yang dijalankan mirip sebagai bangun perusahaan, di mana orientasi pasar menjadi landasan utama dalam produksi pertaniannya. Oleh karenanya, sebagian besar *farmer* biasanya memiliki cakupan lahan yang cukup luas untuk meningkatkan skala produksinya. Sedangkan *peasant* menjalankan usaha tani secara tradisional dengan lahan yang cenderung sempit karena sebagian besar ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga.

Bab 4

Kendala Pembangunan Wilayah Pedesaan

Pembangunan wilayah pedesaan sangat erat kaitannya dengan upaya pengembangan sektor pertanian, termasuk petani di dalamnya. Petani, terutama dalam pengertian *peasant* mempunyai tempat tinggal di wilayah pedesaan seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Desa sendiri menurut sebagian besar literatur juga menjadi tempat tinggal petani yang mempunyai mata pencaharian yang menyesuaikan dengan tipologi desa yang ditempati. Oleh karena itu, pengembangan sektor pertanian, maupun peningkatan taraf kesejahteraan petani terutama *peasant* secara holistik harus dipandang sebagai upaya pembangunan desa. Melalui upaya pembangunan desa ini, diharapkan dapat disusun suatu rencana strategis dalam upaya mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat serta mengembangkan potensi yang dimiliki, terutama sektor pertanian yang dominan ada di wilayah pedesaan.

Sebelum lebih lanjut mendiskusikan kebijakan dan strategi pembangunan desa, sebaiknya perlu diketahui dahulu apa kendala dan permasalahan yang ada terkait dengan pembangunan desa. Pengumpulan informasi dan analisis ini sangat penting diketahui yang menjadi pertimbangan utama bagaimana strategi pembangunan desa yang akan dijalankan. Melalui pengumpulan informasi secara holistik, serta analisis yang cermat, maka pembangunan desa dapat diarahkan pada aspek-aspek yang memang menjadi pengganjal kehidupan masyarakat desa.

Kendala yang dihadapi masyarakat pedesaan dalam melakukan pembangunan menurut Surahman (2014:3) antara lain:

1. Kemampuan masyarakat yang masih rendah dalam mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan desa;
2. Kondisi sarana dan prasarana desa yang masih terbatas dan cenderung terisolir;
3. Belum terbangun kelembagaan yang kuat dalam menampung peluang yang ada dalam kaitannya dengan pengembangan sektor usaha jasa dan perdagangan;
4. Keterbatasan akses masyarakat pada aspek permodalan, pengembangan teknologi produksi, pengembangan manajemen usaha, kondisi pasar, rendahnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, serta keberlanjutan usaha produksi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui kendala pembangunan desa mencakup aspek-aspek penting yang ada di dalam masyarakat. Kualitas manusia, lingkungan fisik dalam penyediaan fasilitas,

aspek kelembagaan, dan aksesibilitas masyarakat yang rendah dipandang masih menjadi ganjalan dalam pembangunan desa.

Dimensi pembangunan yang kurang berpihak pada masyarakat selain dilihat dari beberapa kendala yang telah disebutkan di atas, juga dapat dilihat dari bagaimana mengkonstruksikan konsep pembangunan dari ide yang mendasarinya. Faizal (2015: 36) berpendapat bahwa diskursus tentang pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek dari perubahan sosial atas implementasi pembangunan yang kurang berpihak pada kepentingan dan partisipasi masyarakat secara merata. Hal ini diperkuat dengan tiga alasan utama yang diungkapkan Faizal, antara lain:

1. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pendekatan *top-down* yang berlangsung utamanya selama masa orde baru, sehingga berakibat pada masyarakat yang terbelenggu dan tidak bisa berpartisipasi aktif;
2. Orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan *top-down* hanya meningkatkan kesejahteraan segelintir orang utamanya pada pihak yang berkuasa atas modal dan kebijakan;
3. Pembangunan ekonomi industri besar dan pengembangan teknologi sebagai lanjutan dari orientasi pertumbuhan ekonomi menyebabkan tenaga kerja lokal kehilangan lapangan pekerjaan dan hanya mampu menjadi objek, buruh kerja, dan atau penonton.

Masalah pembangunan, termasuk pembangunan desa, bukan hanya masalah bagaimana pembangunan itu diimplementasikan, tetapi juga bagaimana konstruksi pembangunan yang dibangun dan dilihat dari arah orientasi pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilakukan

dengan pendekatan *top-down* seperti yang diungkapkan Faizal, mempunyai berbagai kelemahan seperti rendahnya partisipasi masyarakat serta polarisasi penyebaran kesejahteraan yang terfokus pada pihak yang berkuasa atas modal dan kebijakan. Selain itu, pendekatan ini tentu juga tidak bisa menampung ide, kreativitas, budaya, potensi, serta keluh kesah masyarakat yang tentu bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Bagaimana mungkin dapat mengoptimalkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi dan lokalitas daerah jika belum mengakomodasi fakta heterogenitas yang ada di masyarakat.

Orientasi pembangunan yang tertuju dan terpusat pada pertumbuhan ekonomi juga menimbulkan tanda tanya besar tentang bagaimana pemerataan kesejahteraan. Efek menetes ke bawah yang dijadikan dalih atas pengembangan industri besar dan penembangan teknologi sudah lama menjadi pertanyaan para ekonom kritis apakah benar konsep tersebut dapat diwujudkan. Pada akhirnya yang menjadi kenyataan di masyarakat adalah terenggutnya sumber daya masyarakat lemah, kesejahteraan yang kurang merata, serta terbukanya jurang kesenjangan di masyarakat.

Kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan desa, salah satunya dapat dilihat dari pengabaian sektor pertanian. Pengabaian sektor pertanian ini disebabkan oleh bermacam faktor, antara lain (Little; Lewis; dalam Daryanto, 2003: 2):

1. Sebagian besar para pengambil keputusan dan para pakar di bidang ekonomi pembangunan berasal dari kaum elit kota dan mereka tidak begitu memahami perbedaan sifat dan karakteristik sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa;

2. Orientasi pembangunan yang terfokus pada pentingnya akumulasi kapital yang diterjemahkan dengan pembangunan industri;
3. Pandangan bahwa sektor pertanian merupakan penyedia surplus tenaga kerja sehingga dapat diserap sektor industri tanpa membutuhkan biaya transfer;
4. Pandangan bahwa masyarakat petani pedesaan sangat terikat dengan nilai-nilai tradisi sehingga tidak responsif pada insentif dari luar (pasar).

Kesenjangan pembangunan antar daerah disebabkan akibat adanya distorsi perdagangan antar daerah, distorsi pengelolaan sumber daya alam, dan distorsi sistem perkotaan-pedesaan. Kesenjangan pembangunan ini terwujud dan dapat ditelaah pada berbagai aspek. Aspek tersebut contohnya seperti kesenjangan dalam kualitas sumber daya manusia, pendapatan per kapita, ketersediaan sarana dan prasarana, pelayanan publik, dan akses permodalan dari perbankan (Daryanto, 2003:1).

Meskipun biasanya hubungan sektor pertanian dan sektor industri mempunyai hubungan yang dilematis, ternyata pemerintah China justru berhasil melakukan integrasi antar kedua sektor tersebut. Slogan filosofis yang didengungkan adalah *"leave agriculture, but not the country side"* dan *"enter the factory, but not the city"*. Hal ini diartikan bahwa pemerintah mempersilahkan warga desa untuk meninggalkan sektor pertanian namun sebaiknya jangan meninggalkan desa serta memperbolehkan masyarakat untuk memasuki sektor industri manufaktur, tetapi sebaiknya tidak memasuki kota.

Bab 5

Perencanaan

Pembangunan Pedesaan

Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan dan pendekatan yang digunakan mempunyai peran penting dalam mengatasi kendala pembangunan yang ada. Pertimbangan partisipasi masyarakat juga harus diperhatikan, dengan pandangan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga menjadi subjek pembangunan. Meskipun pembangunan melibatkan pihak di luar masyarakat dengan mengusung pengetahuan dan teknologi yang dianggap dapat menyelesaikan masalah pembangunan suatu wilayah, tetapi pembaharuan ini seyogianya tetap menyesuaikan dengan bagaimana kondisi sosial budaya dan lingkungan fisik di masyarakat. Sehingga yang diharapkan dari kebijakan pembangunan yang

demikian adalah pembangunan yang bernilai lokalitas daerah, melibatkan partisipasi dan potensi masyarakat, serta dilaksanakan pada sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan pembangunan menurut Surahman (2014: 7) harus dilandasi kebijaksanaan dalam memandang nilai tradisional, lokalitas, dan budaya yang mendarah daging di masyarakat. Pembangunan identik dengan perubahan masyarakat tradisional menuju modern dengan diikuti perubahan nilai dari nilai tradisional yang dirasa sebagai penghambat untuk kemudian digantikan dengan nilai dan budaya modern yang dianggap lebih mendukung pembangunan. Pandangan tersebut seharusnya dapat dikelola dengan lebih bijak, mengingat asas kerakyatan serta nilai-nilai dan kelembagaan yang ada di masyarakat justru dapat dijadikan dasar pijakan dalam membina kelangsungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Surahman menambahkan bahwa bantuan teknis atau fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat dalam upaya pembangunan desa kadang menemui kendala karena implementasi kerangka modernisasi dengan menempatkan masyarakat sebagai kesatuan yang homogen. Sehingga yang terjadi adalah keragaman pola perubahan yang dilaksanakan untuk keperluan seluruh sasaran pembangunan. Padahal dalam kenyataannya di masyarakat cenderung memiliki keragaman nilai dan kelembagaan antara masyarakat satu dan yang lain. Keberagaman nilai dan kelembagaan tersebut seyogianya tidak dipandang mudah sebagai suatu keseragaman.

Haeruman mengungkapkan bahwa penyusunan kebijakan pembangunan pedesaan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam kebijakan (Direktorat Permukiman dan Perumahan, Tanpa Tahun: 1).

Pertama, kebijakan secara tidak langsung yang bertujuan untuk menjamin pembangunan desa seperti penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kedua, kebijakan yang langsung diarahkan pada tujuan meningkatkan kegiatan ekonomi desa. Ketiga, kebijakan khusus yang dicanangkan untuk menjangkau desa dengan upaya khusus seperti penjaminan hukum demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Selanjutnya, Haeruman juga mengatakan bahwa dalam memandang pembangunan desa dapat melihatnya dari dua sudut pandang yang berbeda terkait campur tangan pihak di luar masyarakat desa. Pandangan pertama melihat pembangunan desa merupakan sesuatu yang alamiah berdasarkan pada optimalisasi potensi dan kemampuan masyarakat desa, sehingga yang terjadi adalah minimnya campur tangan pihak luar desa. Pandangan kedua melihat pembangunan desa terjadi karena proses interaksi antara potensi yang dimiliki masyarakat desa dengan dorongan dari pihak luar desa dalam konteks pembangunan desa.

Strategi dalam menjalankan pembangunan desa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan harus melibatkan masyarakat serta mengakomodasi potensi serta kondisi lingkungan masyarakat baik budaya dan lingkungan fisiknya. Interaksi dengan pihak di luar desa dalam kerangka pembangunan masyarakat bukanlah sesuatu yang salah, yang terpenting adalah bagaimana interaksi ini menguntungkan masyarakat secara umum. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menjadi perhatian utama dalam interaksi ini.

Pembangunan pedesaan diharapkan bukan menjadi ajang rutinitas penerapan kebijakan yang belum tentu sesuai dengan kondisi lokal masyarakat. Apalagi pembangunan desa justru menjadi dalih yang

sebenarnya membuka pintu segelintir pihak untuk mengeruk keuntungan lebih. Industrialisasi pedesaan contohnya jangan sampai menjadi wahana marginalisasi masyarakat desa. Kehilangan sumber daya yang telah menjadi sumber penghidupan seperti alih fungsi lahan pertanian serta ditambah perubahan mata pencaharian menjadi buruh, menempatkan masyarakat desa menjadi penonton kemajuan yang dibangun di tanah mereka sendiri.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Merancang konsep pembangunan yang berpihak pada masyarakat desa secara umum serta berkomitmen pada peningkatan kemakmuran masyarakat desa, maka diperlukan partisipasi masyarakat desa sendiri sebagai subjek dan objek pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan *top-bottom* yang kurang mengakomodasi partisipasi masyarakat, potensi serta kendala yang sebenarnya dihadapi, dapat digantikan dengan pendekatan *bottom-up*. Melalui pendekatan *bottom-up*, partisipasi masyarakat menjadi lebih tertampung dan terarahkan. Masyarakat juga dapat dilatih untuk memahami potensi yang dimiliki, mengenali kendala yang dihadapi, serta menentukan prioritas kegiatan yang akan dijalankan dengan mempertimbangkan sumber daya serta keterbatasan yang dimiliki.

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai suatu proses di mana kesempatan untuk ikut andil atau ikut ambil bagian dan mempengaruhi keputusan publik dimiliki oleh setiap individu yang terkait. Sehingga masyarakat ikut menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan secara demokratis (Long dalam Kolopaking, et. al., 2016:3). Keikutsertaan

masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan ini pada akhirnya juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat pada program atau kegiatan yang dijalankan dalam skema pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif diharapkan dapat menimbulkan berbagai manfaat seperti yang diungkapkan Kolopaking, *et. al.* (2016:15-16) sebagai berikut.

1. Mengembangkan kemampuan masyarakat agar dapat menggali potensi dan pengetahuan yang dimiliki serta kecakapan dalam memilah informasi;
2. Melatih masyarakat agar memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan;
3. Mengembangkan kemampuan masyarakat agar dapat bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan dan sesuai dengan perencanaan pembangunan;
4. Melatih masyarakat agar mampu menilai dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan;
5. Memberikan kesempatan bagi pihak luar agar dapat berinteraksi dan memahami kondisi masyarakat;
6. Meningkatkan kelancaran komunikasi dan kelembagaan yang terbangun di masyarakat.

Bab 6

Strategi Pembangunan Pedesaan

Strategi pembangunan pedesaan khususnya pada sektor pertanian merupakan aktualisasi dari analisis yang dibangun dengan melihat dari potensi dan kendala yang ada di masyarakat. Strategi pembangunan dirancang melalui perencanaan pembangunan yang mengakomodasi partisipasi masyarakat seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pembangunan pada desa diwujudkan contohnya seperti melalui pelaksanaan berbagai program.

Program Pembangunan Pedesaan

Berbagai program telah dicetuskan pemerintah Indonesia dalam upaya membangun desa sesuai bidang yang dirasa perlu ditangani. Seperti contohnya dalam tujuan mengejar ketertinggalan pembangunan daerah

perkotaan, pemerintah menginisiasikan program Inpres Desa Tertinggal, dan Program Pengembangan Terpadu Antar Desa (PPTAD). Upaya peningkatan sektor pangan dijalankan melalui program KOGM (Komando Gerakan Makmur), Bimas (Bimbingan Massal, Inmas (Intensifikasi Massal), Insus (Intensifikasi Khusus), dan Supra Insus. Serta dalam upaya menyokong program pangan, pemerintah menginisiasikan program bantuan permodalan bagi petani dalam bentuk Kredit Usaha Tani (KUT) (Direktorat Permukiman dan Perumahan, Tanpa Tahun: 1).

Kolopaking, *et. al.* (2016: 1) menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengatasi masalah kemiskinan yang ada di desa. Pembangunan desa dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat desa, penyediaan sarana dan prasarana desa, pengelolaan sumber daya alam, serta mengoptimalkan potensi desa. Program pembangunan desa yang dilakukan dapat diprioritaskan pada kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjamin kemudahan aksesnya oleh masyarakat desa;
2. Mendasarkan sumber daya lokal dan kemampuan teknis yang ada di masyarakat dan lingkungan desa untuk membangun dan merawat infrastruktur yang bermanfaat;
3. Mengembangkan ekonomi pertanian yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat desa;
4. Mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan teknologi yang menunjang pembangunan desa dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kondisi masyarakat desa;

5. Meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat desa dengan asas gotong royong.

Primahendra (2009: 6) berpendapat bahwa solusi permasalahan di pedesaan harus dimulai dari perubahan mindset serta diikuti dengan program yang komprehensif dengan mempertimbangkan modal dan potensi yang ada sebagai fondasi dasar. Primahendra mengungkapkan kebijakan dan program yang perlu dikembangkan mencakup beberapa hal seperti:

1. Penguatan akses masyarakat desa pada informasi, pasar, pelayanan keuangan, dan lainnya;
2. Perhatian pada kapasitas dan kelembagaan masyarakat desa;
3. Pembangunan infrastruktur desa yang menunjang kegiatan ekonomi pedesaan;
4. Fasilitasi pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat desa;
5. Penataan kelembagaan pada perdagangan dan tata niaga pertanian untuk melindungi hasil tani dari desa dapat didistribusikan secara *fair*;
6. Pengembangan kebijakan yang bertujuan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi pedesaan.

Pengelolaan kegiatan pembangunan desa dapat dilakukan melalui berbagai tindakan sistematis seperti yang dirumuskan Surahman (2014: 8) sebagai berikut.

1. Perumusan visi dan misi bersama tentang makna, urgensi dan prioritas-prioritas pembangunan;

2. Pengkajian potensi dan modal sosial yang dimiliki masyarakat;
3. Melaksanakan dan mengendalikan program;
4. Melakukan evaluasi dan refleksi bersama terhadap pelaksanaan program;
5. Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) program.

Kessa (2015:21-23) mengungkapkan berbagai bidang terkait pelaksanaan pembangunan desa antara lain:

1. Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa.
Contoh dari bidang pembangunan pengadaan infrastruktur desa seperti mengoptimalkan tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan menuju lahan pertanian, pembangkit listrik, dan lain sebagainya.
2. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
Contoh dari bidang pembangunan bidang sarana dan prasarana kesehatan seperti perhatian kepada ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi lingkungan.
3. Pelayanan Kesehatan Desa.
Contohnya seperti mengoptimalkan fungsi pelayanan posyandu yang terdapat di desa untuk menunjang pemberian fasilitas kesehatan terdepan bagi masyarakat desa.
4. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan.

Contohnya seperti pengadaan dan mengoptimalkan pada taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan, serta pengembangan dan pembinaan sanggar seni.

5. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Sarana dan Prasarana Ekonomi.

Contohnya seperti pembangunan dan mengoptimalkan pasar Desa, BUMDesa, pengembangan pembibitan tanaman pangan, fasilitasi tempat penggilingan padi, mengoptimalkan fungsi lumbung Desa, pembukaan lahan pertanian, perbaikan pengelolaan usaha hutan Desa, pengembangan usaha ternak ikan, fasilitasi kolam ikan dan pembenihan ikan, perhatian pada kapal penangkap ikan, fasilitasi gudang pendingin, mengoptimalkan fungsi tempat pelelangan ikan, tambak garam, pengembangan mesin pakan ternak, dan lain sebagainya.

6. Pelestarian Lingkungan Hidup.

Contoh pembangunan dalam bidang ini dapat dilakukan dengan cara penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai, dan perlindungan terumbu karang.

7. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Contoh pelaksanaan pembangunan pada bidang ini dapat dilakukan dengan pembinaan lembaga kemasyarakatan yang ada, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, serta pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Contoh pelaksanaan pembangunan dalam bidang ini seperti pengadaan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pengadaan pelatihan teknologi tepat guna; peningkatan kapasitas aparatur desa; peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan yang menjangkau semua kelompok dan lapisan masyarakat yang ada.

Prinsip Pembangunan Desa

Berbagai prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa pada terminologi desa membangun adalah sebagai berikut (Eko, 2015: 56):

1. Kemandirian desa dalam perencanaan.
2. Pembangunan didasarkan pada kearifan lokal dalam pengelolaan tata ruang dan sumber daya lokal.
3. Pembangunan dilakukan di desa dan berskala desa.
4. Pelaksanaan pembangunan berdasarkan pada kewenangan desa pada kewenangan asal-usul (mengelola *communal goods*) dan kewenangan nyata (mengelola *public goods*).
5. Pelaksanaan pembangunan merupakan kewenangan pemerintah desa dan masyarakat.
6. Pembangunan desa harus mengikutsertakan tokoh masyarakat lokal maupun pendamping dari pihak luar yang memahami lokalitas desa.
7. Peran pemerintah dalam pembangunan desa melalui pengakuan, dukungan, penguatan dan supervisi.

8. Terkait dengan alokasi dana dari pemerintah sebaiknya dikelola melalui satu pintu yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sedangkan prinsip dalam pembangunan desa pada terminologi membangun desa, antara lain (Eko, 2015: 60):

1. Pembangunan desa mempunyai desa atau lintas desa sehingga mempunyai cakupan yang lebih luas.
2. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota.
3. Pembangunan ini mengandung sektor-sektor (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air minum, pertanian, kehutanan, dan lain-lain).
4. Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi yang perlu dikembangkan dan permasalahan yang sedang dihadapi.
5. Pembangunan desa termasuk penyediaan ruang-ruang mobilitas sosial ekonomi masyarakat desa.
6. Pembangunan desa didasari analisis dan pendekatan spasial yang terintegrasi serta didukung dengan pertimbangan penganggaran yang jelas
7. Membutuhkan pendekatan teknokratik yang canggih
8. Membutuhkan keseimbangan antara *pro poor*, *pro-growth*, dan *pro jobs*.
9. Melibatkan partisipasi desa.
10. Responsif pada masalah lingkungan dan sosial.

Berbagai dampak pengembangan masyarakat desa salah satunya akibat dari kedudukan desa sebagai daerah otonom. Nugroho (2013:256-257) mengungkapkan beberapa dampak tersebut antara lain:

1. Pembangunan desa mempunyai orientasi utama pada *community development*. Pendidikan masyarakat menjadi prioritas utama dalam membuka wawasan dan kesadaran masyarakat desa pada segala potensi komunitas pada pembangunan.
2. Menumbuh-kembangkan komunitas masyarakat dengan cara komunikasi warga yang intensif dan menumbuhkan tradisi berkumpul serta bertukar pikiran antar warga.
3. Pembangunan desa dilakukan melalui pengembangan usaha yang berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
4. Pembangunan desa bertujuan untuk mengembangkan fasilitas yang dapat menampung kegiatan-kegiatan keorganisasian warga maupun pengembangan sosial-budaya masyarakat desa.
5. Memperkuat kelembagaan lokal di masyarakat desa seperti organisasi pemuda, desa wisata, dan lain sebagainya.

Bab 7

Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Pedesaan

Upaya pembangunan desa yang ditujukan untuk mengoptimalkan potensi desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Karena pada dasarnya pembangunan desa seharusnya dari desa dan untuk kemakmuran desa. Masyarakat desa bukanlah sebagai objek pembangunan, melainkan juga berpartisipasi aktif sebagai subjek pembangunan.

Salah satu langkah yang dapat dijalankan dalam mengoptimalkan pembangunan desa adalah melalui upaya pemberdayaan pada masyarakat desa, khususnya petani. Melalui proses pemberdayaan, masyarakat dilatih untuk mengembangkan diri dan lingkungannya. Walaupun ada bantuan pihak dari luar dalam proses pemberdayaan, maka

pihak tersebut merupakan fasilitator yang membantu mengantarkan masyarakat yang kurang berdaya menjadi lebih berdaya.

Upaya pemberdayaan melatih kesadaran masyarakat untuk lebih peka dalam membaca kendala yang dihadapi, potensi sumber daya yang dimiliki, keterbatasan yang dimiliki, serta memandang tujuan ke depan untuk hidup lebih baik. Kesadaran ini menjadi penting sehingga pada akhirnya masyarakat yang diberdayakan mampu menjalankan rangkaian pemberdayaan secara mandiri, bertanggungjawab serta berkelanjutan karena menyangkut hajat hidup masyarakat itu sendiri.

Gonsalves (*dalam* Widiastuti, 2015: 14) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah pilihan, kebebasan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, martabat, penghargaan, kerja sama, dan menumbuhkan rasa solidaritas dalam komunitas. Sedangkan Freire *dalam* Zubaedi (2013: 75-76) mengungkapkan konsep konsientasi sebagai suatu proses pemahaman dan penumbuhan kesadaran atas situasi yang sedang terjadi, baik dalam kaitannya dengan relasi-relasi politik, ekonomi dan sosial. Seseorang sudah berada dalam tahap konsientisasi jika ia sanggup menganalisis masalah mereka, mengidentifikasi sebab-sebabnya, menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru secara mandiri. Dalam kerangka ini, pemberdayaan identik dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya. Kesadaran kritis dalam diri seseorang dapat dicapai dengan cara melihat ke dalam diri sendiri serta menggunakan apa yang didengar dan dilihat, dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya.

Kemampuan masyarakat untuk menganalisis masalah yang dihadapi dan menentukan prioritas dengan mempertimbangkan potensi sumber daya

yang dimiliki merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan. Masyarakat dituntun untuk terus belajar dan berkreasi sesuai kondisi sosial dan lingkungannya untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Proses ini perlu sokongan dari berbagai *stakeholder* terkait dengan masing-masing peran yang berbeda, tetapi tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat desa seluruhnya yang mandiri dan berdaya.

Terkait dengan konsep pemberdayaan, Hutomo (2000: 6) merangkum berbagai pandangan Sumodiningrat mengenai konsep pemberdayaan ekonomi dan meringkasnya menjadi enam pokok pikiran utama sebagai berikut.

1. Perekonomian rakyat merupakan perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat yang mendasarkan pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian;
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan dengan langkah perubahan struktural dalam usaha mewujudkan ekonomi rakyat yang kuat, besar, dan berdaya saing dalam mekanisme pasar yang benar;
3. Perubahan struktural dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan perubahan dari ekonomi tradisional ke modern, dari ekonomi lemah ke kuat, dari ekonomi subsisten ke pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Pencapaian perubahan struktural tersebut dilakukan melalui perbaikan alokasi sumber daya, penguatan kelembagaan, peningkatan teknologi, dan pemberdayaan manusia dalam meningkatkan kualitasnya;
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat hendaknya menjamin pada

- terwujudnya kerja sama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang;
5. Kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat seperti, pertama, memperbesar akses rakyat pada aset produksi. Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha rakyat. Ketiga, peningkatan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Keempat, penguatan industri kecil. Kelima, mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru. Keenam, perlunya perhatian pada pemerataan spasial;
 6. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan kualitas manusia, serta peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung.

Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat mempunyai sasaran strategis seperti membangun basis-basis ekonomi yang mendasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya lokal yang ada. Pemberdayaan masyarakat juga harus mendorong terciptanya proses ekonomi yang lebih demokratis dan berkeadilan serta terwujudnya kemandirian dan keberlanjutan (Karsidi, 2001: 122). Selain itu, Suharto (*dalam Sa`adah*, 2015: 39) berpendapat bahwa pemberdayaan bertujuan untuk mengembangkan individu atau kelompok masyarakat melalui penguatan kapasitas yang diperlukan dalam peningkatan kualitas hidup komunitasnya.

Tujuan pemberdayaan ditekankan pada upaya penyelesaian kendala yang dihadapi masyarakat desa yang menjadi kebutuhannya. Segala

potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat desa harus dicermati sebagai fondasi menjalankan kegiatan pemberdayaan. Potensi tersebut contohnya seperti lahan yang dapat dioptimalkan fungsinya, kuatnya modal sosial yang ada di masyarakat desa, nilai dan budaya yang masih dijunjung tinggi, dan lain sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat desa tentunya melibatkan berbagai pihak yang mempunyai peran dan kepentingan masing-masing. Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, Akademisi, dan lain sebagainya dapat ikut ambil bagian dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pihak-pihak ini harus sadar bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan mempunyai orientasi kepada kepentingan perkembangan masyarakat desa. Serta masyarakat desa sendiri juga harus menyadari bahwa bantuan dalam berbagai bentuk serta upaya fasilitasi yang dilakukan pihak luar tentu tidak akan berjalan selamanya. Sehingga pemberdayaan harus mampu membangkitkan kesadaran masyarakat akan kemandirian dan rasa tanggung jawab bukan justru menimbulkan ketergantungan.

Pemberdayaan juga mempunyai tujuan seperti yang dirilis *United Nations* dalam poin-poin proses pemberdayaan masyarakat (Tampubolon dalam Zubaedi, 2013:77-79). Poin-poin tersebut antara lain sebagai berikut.

1. *Getting to Know The Local Community*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat/lokal yang akan diberdayakan, termasuk dapat membedakan dengan karakteristik masyarakat lain.

2. *Gathering Knowledge About The Local Community*

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Informasi yang dikumpulkan mengenai distribusi penduduk menurut umur, seks, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan tentang nilai, sikap, ritual, dan custom, jenis pengelompokan masyarakat, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

3. *Identifying The Local Leaders*

Mengidentifikasi siapa saja tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Hal ini perlu dipertimbangkan demi menunjang keberhasilan pemberdayaan nantinya.

4. *Stimulating The Community to Realize That it has Problems*

Tujuan utama dari langkah ini adalah agar masyarakat dapat mengutarakan masalah-masalah apa yang dihadapi dan perlu dicarikan pemecahannya.

5. *Helping People to Discuss Their Problem*

Proses ini mendorong masyarakat agar dapat mendiskusikan masalah yang dihadapi, dan merumuskan pemecahannya.

6. *Helping People to Identify Their Most Pressing Problems*

Proses ini mendorong masyarakat untuk dapat mengidentifikasi prioritas masalah mana yang paling menekan, sehingga masalah inilah yang harus diutamakan dicarikan pemecahannya.

7. *Fostering Self-Confidence*

Proses ini bertujuan untuk mendorong masyarakat menjadi lebih

percaya diri.

8. *Deciding on A Program Action*

Pada tahap ini masyarakat perlu diberdayakan untuk dapat menetapkan program atau aksi nyata apa yang bisa dilakukan dengan skala prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.

9. *Recognition of Strengths and Resources*

Tahapan ini merupakan upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka memiliki potensi yang dapat mereka gali dan kembangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

10. *Helping People to Continue to Work on Solving Their Problems*

Mengingat pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang berkesinambungan, maka masyarakat juga harus disadarkan bahwa upaya yang dilakukan harus berjalan secara berkelanjutan.

11. *Increasing People's Ability for Self-Help*

Kemandirian merupakan tujuan dari adanya pemberdayaan, oleh karena itu masyarakat yang berhasil dalam proses pemberdayaan ialah masyarakat yang mandiri yaitu masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri.

Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan pemberdayaan menyangkut berbagai pihak yang berorientasi pada kepentingan masyarakat desa yang diberdayakan. Selain kesepahaman dalam memandang tujuan pemberdayaan, harus disadari juga pendekatan pemberdayaan apa yang dinilai cocok dengan kondisi masyarakat desa yang akan diberdayakan.

Upaya pemberdayaan masyarakat menurut Munandar (2008:153) dapat dijalankan melalui tiga pendekatan. Ketiga pendekatan tersebut antara lain:

1. Pendekatan Mikro

Melalui pendekatan mikro, pemberdayaan utamanya dilakukan langsung pada individu yang akan diberdayakan. Kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui proses bimbingan, konseling, *stress management*, dan intervensi krisis. Pendekatan mikro mempunyai tujuan utama untuk membimbing dan melatih individu dalam menjalankan tugas dalam kehidupannya.

2. Pendekatan Mezzo

Melalui pendekatan mezzo, upaya pemberdayaan dilakukan melalui kelompok masyarakat sebagai media intervensi. Kelompok masyarakat diajarkan agar dapat memecahkan masalah dan mencari jalan keluar terbaik dengan cara meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu.

3. Pendekatan Makro

Melalui pendekatan makro, upaya pemberdayaan dilakukan dengan langkah yang terfokus pada strategi seperti perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobi, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Hal ini karena pendekatan ini memang ditujukan pada sasaran perubahan dengan lingkungan yang relatif lebih luas.

Ketiga pendekatan pemberdayaan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat

desa yang akan diberdayakan. Terdapat masyarakat desa yang kendalanya dapat dipecahkan dengan pendekatan pemberdayaan mikro, mezzo, maupun makro. Seperti contohnya jika ditemukan bahwa masalah utama ada pada kebijakan yang kurang mengakomodasi kepentingan perkembangan masyarakat desa secara umum, maka pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan makro. Demikian juga apabila masyarakat desa mempunyai kendala dalam kondisi ekonomi rumah tangga, maka pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara pendekatan mikro yang langsung pada masing-masing individu maupun melalui kelompok masyarakat terutama yang sudah lama terbentuk.

Pendekatan mikro mempunyai kelebihan dalam proses pemberdayaan karena pihak pemberdaya secara langsung dapat berinteraksi dengan individu masyarakat desa yang diberdayakan. Interaksi yang intensif ini memungkinkan transfer pengetahuan yang lebih lancar, dan proses monitoring yang lebih mudah. Namun pendekatan ini mempunyai kelemahan salah satunya tidak dapat menjangkau banyak individu dalam waktu yang singkat.

Tahapan Pemberdayaan

Proses pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai proses yang direncanakan dengan cermat berdasarkan analisis kendala masyarakat desa serta pendekatan yang digunakan. Tahapan pemberdayaan secara umum seperti yang dijabarkan oleh Aziz (*dalam* Widiastuti, 2015: 13) sebagai berikut.

1. Membantu masyarakat dalam menemukan masalah yang dirasa memberatkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Melakukan analisis atas permasalahan tersebut secara mandiri dan partisipatif.
3. Setelah menemukan masalah dan menganalisisnya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan skala prioritas masalah, untuk menemukan masalah mana yang paling mendesak untuk segera diselesaikan.
4. Mencari pemecahan masalah dengan pendekatan sosiokultural.
5. Melakukan aksi nyata di lapangan untuk menjalankan solusi pemecahan masalah.
6. Melakukan evaluasi atas seluruh rangkaian pemberdayaan yang dilakukan.

Peran Fasilitator Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dimaknai sebagai upaya memberikan daya pada pihak yang dirasa kurang berdaya. Diperlukan kesadaran untuk mengetahui ketidakberdayaan yang dihadapi, bagaimana cara mengatasinya, dan tujuan lebih besar apa yang hendaknya dijadikan sasaran. Oleh karena itu, pihak yang mempunyai kelebihan terutama dalam hal pengetahuan mempunyai peran penting dalam membantu proses pemberdayaan masyarakat. Pihak ini dapat berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi, LSM, pemerintah, dan lain sebagainya. Nantinya pihak ini akan memfasilitasi masyarakat dalam rangkaian tahapan pemberdayaan yang dijalankan. Peran pendamping atau fasilitator pemberdayaan, salah satunya dijelaskan oleh Sa`adah (2015: 42) antara lain:

1. *Facilitative Role*

Merupakan peran untuk membantu masyarakat menemukan informasi yang diperlukan untuk diberdayakan. Peran ini dapat dilakukan baik dengan pendekatan formal dan informal. Pendekatan formal dilakukan dengan pertemuan formal seperti rapat dengan perangkat desa, pertemuan warga, maupun kegiatan pemerintah setempat. Sedangkan pendekatan informal dilakukan dengan berbaur dan mengikuti kegiatan sehari-hari masyarakat. Informasi ini penting untuk mengetahui potensi masyarakat, membentuk, dan menyusun langkah pengembangan potensi tersebut.

2. *Educational Role*

Peran ini pada intinya merupakan peran seorang pendamping untuk dapat memotivasi anggota komunitas untuk dapat ikut andil dalam proses pemberdayaan. Selain itu juga perlu meyakinkan anggota kelompok bahwa kontribusi yang diberikan akan dihargai dan bermanfaat bagi kelompok masyarakat. Sehingga dukungan ini akan memudahkan proses pemberdayaan karena seluruh komponen kelompok dapat ikut berkontribusi.

3. *Representative Role*

Peran ini hampir sama dengan peran sebelumnya yang berupaya meyakinkan masyarakat agar percaya diri dan ikut berkontribusi. Lebih jauh, peran representatif dilakukan dengan meyakinkan representasi masyarakat untuk ikut merasa memiliki dan aktif dalam program pemberdayaan. Sehingga mereka juga ikut merasa bertanggungjawab akan keberhasilan program pemberdayaan, selain itu juga lebih menjamin keberlanjutan program pemberdayaan.

4. *Technical Role*

Peran ini dimaksudkan agar masyarakat ikut serta secara teknis dalam berjalannya proses pemberdayaan. Sehingga diharapkan masyarakat merasa memiliki program, ikut melaksanakan, dan pada akhirnya akan menerima manfaat.

Pemberdayaan Masyarakat Petani Pedesaan

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Pemberdayaan ini ditujukan untuk mengembangkan kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya ini dapat dilakukan dengan penetapan kebijakan, pengadaan program dan kegiatan, serta pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat desa (Kessa, 2015: 18).

Pemberdayaan masyarakat desa terutama ditujukan bagi para petani karena memang sebagian besar masyarakat desa bertahan hidup dengan mengandalkan hasil olah lahan pertanian. Melalui pemberdayaan, petani dibangkitkan kesadaran untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilannya dalam usaha tani untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik. Program pemberdayaan disesuaikan dengan analisis kendala yang dihadapi oleh petani dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan juga bisa bermacam-macam, baik yang secara langsung seperti pendekatan mikro dan mezzo, ataupun untuk tujuan perubahan struktural dengan pendekatan makro.

Elizabeth (2007: 38) mengungkapkan salah satu tujuan

pemberdayaan masyarakat petani adalah terciptanya suatu iklim yang kondusif dan menguatkan daya tawar petani dalam melakukan usaha tani. Penciptaan iklim yang kondusif ini meliputi:

1. Perbaikan sistem dan mekanisme pemasaran hasil usaha tani, termasuk peningkatan harga jual di tingkat petani.
2. Perubahan persepsi secara sosial dalam memandang profesi petani, sehingga nilai kerja petani tidak dianggap sebagai pekerjaan alternatif, kurang terhormat, serta tidak mampu mengangkat status kehidupan dalam masyarakat.
3. Adopsi teknologi pertanian harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan peran petani serta pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) yang mungkin lebih potensial dalam merawat kelestarian lingkungan maupun nilai-nilai lokal.

Tujuan ekonomi merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi rumah tangga petani pedesaan. Akses yang lebih minim pada berbagai fasilitas serta informasi berakibat petani pedesaan sulit berkembang. Oleh karena itu perbaikan dalam sistem usaha tani dengan pengembangan pengetahuan dan teknologi dalam mengelola lahan pertanian perlu dilakukan melalui upaya pemberdayaan. Adopsi teknologi maupun pengetahuan baru pada petani juga harus memperhatikan lokalitas sosial, budaya dan kondisi lingkungan fisik desa di mana petani tinggal. Sehingga pengembangan ini selaras dengan kebutuhan dan potensi petani pedesaan untuk mengangkat derajat hidup mereka menjadi lebih berdaya dan mandiri.

Pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat petani pedesaan disokong oleh karakteristik masyarakat yang mendukung upaya

pemberdayaan. Tentu, setiap kondisi desa satu dengan lainnya mempunyai karakteristik yang berbeda, tetapi secara garis besar, faktor yang dapat mendukung dalam pelaksanaan upaya pemberdayaan petani adalah sebagai berikut (Elizabeth, 2007: 37).

1. Solidaritas yang dimiliki masyarakat petani pedesaan.
2. Kelembagaan petani berupa struktur dan aturan main yang diciptakan sendiri akan lebih ditaati, dihargai, dan dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat petani.
3. Kelembagaan petani dengan struktur sederhana dan bersifat informal serta mekanisme yang berjalan adalah mencapai keputusan yang adil bukan persaingan.
4. Petani dan buruh tani mempunyai persepsi yang baik pada kedudukan dan peran usahatani.
5. Petani cenderung mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi.
6. Petani dapat menyesuaikan pada agroekosistem setempat, mekanisme pembangunan yang diterapkan serta dinamikanya dalam upaya menyasati eksploitasi oleh petani lapisan atas.

Peran Stakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Noor (2011:98) berpendapat jika pelaksanaan pemberdayaan masyarakat seharusnya melibatkan berbagai elemen yang ada di masyarakat dan mengoptimalkan potensi yang ada, seperti yang beberapa aspek berikut:

1. Pemerintah yang mampu berperan dalam meningkatkan partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan kebijakan dan

peraturan yang mendukung.

2. Keikutsertaan berbagai lembaga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lokal maupun nasional.
3. Keikutsertaan lembaga masyarakat yang tumbuh dalam masyarakat (*local community organization*) seperti BPD, PKK, Karang Taruna dan sebagainya,
4. Pengoptimalan peran koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat.
5. Keikutsertaan pendamping dalam membantu mengembangkan potensi masyarakat.
6. Perencanaan pembangunan harus mencakup pemberdayaan dengan pendekatan *bottom-up*.
7. Keterlibatan semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat yang lebih mampu.

Penjabaran di atas merupakan contoh mengenai stakeholder yang terlibat dan peran yang dijalankan dalam upaya pemberdayaan masyarakat petani pedesaan. Analisis stakeholder tidak dapat dikesampingkan dalam pelaksanaan upaya pemberdayaan. Karena dengan demikian, diharapkan terwujud hubungan yang sinergis dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Sehingga yang terpenting adalah keikutsertaan semua pihak terkait dengan mengusung tujuan yang sama yaitu membuat masyarakat petani pedesaan menjadi lebih berdaya.

Bab 8

Introduksi Teknologi dan Inovasi dalam Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Petani Pedesaan

Bahasan pada bagian ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat petani pedesaan. Sedikit mengulas kembali bahwa pembangunan desa yang berusaha mencapai kesejahteraan masyarakat desa serta memupuk kemandirian desa dapat dilakukan dengan pemberdayaan. Pemberdayaan didasarkan atas kesadaran masyarakat desa sendiri untuk dapat menganalisa kendala, potensi, serta menentukan prioritas kegiatan yang akan dijalankan. Kegiatan pemberdayaan pada masyarakat desa sebagai suatu upaya membangun masyarakat desa salah satunya dapat dilakukan dengan mengenalkan pengetahuan, inovasi, serta teknologi baru yang

memudahkan masyarakat desa terutama dalam mengoptimalkan potensi pada mata pencaharian utamanya. Tentunya pengetahuan, inovasi, dan teknologi baru ini disesuaikan dengan lokalitas masyarakat desa, seperti lingkungan alam, sosial, dan budaya.

Sektor pertanian dijadikan contoh karena sebagian besar tipologi desa adalah desa pertanian, sehingga mayoritas masyarakat desa mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Petani yang menjadi fokus utama dalam pemberdayaan difokuskan pada *peasant* yang rentan pada kemiskinan. *Peasant* merupakan golongan petani yang hidup sederhana dengan menggantungkan olah lahan pada kondisi lingkungan, menggunakan teknologi sederhana, serta mempunyai tujuan utama memenuhi kebutuhan rumah tangga secara subsisten. Paradigma ini bukanlah suatu yang salah, di mana *peasant* tidak harus diubah menjadi *farmer*. Pada kenyataannya, *peasant* justru dapat memelihara dengan baik nilai budaya yang ada secara turun-temurun serta melestarikan lingkungan alam.

Pemberdayaan pada *peasant* paling tidak dapat memberikan suatu jaring pengaman ketika lingkungan alam sedang tidak bersahabat sehingga berdampak pada hasil panen lahan pertanian di mana mereka menggantungkan hidup dan rumah tangganya. Nilai-nilai modal sosial yang ada pada *peasant* bukanlah suatu penghalang dalam upaya pembangunan, tetapi justru menjadi potensi kuat yang harus dipertahankan. Maka pengembangan teknologi juga harus seiring dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Introduksi teknologi pada sektor pertanian perlu mempertimbangkan aspek petani sebagai subjek utamanya. Seperti keterangan Scott yang

dijelaskan oleh Chiari (2015: 14), sebagian besar petani pada kenyataan di lapangan lebih cenderung mengedepankan aspek moral dibandingkan dengan rasionalitas dalam hal ini penggunaan teknologi pertanian. Sehingga yang ditekankan adalah timbulnya kerja sama baik itu dalam keluarga atau antar individu petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti contohnya dalam hal pembagian kerja rumah tangga petani yang bersifat fleksibel dan tidak mengikat secara adaptif. Usaha tani dilakukan secara bergotong royong oleh anggota keluarga. Meskipun istri seorang petani dalam sehari-hari bertugas mengurus pekerjaan rumah tangga, namun pada kondisi tertentu ia dapat membantu suaminya untuk menambah penghasilan keluarga dengan ikut bekerja.

Introduksi teknologi pada petani yang mendasarkan petani sendiri sebagai subjek utama, maka mereka juga mempunyai pertimbangan tertentu terkait dengan teknologi baru yang akan digunakan. Fliegel et al. (dalam Abdullah, 2008: 191) mengungkapkan bahwa terdapat Lima hal yang menjadi pertimbangan petani dalam mengadopsi teknologi baru pertanian, antara lain:

1. Pertimbangan penambahan keuntungan dari pengadopsian teknologi baru.
2. Kesesuaian teknologi dengan sosial budaya masyarakat.
3. Rasa percaya petani dari pengamatan pada penerapan teknologi di petani lain.
4. Mencoba sendiri keberhasilan teknologi.
5. Pertimbangan pada ketersediaan modal dan perhitungan harga hasil pertanian karena konsekuensi kenaikan produksi.

Maamun et al. (dalam Abdullah, 2008: 191) menambahkan empat faktor lain yang menjadi pertimbangan ketersediaan petani dalam mengadopsi teknologi pertanian, yaitu:

1. Pertimbangan sifat dan karakter pada petani baik secara individu maupun kelompok.
2. Pertimbangan faktor sosial, ekonomi dan budaya.
3. Penampakan teknologi serta bagaimana kesesuaian teknologi jika diterapkan.
4. Pertimbangan faktor eksternal seperti aspek pelayanan dan kebijaksanaan dari lembaga terkait.

Pemanfaatan Lahan pekarangan

Pekarangan diartikan sebagai sebidang tanah yang memiliki batas tertentu, di atasnya terdapat bangunan tempat tinggal dan berhubungan secara fungsional dengan penghuni dalam aspek ekonomi, biofisik, maupun sosial budaya. Pekarangan terletak di sekitar perumahan yang kebanyakan berpagar keliling dan ditanami dengan tanaman untuk kebutuhan sehari-hari maupun diperjualbelikan. Pekarangan juga sering disebut dengan lumbung hidup, warung hidup, atau juga apotek hidup. Penyebutan ini terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan tersebut. Disebut lumbung hidup karena tanah pekarangan dapat digunakan untuk menanam tanaman padi, jagung, dan umbi-umbian yang ditanam di pekarangan sebagai cadangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebagai warung hidup karena pekarangan dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman sayuran, buah-buahan, maupun bumbu dapur yang biasanya didapatkan dengan cara membeli dari warung. Pekarangan disebut juga sebagai apotek hidup karena dapat digunakan untuk

membudidayakan berbagai tanaman obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit jika penghuni rumah sedang menderita penyakit tertentu (Mardikanto; Hartono et al; Sajogyo *dalam* Ashari dan Purwantini, 2012: 15).

Pemanfaatan lahan pekarangan bukan saja sekadar efisiensi pemanfaatan lahan yang tersedia tetapi ada tujuan yang lebih besar dari itu. Pemanfaatan lahan pekarangan di sekitar rumah yang ditujukan untuk budidaya tanaman sebenarnya dapat menunjang ketahanan pangan nasional dan pemenuhan gizi masyarakat. Karena salah satu masalah penting yang dihadapi Indonesia adalah kerawanan pangan dan konsumsi pangan yang masih di bawah anjuran pemenuhan gizi (Ashari dan Purwantini, 2012: 14).

Lahan pekarangan di sekitar rumah mempunyai kontribusi pada kehidupan petani dalam hal penyediaan kebutuhan sehari-hari keluarga petani secara berkesinambungan. Salah satu pemanfaatannya seperti budidaya ternak dan tanaman yang dikelola di pekarangan rumah yang memberi kontribusi terhadap pendapatan keluarga petani. Pemanfaatan pekarangan selanjutnya juga dapat didayagunakan sebagai penghasil bahan makanan sebagai tambahan hasil dari sawah dan tegal, pekarangan dapat dimanfaatkan untuk membudidayakan sayur dan buah-buahan, unggas, ternak kecil dan ikan, tanaman rempah, tanaman untuk bumbu dapur dan wangi-wangian, serta tanaman bahan kerajinan tangan (Sajogyo; Salikin; Arifin *dalam* Ariati, 2017:77).

Pemanfaatan lahan pekarangan menurut Mardiharini (*dalam* Ashari dan Purwantini, 2012:14) dapat digunakan untuk budidaya tanaman pangan, tanaman obat, hortikultura, dan ternak yang berpotensi dapat

memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, pemanfaatan pekarangan juga dapat menjadi sumber tambahan pendapatan keluarga juga direncanakan dengan baik. Akan tetapi, perhatian petani dalam pemanfaatan lahan pekarangan masih sangat minim, sehingga inovasi dalam pemanfaatan lahan pekarangan belum menemui hasil yang diharapkan.

Harijati dalam Manyamsari dan Mujiburrahmad (2014:59) melihat keberhasilan petani dalam usaha tani sebenarnya berkaitan dengan kompetensi agribisnis yang dimiliki petani. Kompetensi agribisnis sendiri merupakan kemampuan untuk berpikir, bersikap, dan bertindak dalam mengelola usaha tani untuk mengoptimalkan manfaat, membangun kerja sama antar subsistem usaha tani, pengelolaan hasil usaha tani, dan berwawasan kegiatan usaha tani yang berkelanjutan. Manyamsari dan Mujiburrahmad (2014:60) menambahkan dalam kerangka berpikir agribisnis, petani dapat mengoptimalkan usaha tani bahkan di lahan sempit dengan menerapkan manajemen agribisnis dalam usahatannya. Petani disarankan tidak hanya berfokus pada upaya peningkatan produksi, tetapi juga mengembangkan pengelolaan hasil usaha tani untuk menambah nilai jualnya.

Inovasi dan Teknologi Vertikultur Sebagai Upaya Pengembangan Potensi Desa

Salah satu pemanfaatan lahan pekarangan sebagai lahan budidaya tanaman dapat dilakukan dengan berbagai metode penanaman. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknik vertikultur, di mana budidaya tanaman dilakukan secara vertikal dengan penanaman tanaman yang dilakukan dengan bertingkat. Vertikultur menyesuaikan dengan

kondisi lahan pekarangan yang memang tidak terlalu luas bahkan pada area rumah yang tidak memiliki halaman rumah sekalipun. Melalui budidaya tanaman secara vertikultur, keuntungan yang didapatkan adalah memanfaatkan lahan yang ada secara efisien serta menambah segi estetika rumah dengan menyuguhkan pemandangan indah berbagai warna sesuai tanaman yang ditanam. Vertikultur sebenarnya dapat dilakukan dengan metode yang mudah dengan bahan-bahan yang dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan sekitar (Kusmiati dan Solikhah, 2015:95).

Pengenalan pemanfaatan lahan pekarangan pada rumah tangga petani pedesaan dapat dijadikan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani pedesaan dengan pendekatan mikro atau langsung pada masing-masing individu petani oleh pihak pemberdaya. Melalui upaya ini, diharapkan hasil panen pertanian petani terutama *peasant* menjadi lebih variatif terutama jika untuk memenuhi kebutuhan hidup skala rumah tangga petani. Pemberdayaan melalui pendekatan mikro memungkinkan interaksi yang intensif antara pihak pemberdaya dengan yang diberdayakan. Diharapkan dengan berhasilnya salah satu petani mengembangkan sistem vertikultur, maka pengembangan ini dapat menjalar pada petani lain.

Peran pemberdaya dalam hal ini adalah membantu mengenalkan petani pada sistem vertikultur serta membantu menganalisis bagaimana bangun vertikultur yang sesuai. Sebagai sebuah variasi sistem budidaya tanaman, vertikultur dapat digunakan untuk membudidayakan berbagai macam jenis tanaman. Tetapi akan lebih baik jika tanaman yang dipilih sesuai dengan kebutuhan serta kondisi yang ada di lingkungan pekarangan rumah tangga petani pedesaan. Pemanfaatan lahan pekarangan dengan teknik vertikultur yang ditujukan untuk menanam sayuran dan buah ternyata mempunyai alasan kuat karena kedua varian tanaman tersebut merupakan

satu dari empat pilar pangan berimbang yang dianjurkan dalam pemenuhan gizi keluarga (Prihatmmoko dalam Ariati, 2017: 78). Penanaman dengan vertikultur pada jenis tanaman buah dan sayuran maka dapat meningkatkan asupan gizi rumah tangga petani pedesaan. Apabila petani terutama *peasant* mempunyai pola hidup yang subsisten, maka dengan mengoptimalkan sistem vertikultur, *peasant* tetap dapat menghasilkan hasil panen yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dengan standar gizi yang terpenuhi.

Vertikultur yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari akan lebih baik jika diolah dengan menggunakan konsep bebas pestisida kimia atau dengan kata lain menggunakan biopestisida. Dengan begitu, vertikultur bukan saja sumber penambahan kuantitas asupan makanan ke keluarga tetapi juga meningkatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Pengembangan ini dapat dihubungkan dengan usaha tani yang lain seperti pemeliharaan hewan ternak, dimana kotoran hewan ternak ini dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman secara vertikultur yang diolah di pekarangan rumah.

Tanaman Vertikultur

Menurut Kusmiati dan Solikhah (2015:95) tanaman yang ditanam dengan teknik vertikultur harus memperhatikan kriteria tanaman yang bernilai ekonomis, berumur pendek atau tanaman semusim, dan tanaman yang perakarannya tidak terlalu luas sehingga dapat hidup di media tanam yang digunakan pada vertikultur. Pendapat ini sejurus dengan apa yang diungkapkan Lukman (2011:1) bahwa tanaman yang sebaiknya ditanam dengan sistem vertikultur sebaiknya memenuhi persyaratan bahwa tanaman

tersebut sesuai kebutuhan dan mempunyai nilai ekonomis, berumur pendek, dan berakar pendek. Rangkaian sistem vertikultur yang dipersiapkan juga harus kuat dan dapat dipindah-pindahkan. Beberapa jenis sayuran yang dapat ditanam dengan sistem vertikultur contohnya seperti bayam, mentimun, selada, kacang panjang, kangkung, pare, pakcoi, tomat, caisim, kemangi dan katuk.

Raspto (2006:425-426) mengelompokkan berbagai jenis tanaman khususnya sayuran berdasarkan bagian yang dimanfaatkan dan dapat dibudidayakan dengan sistem penanaman secara vertikultur. Raspto membaginya menjadi 5 jenis tanaman, yaitu:

1. Sayuran Buah

Sayuran buah dibudidayakan dengan tujuan untuk dipanen dan dikonsumsi bagian buahnya. Secara garis besar, sayuran yang dapat ditanam dengan pot dengan sistem vertikultur contohnya seperti terung, cabai rawit, cabai besar, tomat, pare, mentimun, buncis, kacang panjang, paprika, kapri, dan kecipir.

2. Sayuran Daun

Sayuran daun dibudidayakan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagian daunnya. Sayuran yang dapat ditanam dengan sistem vertikultur seperti selada, caisim, kangkung, bayam, bawang daun, seledri, kobis, talas daun, pakcoi, kemangi, dan kailan.

3. Sayuran Bunga

Sayuran ini merupakan sayuran yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan bagian bunganya. Jenis sayuran yang dapat ditanam secara vertikultur seperti bunga kol dan brokoli. Tetapi sayuran ini

juga harus memperhatikan kondisi iklim lokasi pembudidayaan, karena pada umumnya sayuran ini ditanam di dataran tinggi.

4. Sayuran Umbi

Penanaman sayuran yang dimanfaatkan umbinya memang jarang dibudidayakan dengan sistem vertikultur karena media tanam hanya terbatas pada ruang pot, sehingga pot yang dipakai harus yang tinggi agar pertumbuhan umbi dapat maksimal. Sayuran umbi yang dapat dibudidayakan contohnya seperti lobak, kentang, wortel, bawang Bombay, bawang merah, bawang putih, dan radish.

5. Tanaman Empon-empon

Penanaman tanaman empon-empon secara vertikultur di lahan pekarangan dapat memudahkan keluarga petani jika membutuhkan dan tidak perlu membeli ke warung. Tanaman ini dapat digunakan sebagai bumbu dapur, sehingga pasti dibutuhkan oleh rumah tangga petani. Tanaman empon-empon yang dapat dibudidayakan dengan sistem vertikultur contohnya seperti temu kunci, kencur, serai, lengkuas, dan kunyit.

Ariati (2017:80) menambahkan jenis-jenis sayuran yang dapat ditanam dengan sistem vertikultur adalah sebagai berikut.

1. Sawi hijau (*brassica sinensis L*) merupakan sayuran yang dapat ditanam sepanjang tahun, dapat hidup di dataran rendah maupun tinggi meskipun biasanya ditanam pada dataran rendah dengan medium ketinggian 5-1200 dpl. Sawi merupakan tanaman yang relatif mudah untuk dibudidayakan karena tanaman ini tahan terhadap berbagai jenis cuaca, baik pada musim hujan maupun kemarau (dengan penyiraman rutin). Sawi hijau dapat dipanen setelah

umur 40-50 hari setelah penyemaian. Sawi hijau dipanen dengan cara dipotong pangkal batang, mencabut seluruh tanaman, atau daunnya dipetik satu per satu.

2. Bayam (*Amaranthus spt.*) merupakan sayuran dengan ciri batangnya berair dan kurang berkayu, daun bertangkai berbentuk bulat telur, lemas, berwarna hijau, merah atau hijau keputihan. Bayam mempunyai bunga yang tersusun majemuk tipe tukal yang rapat bagian bawah dan memiliki biji yang berwarna hitam, kecil dan keras. Bayam termasuk jenis sayuran yang relatif mudah untuk dibudidayakan termasuk dengan teknik vertikultur. Hal ini karena bayam memiliki perakaran pendek dan termasuk tanaman semusim yang membutuhkan iklim hangat dan cahaya kuat.
3. Tomat (*Solanum lycopersicum syn.*) sebenarnya merupakan tanaman asli dari daerah Amerika Tengah dan Amerika Selatan, dari Meksiko sampai Peru. Tomat berwarna mulai dari hijau, kuning, sampai merah yang memiliki siklus hidup yang singkat dan dapat tumbuh setinggi 1-3 m. Tomat dibudidayakan karena dapat dimakan langsung ataupun diolah sebagai sayur dalam masakan.
4. Kangkung (*Ipomoea aquatica forsk*) merupakan jenis sayuran yang dapat dibudidayakan dengan dua cara penanaman, yaitu dengan penanaman kering dan basah. Kangkung dapat ditanam dari biji maupun keratan akar dan biasanya disemai dulu sebelum dipindahkan ke kebun.
5. Terung (*Solanum melongena*) merupakan sayuran yang dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun tinggi. Terung baik ditanam pada daerah dengan suhu antara 22 – 30 derajat celsius, pada jenis tanah

- lempung berpasir, mendapat sinar matahari cukup dan baik ditanam pada musim kemarau.
6. Cabai juga merupakan tanaman yang potensial untuk dibudidayakan secara vertikultur di lahan pekarangan. Pada umumnya cabai dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun sebagai komoditas untuk diperdagangkan.

Kelebihan dan Kekurangan Vertikultur

Damastuti (*dalam* Kusmiati dan Solikhah, 2015: 95) mengungkapkan sistem budidaya tanaman dengan teknik vertikultur mempunyai berbagai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem vertikultur yaitu:

1. Efisiensi penggunaan lahan karena penanaman dengan vertikultur dapat menggunakan lahan yang sempit untuk budidaya berbagai macam tanaman.
2. Menghemat biaya perawatan tanaman dengan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida.
3. Lebih mudah dirawat karena tanaman pengganggu seperti rumput dan gulma lebih sedikit kemungkinan untuk tumbuh
4. Sistem vertikultur memungkinkan untuk memindah tanaman dengan lebih mudah karena diletakkan pada wadah tertentu.
5. Karena ditanam di pekarangan rumah maka tanaman lebih mudah diawasi.
6. Jika sistem vertikultur menggunakan tambahan atap plastik, maka dapat mencegah kerusakan karena hujan dan mengurangi penguapan tanaman sehingga menghemat air untuk penyiraman.

Sedangkan kekurangan sistem vertikultur menurut Damastuti yaitu:

1. Tanaman budidaya rawan terkena serangan jamur yang dapat merusak tanaman karena kelembaban udara yang tinggi akibat adanya atap plastik.
2. Sistem vertikultur memerlukan investasi awal yang cukup tinggi.
3. Sistem penyiraman harus diperhatikan dan rutin dijalankan.

Hasyim dan Mirajuddin (2013:83-86) juga mengungkapkan bahwa budidaya tanaman dengan sistem vertikultur mempunyai banyak kelebihan. Kelebihan tersebut di antaranya adalah pemeliharaan yang relatif mudah, penghematan penggunaan air dan pupuk, pemanfaatan lahan secara efisien, mudah untuk dipindahkan, serta relatif menghasilkan hasil panen tanaman yang lebih bersih dan sehat. Sistem vertikultur juga memudahkan petani untuk mengontrol pertumbuhan rumput dan gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Sedangkan tanaman yang biasanya diprioritaskan untuk dibudidayakan dengan sistem ini seperti budidaya tanaman obat yang bermanfaat untuk pertolongan pertama bagi kesehatan keluarga.

Pembuatan Vertikultur

Banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam adopsi sistem vertikultur pada rumah tangga petani pedesaan. Peran pemberdaya menjadi penting dalam membantu petani menganalisis bangun vertikultur apa yang cocok untuk diupayakan. Bahan-bahan yang digunakan sebaiknya juga yang mudah ditemukan di sekitar lingkungan petani dan tidak berbiaya mahal. Sehingga upaya pengenalan vertikultur sebagai upaya pemberdayaan

masyarakat petani pedesaan ini mudah ditiru dan nantinya dapat diusahakan secara mandiri oleh petani sekitar.

Sastro (*dalam* Kusmiati dan Solikhah, 2015:96) mengungkapkan bahwa dalam mempersiapkan vertikultur, setidaknya harus memperhatikan tiga aspek yaitu, pertama pembuatan rak vertikultur. Bangunan ini dapat menggunakan bangunan khusus dengan modifikasi dari sistem *greenhouse* ataupun dengan lebih sederhana yakni tanpa menggunakan bangunan khusus dengan menggantung pot atau menempelkan pada dinding. Bentuk bangunan rak dapat menyesuaikan dengan lokasi, kebutuhan, dan bahan yang tersedia. Dapat menggunakan bahan yang ditemukan di lingkungan sekitar seperti kayu, paralon, bambu, kantong plastik, pot, dan gerabah. Kedua yang harus diperhatikan adalah penyiapan dan penggunaan pupuk organik. Ketiga adalah pada penanaman dan pemeliharaan tanaman budidaya.

Tempat menanam tanaman dalam sistem vertikultur dapat menggunakan pot dengan berbagai macam bahan, seperti pot tanah, semen, ember, plastik, kaleng bekas, pipa paralon, polybag, dan bambu. Sedangkan pot sebagai tempat menanam tanaman pada sistem vertikultur dapat disusun dengan pot tunggal, pot horizontal bertingkat, maupun pot vertikal (Rasapto, 2006:426). Penggunaan bahan dan penyusunan pot ini tentu dapat disesuaikan dengan bahan dan tempat yang tersedia untuk sistem vertikultur.

Penerapan Vertikultur

Penelitian Ariati (2017:84) menunjukkan jenis sayuran bayam, cabe lokal, terung, tomat, dan kangkung dapat ditanam dengan sistem

vertikultur. Akan tetapi setelah melakukan percobaan dan pengamatan dalam penelitiannya, Ariati berkesimpulan bahwa sayuran bayam dan cabe lokal sangat baik apabila dijadikan pilihan untuk dibudidayakan dengan sistem vertikultur. Sedangkan terung dan kangkung mempunyai produktivitas yang sama apabila ditanam dengan sistem vertikultur ataupun ditanam di kebun. Sedangkan tanaman tomat lebih baik ditanam di kebun karena mempunyai produktivitas rendah jika ditanam dengan sistem vertikultur.

Keberhasilan dalam sistem vertikultur juga dipengaruhi oleh media tanam yang digunakan dan juga bahan yang digunakan sebagai wadah vertikultur. Media tanam yang digunakan juga sebaiknya memperhatikan tanaman yang dibudidayakan akan optimal tumbuh pada jenis media tanam yang mana. Beberapa contoh media tanam yang dapat digunakan dalam sistem vertikultur seperti serbuk pakis, sekam bakar, *moss*, *coco peat*, dan pupuk kandang (Noverita dalam Izhar, et. al.: 2016). Aspek ini dibuktikan pada penelitian Izhar, et. al. (2016: 568) yang menunjukkan bahwa media tanam berupa humus, *coco peat*, tanah, dan arang sekam serta bahan vertikultur berupa terpal plastik, karpet, dan karung goni ternyata berpengaruh pada tumbuh kembang tanaman.

Hasil penerapan ini bukan menjadi acuan mutlak penggunaan vertikultur. Hal ini karena adanya perbedaan lingkungan terutama alam yang berdampak pada kesesuaian tanaman yang dibudidayakan dengan sistem vertikultur. Maka yang paling penting adalah kemampuan analisis yang baik berdasarkan pada kebutuhan dan potensi yang ada dalam menerapkan sistem budidaya tanaman secara vertikultur.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Agustina. 2008. Peranan Penyuluhan dan Kelompok Tani Ternak untuk Meningkatkan Adopsi Teknologi dalam Peternakan Sapi Potong. *Prosiding Seminar Nasional Sapi Potong*. Diakses dari <http://peternakan.litbang.pertanian.go.id/fullteks/lokakarya/puntad08-22.pdf> pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 15.23.
- Agusta, Ivanovich. 2014. Transformasi Desa Indonesia 2003-2025. *Prosiding Konferensi Nasional VII dan Kongres XVI Perhepi*. Diakses dari http://www.perhepi.org/wp-content/uploads/2014/11/Transformasi-Desa-Indonesia-2003-2025_Dr.-Ivanovich-Agusta.pdf pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 15.22 WIB.
- Ariati, Putu Eka Pasmidi. 2017. Produksi Beberapa Tanaman Sayuran dengan Sistem Vertikultur di Lahan Pekarangan. *Jurnal Agrimeta* 7 (13): 76-86. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/195577-ID-produksi-beberapa-tanaman-sayuran-dengan.pdf> pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 13.40 WIB.
- Ashari, Saptana, dan T. B. Purwantini. 2012. Potensi dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 30 (1): 13 – 30. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/62886-ID-potensi-dan-prospek-pemanfaatan-lahan-pe.pdf> pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 16.04 WIB.
- Chiari, Anwar. 2015. Strategi Bertahan Hidup Petani Saat Musim Kemarau: Studi Pada Petani Sayur Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. *Jurnal Mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya* 2 (4). Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/111518-ID-strategi-bertahan-hidup-petani-saat-musi.pdf> pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 16.15 WIB.

- Daryanto, Arief. 2003. Disparitas Pembangunan Perkotaan-perdesaan di Indonesia. *Jurnal Agrimedia* 8 (2): 30-39. Diakses dari <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/29129> pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 15.35 WIB.
- Direktorat Permukiman dan Perumahan. Tanpa Tahun. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa untuk Mengatasi Kemiskinan. *Artikel Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia*. Diakses dari https://www.bappenas.go.id/files/5013/5080/2310/ekonomidesa__20090929140041__2080__1.pdf pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 13.38 WIB.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Diakses dari <http://www.keuangandes.com/wp-content/uploads/2015/04/REGULASI-BARU-DESA-BARU-Ide-Misi-dan-Semangat-UU-Desa.pdf> pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.25 WIB.
- Elizabeth, Roosganda. 2007. Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpihakan pada Masyarakat Petani di Pedesaan yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 25 (1): 29 – 42. Diakses dari <http://ejournal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3963> pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 15.51 WIB.
- Faizal. 2015. Diskursus Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ijtimaiyya* 8 (1): 35-51. Diakses dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/861> pada tanggal 16 November 2017 pukul 15.30 WIB.
- Hakim, Lukman. 2011. *Modul Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala. Diakses dari <http://www.rp2u.unsyiah.ac.id/index.php/welcome/prosesDownload/448/2> pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.25 WIB.

- Hariato. 2007. *Peranan Pertanian dalam Ekonomi Perdesaan. Prosiding Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Mencari Alternatif Arah Pengembangan Ekonomi Rakyat*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian . Diakses dari http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/Pros_2007-MU_Hariato.pdf pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 16.05 WIB.
- Hasyim, Moh dan M. Mirajuddin. 2013. Pendampingan Pembuatan Media Vertikultur untuk Penanaman Tumbuhan Obat dalam Pemaksimalan Pekarangan Rumah. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan Seri Pengabdian Masyarakat* 2 (2): 82-87. Diakses dari <http://jurnal.uii.ac.id/ajie/article/download/7855/6805> pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 15.53 WIB.
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi. *Artikel Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia*. Diakses dari https://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/mardi_20091015151035_2384_0.pdf pada tanggal 20 November 2017 pukul 17.36.
- Izhar, Achmad, Sitawati dan S. Heddy. 2016. Pengaruh Media Tanam dan Bahan Vertikultur Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Pakcoy (*Brassica Juncea L.*). *Jurnal Produksi Tanaman* 4 (7): 562-569. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/132376-ID-none.pdf> pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 17.28 WIB.
- Karsidi, Ravik. 2001. Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mediator* 2 (1): 115-125. Diakses dari <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/711> pada tanggal 20 November 2017 pukul 16.38.

- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Diakses dari <http://www.keuandangdesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Buku-6-Perencanaan-Pembangunan-Desa.pdf> pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 15.47 WIB.
- Kolopaking, Lala M, C. Apriande, dan R. Syaharbian. 2016. Mekanisme Perencanaan Desa Membangun dan Membangun Desa. *Working Paper* Pusat Studi Pembangunan Pertanian Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor 1 (1): 1-27. Diakses dari <http://psp3.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2016/05/WPMekanisme-Perencanaan-Desa-Membangun-dan-Membangun-Desa.pdf> pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.26 WIB.
- Kusmiati, Ati dan U. Solikhah. 2015. Peningkatan Pendapatan Keluarga Melalui Pemanfaatan Pekarangan Rumah dengan Menggunakan Teknik Vertikultur. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* 4 (2): 94-101. Diakses dari <http://journal.uii.ac.id/index.php/ajie/article/view/3662> pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 13.41 WIB.
- Lukman, Liferdi. 2011. Teknologi Budidaya Tanaman Sayuran Secara Vertikultur. *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 33 (4). Diakses dari <http://www.litbang.pertanian.go.id/berita/one/918/file/verikultur.pdf> pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 17.25 WIB.
- Manyamsari, Ira dan Mujiburrahmad. 2014. Karakteristik Petani dan Hubungannya dengan Kompetensi Petani Lahan Sempit (Kasus: di Desa Sinar Sari Kecamatan Dramaga Kab. Bogor Jawa Barat). *Jurnal Agrisepe* 15 (2): 58-74. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/13184-ID-karakteristik-petani-dan-hubungannya-dengan-kompetensi-petani-lahan-sempit-kasus.pdf> pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 15.33 WIB.

- Munandar, Aris. 2008. Peran Negara dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Poelitik: Kajian Politik, dan Masalah Pembangunan* 4 (1): 151-162. Diakses dari http://sps.unas.ac.id:8080/detail_publicasi.do?id=369 pada tanggal 20 November 2017 pukul 16.39.
- Noor, Munawar. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Civis* 1 (2): 87-99. Diakses dari <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/download/591/541> pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 15.23.
- Nugroho, Setyo. 2013. Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kelurahan. *Jurnal Cita Hukum* 1 (2): 247-262. Diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2633> pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.23 WIB.
- Primahendra, Riza. 2009. *Marginalisasi Perdesaan*. Brief Note Amerta Social Consulting & Resourcing. Diakses dari http://www.amerta.id/wp-content/uploads/2014/02/Brief_4.pdf pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 15.41 WIB.
- Rasapto, Pujo. 2006. Budidaya Sayuran Dengan Vertikultur. *Artikel Ilmiah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia*. Diakses dari http://balitnak.litbang.pertanian.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=70:3&download=1282:3&start=80&Itemid pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 15.43 WIB.
- Rejeki, MC Ninik Sri. 2007. Perbedaan Budaya dan Adaptasi Antarbudaya dalam Relasi Kemitraan Inti Plasma. *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4 (2): 167-177. Diakses dari <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/224> pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 16.15 WIB.
- Sa'adah, Nurul. 2015. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal" dalam Widiastuti, Siti Kurnia, N. Sa'adah, M. Amin, dan M. D. A.

- Sofia. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjaf, Sofyan. 2010. Batasan Definisi Petani (Peasant). *Artikel Ilmiah*. Diakses dari [http://mahmudisiwi.staff.ipb.ac.id/wp-content/plugins/as-pdf/Sofyan%20Sjaf%20Online-Batasan%20Definisi%20Petani%20\(Peasant\).pdf](http://mahmudisiwi.staff.ipb.ac.id/wp-content/plugins/as-pdf/Sofyan%20Sjaf%20Online-Batasan%20Definisi%20Petani%20(Peasant).pdf) pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 16.11 WIB.
- Soetarto, Endriatmo dan M. Sihalo. 2014. Desa dan Kebudayaan Petani. *Artikel Ilmiah*. Diakses dari <http://repository.ut.ac.id/4389/1/LUHT4208-M1.pdf> pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.25 WIB.
- Surahman, Fajar. 2014. Model Penguatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Memperkuat Kemandirian Desa. *Artikel Ilmiah*. Diakses dari <http://fia.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/1.-Fajar-Surahman.pdf> pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 15.45 WIB.
- Warsana. 2008. Strategi Melakukan Penyuluhan Pertanian untuk Petani Kecil. *Tabloid Sinar Tani*. Diakses dari <http://www.litbang.pertanian.go.id/artikel/one/202/pdf/Strategi%20Melakukan%20Penyuluhan%20Pertanian%20untuk%20Petani%20%26quot;kecil%26quot;.pdf> pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 16.13 WIB.
- Widiastuti, Siti Kurnia. 2015. "Pemberdayaan Masyarakat Marginal Berbasis Penelitian Komunitas" dalam Widiastuti, Siti Kurnia, N. Sa'adah, M. Amin, dan M. D. A. Sofia. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Pemberdayaan Pemb Desa

by Bhimo Samudro

FILE	BUKU_PEMBERDAYAAN_DAN_PEMBANGUNAN_DESA.PDF (522.09K)	WORD COUNT	13269
TIME SUBMITTED	04-SEP-2018 04:20PM (UTC+0700)	CHARACTER COUNT	91609
SUBMISSION ID	996635316		

Pemberdayaan dan Pembangunan Desa

Yogi Pasca Pratama
Bhimo Rizky Samudro
Sutomo

CV. Draft Media
www.terbitkanbukumu.com

Pemberdayaan dan Pembangunan Desa

Penulis:

Yogi Pasca Pratama

Bhimo Rizky Samudro

Sutomo



Penerbit CV. Draft Media

www.terbitkanbukumu.com

Email: info@terbitkanbukumu.com

081365928370

Cetakan Pertama 2018

Editor : Mohd. Yunus dan Andri Hendrizal

Desain Cover : Mohd. Yunus

Layout : Mohd. Yunus

Pemberdayaan dan Pembangunan Desa:

Yogi Pasca Pratama

Bhimo Rizky Samudro

Sutomo

iii + 78 hlm; 17,6 x 25 cm

ISBN

15

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Pemberdayaan dan pembangunan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Epistemologi pemberdayaan seringkali dijadikan isu pro kerakyatan, faktanya merupakan usaha sistemik untuk merubah sistem dan struktur sosial masyarakat secara bertahap.

Buku **Pemberdayaan dan Pembangunan Desa** ini ditulis sebagai referensi mahasiswa Ekonomi Pembangunan yang mempelajari Ekonomi Pemberdayaan, Ekonomi Pertanian, dan Ekonomi Kerakyatan. Buku ini disusun sedemikian rupa dengan harapan dapat membantu mahasiswa dalam memahami seluk beluk kegiatan pemberdayaan petani. Para penggiat pemberdayaan juga bisa menggunakan buku ini sebagai penguat argumentasi dalam interaksinya dengan para mitra berdaya.

Buku **Pemberdayaan dan Pembangunan Desa** ini disusun berdasarkan pengalaman, referensi terkait pemberdayaan masyarakat, materi ajar kuliah ekonomi pemberdayaan dan ekonomi pertanian serta hasil penelitian yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Dekan FEB UNS dan Kaprodi EP FEB UNS atas saran yang membangun, rekan-rekan staf Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB UNS, kolega periset KIMI Institute yang telah banyak membantu selama penyusunan buku ini serta penerbit yang bersedia menerbitkan buku ini.

Semoga buku **Pemberdayaan dan Pembangunan Desa** ini bermanfaat bagi para pembaca serta memperdikan wawasan mahasiswa dan khalayak umum tentang pemberdayaan petani. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis guna kesempurnaan buku ini

Sukoharjo, 2018

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab 1 Pendahuluan: Pengertian dan Klasifikasi Desa	1
Pendefinisian Desa	1
Tipologi Desa	4
Bab 2 Sistem Pertanian Pedesaan	9
Pengertian, Unsur, dan Jenis Sistem Pertanian	9
Pola Permukiman Masyarakat Petani	12
Bab 3 Masyarakat Petani Pedesaan	15
Peasant	16
Perbedaan Peasant dan Farmer	19
Bab 4 Kendala Pembangunan Wilayah Pedesaan	21
Bab 5 Perencanaan Pembangunan Pedesaan	27
Kebijakan Pembangunan.....	27
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	30
Bab 6 Strategi Pembangunan Pedesaan	33
Program Pembangunan Pedesaan.....	33
Prinsip Pembangunan Desa	38
Bab 7 Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Pedesaan	41
Tujuan Pemberdayaan	44
Pendekatan Pemberdayaan	47
Tahapan Pemberdayaan	49
Peran Fasilitator Pemberdayaan.....	50
Pemberdayaan Masyarakat Petani Pedesaan	52
Peran Stakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	54

Bab 8 **Introduksi Teknologi dan Inovasi dalam Kerangka**

Pemberdayaan Masyarakat Petani Pedesaan	57
Pemanfaatan Lahan pekarangan	60
Inovasi dan Teknologi Vertikultur	62
Tanaman Vertikultur	64
Kelebihan dan Kekurangan Vertikultur.....	68
Pembuatan Vertikultur	69
Penerapan Vertikultur	70
Daftar Pustaka	73

Bab 1

Pendahuluan: Pengertian dan Klasifikasi Desa

Pendefinisian Desa

Mengingat tentang desa, sebagian besar dari kita akan membayangkan pada wilayah dengan hamparan lahan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama warganya, atau juga pada desa pesisir yang sebagian besar warganya bertumpu pada laut untuk kehidupannya sebagai nelayan. Desa juga mengingatkan pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai, norma, dan kebudayaan yang secara turun temurun dilestarikan dengan masyarakat modern menyebutnya sebagai "tradisional". Karena pada akhirnya justru tradisionalitas inilah yang mampu merawat hubungan baik antar sesama manusia serta dengan lingkungan dengan tetap memelihara kelestariannya.

Menurut Soetarto dan Sihaloho (2014: 14) awal terbentuknya desa dikarenakan menetapnya suatu komunitas manusia pada lokasi tertentu

yang menjadikannya sebagai tempat bermukim serta mencari penghidupan. Desa didirikan oleh para pendiri desa yang istilahnya membuka hutan belukar dan menjadikannya sebagai tempat bermukim dalam dusun-dusun kecil, dan pada tahap selanjutnya mereka inilah yang menjadi pemimpin dusun atau bahkan pemimpin desa.

Salah satu bentuk penghormatan terhadap leluhur sebagai pendiri desa biasanya dirayakan melalui berbagai upacara adat sebagai ucapan rasa syukur. Berbagai upacara adat dalam berbagai budaya masyarakat harus dimaknai secara lebih dewasa, karena hal ini justru menunjukkan betapa masyarakat desa sangat menghargai jasa para leluhurnya dan rasa syukur nya pada Tuhan Yang Maha Esa. Serta sangat memungkinkan bahwa kesadaran dan memori tentang para leluhur dapat menjadi pemersatu warga desa untuk saling bergotong -royong menjaga dan mengembangkan desanya.

Pengertian lain tentang desa diungkapkan oleh Bergel *dalam* Hakim (2011: 10) yang mengartikan desa sebagai setiap pemukiman para petani, khususnya *peasant*, dan mempunyai karakteristik sebagai tempat tinggal yang menetap dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa desa merupakan wilayah yang ditinggali secara menetap oleh beberapa penduduk dengan mengandalkan pencaharian utama sebagai petani. Pengertian petani sendiri dikhususkan pada definisi *peasant* yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Beberapa karakteristik lain dari masyarakat desa yang diungkapkan Roucek dan Warren (*dalam* Hakim, 2011: 10) antara lain, besarnya peranan kelompok primer, pembentukan kelompok utamanya didasari alasan geografis, pola hubungan yang intim, masyarakat cenderung

homogen, mobilitas sosial cenderung rendah, ²⁷ keluarga sebagai unit ekonomi, dan populasi anak dalam proporsi yang lebih besar. Pernyataan ini menunjukkan bahwa memang penduduk desa cenderung homogen dan bukan tidak mungkin mereka mempunyai asal-usul keturunan yang sama, sehingga kekerabatan antar masyarakat desa menjadi sangat dekat dan intim. Menjadi hal yang biasa ketika setiap warga mengenali semua penduduk yang tinggal di desa di mana dia tinggal (hal sangat sulit ditemukan pada masyarakat perkotaan). Homogenitas masyarakat desa juga dapat dilihat dari pekerjaan utama yang berkaitan erat dengan geografis desa setempat, seperti desa nelayan, desa pertanian, desa perkebunan, dan lain sebagainya. Semua anggota keluarga pada umumnya mempunyai peran dalam membantu perekonomian keluarga, seperti keluarga petani maka baik ayah, ibu, maupun anak-anak akan ikut berperan dalam menjalankan usaha tani entah dalam tahap persiapan, perawatan, ataupun saat panen. Hal ini juga yang mendasari anggapan “banyak anak banyak rezeki”, karena dengan semakin banyak anggota keluarga maka semakin banyak yang membantu pengelolaan usaha tani.

Eko (2015: 46-47) mendefinisikan desa dari sudut pandang lain, terutama melihat desa sebagai sebuah organisasi yang dikelola oleh pemerintahan desa. Eko mengartikan desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan, dan paling dekat dengan masyarakat. Masing-masing pengertian tentang desa dengan berbagai sudut pandang dijelaskan sebagai berikut.

1. Desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil dimaksudkan bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang dijalankan pemerintahan desa mempunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota,

provinsi maupun pusat;

2. Desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling bawah dimaksudkan bahwa desa menempati susunan pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi istilah ini tidak mengindikasikan bahwa desa langsung menjadi bawahan kabupaten/kota. Sudut pandang ini melihat desa sebagai organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung menyatu dengan kehidupan masyarakat;
3. Desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling depan dimaksudkan bahwa desa berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Hubungan ini berlangsung baik dalam bidang pelayanan, pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan;
4. Desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dimaksudkan bahwa memang secara administratif dan geografis, pemerintah desa dan warga masyarakat mudah untuk saling menjangkau. Istilah ini juga dapat diartikan bahwa pemerintahan desa menyatu dengan kehidupan sosial budaya sehari-hari masyarakat setempat.

Tipologi Desa

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai banyak sekali desa dengan masing-masing karakteristiknya masing-masing. Satu desa akan berbeda dengan desa lain dalam berbagai hal, seperti budaya, alam, dan penduduknya. Perbedaan karakteristik tersebut pada selanjutnya akan menimbulkan perbedaan potensi serta keterbatasan yang dihadapi

penduduk dan wilayah tempat tinggalnya. Maka dari itu, memahami desa juga sangat diperlukan suatu upaya untuk memilah desa berdasarkan ciri khas, potensi, keterbatasan yang dihadapi, serta hal lain yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pembangunan pedesaan.

Tipologi desa dapat diartikan sebagai karakteristik desa yang dilihat dari potensi sumber daya alam desa dan interaksi kegiatan sosial ekonomi masyarakat desa. Tipologi desa mempertemukan aspek sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat, pola nafkah, dan aspek kewilayahan. Serta dapat juga dilihat dari bagaimana letak geografis desa dan bagaimana peruntukan lahan yang ada di desa (Agusta, 2014: 6).

Berdasarkan telaah tipologi desa, maka banyak dicetuskan berbagai klasifikasi desa yang didasarkan pada berbagai aspek yang menonjol dari desa tersebut. Setiap ahli yang membedakan klasifikasi desa juga memiliki pertimbangan atas pengamatan masing-masing atas karakteristik desa yang ditemukannya.

Terdapat berbagai macam klasifikasi tipologi desa dari berbagai sumber yang mengelompokkan desa dengan pertimbangan karakteristik tertentu. Seperti Mubiyarto yang membagi desa tertinggal di Jawa Tengah (berdasarkan kegiatan mayoritas masyarakat desa dan basis hasil pertanian yang dibudidayakan) menjadi sembilan tipologi, yaitu **desa persawahan**, **desa perkebunan**, **desa lahan kering**, **desa hutan**, **desa peternakan**, **desa nelayan**, **desa industri kecil**, **desa buruh industri**, serta **desa jasa dan perdagangan**. Kemudian Soedarajad yang membagi desa menjadi empat tipologi, yaitu desa pantai, desa persawahan, desa perkebunan, dan desa perladangan. Kemudian pembagian desa dengan melihat kegiatan ekonominya berdasarkan kriteria Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan

Desa (KTP2D), desa dapat diklasifikasikan sebagai desa pertanian tanaman pangan, desa industri, desa perikanan, desa perkebunan, desa pariwisata, dan desa peternakan (Mubiyarto; Soedrajad; dalam Direktorat Permukiman dan Perumahan, Tanpa Tahun: 3-4).

Penggolongan desa menurut Saparin (dalam Hakim, 2011: 16) membagi desa ke dalam berbagai kategori, antar lain:

1. Desa tambangan, desa nelayan, dan desa pelabuhan. Desa tambangan dimaksudkan sebagai desa yang lokasinya digunakan sebagai tempat lalu lintas penyeberangan orang dan barang di mana terdapat sungai besar. Desa nelayan dimaksudkan pada desa yang mata pencaharian utamanya adalah usaha perikanan laut. Desa pelabuhan dimaksudkan pada kategori desa yang kegiatan utama di lokasinya sebagai tempat perantara hubungan dengan mancanegara, antar pulau, pertahanan/strategi perang dan sebagainya;
2. Desa perdikan. Desa ini dimaksudkan pada kategori desa dengan kegiatan memelihara sebuah makam raja-raja atau karena jasa-jasanya terhadap raja, sehingga desa ini dibebaskan dari pungutan pajak;
3. Desa penghasil usaha pertanian, kegiatan perdagangan, industri/kerajinan, pertambangan dan sebagainya;
4. Desa perintis. Desa ini dimaksudkan pada desa yang relatif awal dibentuk seperti desa yang dibentuk karena program transmigrasi;
5. Desa pariwisata. Desa ini dimaksudkan pada desa yang mempunyai objek pariwisata berupa peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, keindahan alam dan sebagainya.

Hasil analisis Agusta (2014: 7-8) tentang transformasi desa di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2011, desa-desa dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipologi, antara lain: perladangan, persawahan, perhutanan, peternakan, pesisir, perkebunan, pertambangan, serta perindustrian dan jasa. Lebih lanjut, Agusta memaparkan bahwa desa bertipologi persawahan masih mendominasi proporsi tipologi desa di Indonesia. Proporsi masing-masing tipologi desa tersebut selengkapnya sebagai berikut:

1. Desa persawahan sebanyak 31.791 desa atau 40%.
2. Desa perkebunan sebanyak 13.861 desa atau 18%.
3. Desa pesisir sebanyak 11.884 desa atau 15%.
4. Desa perladangan sebanyak 10.157 desa atau 13%.
5. Desa perindustrian dan jasa sebanyak 7.665 desa atau 10%.
6. Desa perhutanan sebanyak 2.673 desa atau 3%.
7. Desa pertambangan sebanyak 350 desa.
8. Desa peternakan sebanyak 228 desa.

Meskipun jumlah desa persawahan dan perladangan yang notabene sebagai penghasil pangan utama masih dominan pada tahun 2011, ternyata jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis seperti yang ditunjukkan Agusta. Seperti contohnya desa persawahan yang pada tahun 2003 mendominasi proporsi tipologi desa sebesar 70%, tetapi pada tahun 2011 menurun menjadi 40%.

Bab 2

Sistem Pertanian Pedesaan

Pengertian, Unsur, dan Jenis Sistem Pertanian

Hakim (2011: 28) yang mengutip Smith dan Zopf menerangkan bahwa sistem pertanian merupakan seperangkat gagasan, keterampilan teknik, budaya, praktik, prasangka, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam hubungannya dengan pengelolaan tanah pertanian. Berdasarkan pengertian ini, sistem pertanian sangat erat kaitannya dengan bagaimana manusia secara individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan pengelolaan tanah sebagai mata pencaharian. Setiap masyarakat tentu memiliki karakteristik yang berbeda yang didasari perbedaan budaya dan lingkungan tempat tinggal masing-masing termasuk dalam sistem pertanian. Sehingga pembangunan sektor pertanian sangat perlu mempertimbangkan bagaimana gagasan, kebiasaan, dan praktik masyarakat dalam mengolah lahan pertanian masing-masing.

Unsur-unsur pokok dalam pertanian menurut Harianto (2007: 2) dapat dibagi dalam empat unsur utama, yaitu petani dan keluarganya (rumah tangga petani), sumber daya alam, teknologi, dan lingkungan sosial-budaya. Harianto berpendapat bahwa unsur rumah tangga petani harus menjadi poros utama yang perlu diperhatikan dalam upaya pembangunan pedesaan. Pengembangan rumah tangga petani diharapkan bahwa kualitas petani menjadi meningkat dalam menangkap peluang dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Aspek manusia, dalam hal ini petani dan keluarganya mempunyai peran utama dalam pengembangan sektor pertanian. Peningkatan kualitas petani yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan rumah tangga petani dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan memanfaatkan potensi alam yang dibantu dengan penguasaan teknologi yang tepat guna. Pembangunan sektor pertanian dalam rangka mengembangkan pedesaan juga perlu mempertimbangkan aspek sosial budaya dalam menjalankan sistem pertanian. Selain diharapkan mampu mengembangkan masyarakat, melalui sinkronisasi semua unsur sistem pertanian, diharapkan pengembangan sektor pertanian juga berdasarkan pada komitmen untuk melestarikan lingkungan hidup masyarakat sekitar, baik lingkungan fisik maupun budaya masyarakat.

Pertanian sebagai kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat tentu memiliki berbagai peran yang tidak dapat dikesampingkan dari kehidupan masyarakat. Harianto (2007: 1) berpendapat bahwa sektor pertanian mempunyai beberapa peranan yang relatif penting dan dapat dikerucutkan menjadi empat peran. Pertama, pertanian dapat menyediakan hasil panen yang dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat, memenuhi kebutuhan bahan baku

sektor industri, dan menunjang ketahanan pangan. Kedua, sektor pertanian dapat menjadi pasar yang potensial bagi sektor industri, serta hasil perdagangan sektor pertanian dapat menghasilkan devisa. Ketiga, sektor pertanian dapat menjadi sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang dapat bermanfaat bagi sektor lain. Keempat, sektor pertanian dapat menyumbang peranan dalam pembangunan desa dan pelestarian lingkungan hidup.

Whittlesey (*dalam* Hakim, 2011: 28) mengategorikan perkembangan sistem pertanian menjadi sembilan jenis berdasarkan pengamatannya. Kesembilan sistem pertanian tersebut antara lain:

1. Pertanian di ladang (*shifting cultivation*).
2. Pertanian menetap tanpa sistem irigasi (*rudimentary sedentary cultivation*).
3. Pertanian menetap dengan sistem irigasi sederhana dan didominasi tanaman padi (*intensive subsistence tillage, rice dominant*).
4. Pertanian menetap dengan sistem irigasi sederhana dan tanpa budidaya tanaman padi (*intensive subsistence tillage, without rice*).
5. Pertanian sekitar Lautan Tengah (*Mediterranean agriculture*).
6. Pertanian buah-buahan (*specialized horticulture*).
7. Pertanian komersial dengan mekanisasi berdasarkan tanaman gandum (*commercial grain farming*).
8. Pertanian komersial dengan mekanisasi (*commercial livestock and crop farming*).
9. Pertanian perkebunan dengan mekanisasi (*commercial plantation crop tillage*).

Sedangkan Smith dan Zopf (*dalam* Hakim, 2011: 28) mengategorikan sistem pertanian menjadi enam jenis, antara lain:

1. Pertanian tepian sungai (*riverbank plantings*).
2. Pertanian sistem bakar (*fire agriculture*).
3. Sistem pertanian cangkul (*hoe culture*).
4. Sistem pertanian dengan teknik bajak sederhana (*rudimentary plow culture*).
5. Sistem pertanian dengan teknik bajak yang maju (*advanced plow culture*).
6. Pertanian mekanik (*mechanized farming*).

Pola Permukiman Masyarakat Petani

Sistem pertanian yang dijalankan masyarakat juga berpengaruh erat terhadap bagaimana cara hidup masyarakat tersebut, terutama untuk masyarakat yang memang penghidupan utamanya menggantungkan pada sektor pertanian. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana masyarakat menata pola pemukimannya terkait dengan lahan pertanian yang diolah. Masing-masing penataan permukiman penduduk dengan lahan pertanian dapat dikelompokkan menjadi beberapa pola yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat.

Pola permukiman di masyarakat petani pedesaan secara umum dikelompokkan oleh Landis (*dalam* Hakim, 2011: 24) menjadi empat kelompok, antara lain:

1. 6 *The Farm Village Type* (FVT)
Merupakan pola pemukiman di mana penduduk atau petani tinggal dan berkelompok pada suatu tempat, serta lokasi tempat tinggal ini berdekatan dengan lahan pertanian yang berada diluar lokasi pemukiman.
2. *The Nebulous Farm Type* (NFT)
Merupakan pola pemukiman di mana penduduk atau petani tinggal secara bersama-sama pada suatu tempat tertentu dengan tambahan beberapa penduduk lain yang tinggal di luar pemukiman utama tersebut. Sedangkan lahan pertanian berada di sekitar lokasi pemukiman penduduk.
3. 6 *The Arranged Isolated Farm Type* (AIFT)
Merupakan pola pemukiman dimana penduduk atau petani mempunyai tempat tinggal di sekitar jalan dan masing-masing berada di lahan pertanian mereka. Selain itu, penduduk juga memiliki suatu *trade center* yang berada di antara mereka.
4. 76 *The Pure Isolated Farm Type* (PIFT)
Merupakan pola pemukiman di mana penduduk atau petani menempati tempat tinggal yang berada dalam lahan pertanian mereka masing-masing. Lokasi tempat tinggal ini biasanya terpisah dan berjauhan antar penduduk atau petani dengan suatu *trade center*.

Bab 3

Masyarakat Petani Pedesaan

Sistem pertanian menempatkan petani sebagai aktor utama. Pengembangan kualitas sistem pertanian oleh karena itu sangat diperlukan peningkatan kualitas petani. Maka dari itu, pemahaman terhadap petani perlu mendapat porsi utama dalam upaya mengembangkan sektor pertanian.

Petani secara garis besar adalah seseorang yang mengolah tanah sebagai lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi sebenarnya, petani sendiri dapat diartikan menjadi dua definisi yang berbeda, yaitu *peasant* dan *farmer*. Keduanya mempunyai karakteristik berbeda, pendekatan berbeda dalam menjalankan usaha tani, sehingga akan berdampak pada strategi berbeda dalam upaya mengembangkan sektor pertanian.

Peasant

Peasant merupakan masyarakat yang hidup dengan bermata pencaharian dengan mengolah tanah di komunitas pedesaan, menggunakan teknologi pertanian yang sederhana yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara subsisten (Rejeki, 2007: 150). Pengertian *peasant* dikaitkan dengan tempat tinggal yang menetap pada wilayah pedesaan serta penguasaan teknologi dan pengetahuan pertanian yang masih cenderung tradisional. Keterbatasan ini karena masyarakat memegang erat nilai dan norma yang telah ada secara turun-temurun sehingga mempunyai kecenderungan menutup pada kebudayaan baru dari luar, termasuk pengembangan teknologi yang tidak sesuai dengan budaya yang dianut. Selain itu dapat juga melihat bahwa rendahnya pengembangan teknologi pertanian karena memang masyarakat pedesaan mempunyai keterbatasan akses informasi atas perkembangan teknologi. Oleh karena itu jika menghendaki pengembangan masyarakat petani pedesaan dengan pengembangan teknologi, maka hal itu harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sedangkan pola hidup subsisten pada *peasant* merupakan cara hidup mereka yang relatif sederhana, di mana pekerjaan usaha tani mempunyai motif utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Peasant mempunyai suatu ideologi yang terwujud dari berbagai kegiatan yang terkait dengan usaha tani, seperti adanya ritual yang menjadi kebiasaan dan telah lama dilakukan. Kebiasaan ini menjadi kepercayaan yang mengakar pada *peasant*, bahkan akan merasa ada yang kurang jika tidak melakukan kebiasaan atau tindakan ritual tersebut. Ideologi pada *peasant* ini pada akhirnya menjadi landasan bagi pandangan *peasant*

tentang cara hidup yang baik, sehingga menjadi landasan pula dalam memperat ikatan sosial dengan masyarakat sekitar. Adanya ideologi yang mengakar pada peasant juga dapat menjadi solusi munculnya konflik di tengah masyarakat terkait dengan usaha tani (Wolf dalam Sjaf, 2010: 2). Sjaf (2010: 2) juga menambahkan bahwa secara geografis, *peasant* tinggal di pedesaan karena mata pencaharian utamanya adalah dengan mengolah lahan pertanian serta memanfaatkan hasil pertanian tersebut untuk memenuhi kebutuhan secara subsisten.

Beberapa pengertian lain tentang *peasant* oleh para penulis, dikutip sebagai berikut (Hakim, 2011: 20):

1. Wolf mendefinisikan *peasant* sebagai pengelola usaha pertanian yang mengerjakan tanah secara efektif dan dilakukan sebagai jalan penghidupannya atau bukan sebagai bisnis yang bersifat mencari keuntungan;
2. Firth mengartikan *peasant* berkaitan dengan referensi keekonomian, dimana sistem usaha tani yang dijalankan berskala kecil, teknologi dan peralatan yang sederhana, serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau subsisten;
3. Belshaw mengartikan *peasant* sebagai masyarakat yang mempunyai pandangan hidup dengan berorientasi pada tradisionalitas, hidup terpisah dari pusat kota meskipun tetap menjalin hubungan dengan mengkombinasikan kegiatan pasar, serta hidup dengan produksi subsisten;
4. Kroeber mengartikan *peasant* sebagai golongan kelas dari suatu populasi yang jumlahnya lebih besar yang biasanya termasuk pula di dalamnya pusat-pusat perkotaan;

5. Field mengartikan *peasant* sebagai orang-orang yang berasal dari peradaban yang tua, dengan karakteristik masyarakat desa yang menguasai dan mengolah tanah mereka untuk kehidupan secara subsisten;
6. Menurut Foster, sebenarnya komunitas *peasant* juga memiliki ikatan yang erat dengan kota-kota besar dan kecil.

Menurut Shanin yang pendapatnya dikutip oleh Sjaf (2010:3), *peasant* mempunyai empat ciri-ciri utama. Keempat ciri tersebut antara lain:

1. Rumah tangga *peasant* merupakan satuan dasar masyarakat desa yang berdimensi ganda;
2. Sumber penghidupan utama *peasant* berasal dari usaha tani dengan cara mengolah lahan pertanian;
3. *Peasant* mempunyai pola kebudayaan yang tradisional dan khas;
4. *Peasant* merupakan orang yang mempunyai posisi lemah dalam komunitas masyarakat.

Pada sisi lain, *peasant* jika dilihat dari segi ekonomi identik dengan kesederhanaan dan keterbatasan, sehingga cenderung mencukupi kebutuhan hidup secara subsisten (Sjaf, 2010: 3). Scott juga berpendapat bahwa *peasant* dalam menjalankan usaha tani mempunyai pandangan untuk mendahulukan selamat (*subsistensi*), menjaga keamanan (*securiry*), dan kesejahteraan (*welfare*). Oleh karena itu, *peasant* memusatkan usaha tani untuk menghindari jatuhnya produksi sebab enggan mengambil resiko dan memang tidak berusaha untuk berorientasi pada pemaksimalan keuntungan dari usahatannya (*dalam Sjaf, 2010: 4*).

Perbedaan Peasant dan Farmer

Fery (dalam Chiari, 2015: 10) menekankan adanya perbedaan antara *peasant* dan *farmer*. *Peasant* merupakan petani dengan tujuan subsisten, yaitu usaha tani dengan mendayagunakan bantuan keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Petani yang tergolong dalam pengertian *peasant* seperti petani kecil, petani yang menyewa lahan (*tenants*), penyakap (*sharecroppers*), dan buruh tani. Sedangkan *farmer* adalah petani yang usahataniya lebih condong ke arah bisnis, sehingga bukan saja untuk keperluan pemenuhan kebutuhan keluarga tetapi lebih mengarah pada mencari margin keuntungan dengan menjual hasil usahataniya. Sjaf (2010: 5) menyimpulkan bahwa perbedaan definisi antara *peasant* dan *farmer* dapat dilihat dari sifat usahataniya. *Peasant* menjalankan usaha tani dengan mendayagunakan tenaga kerja yang berasal dari rumah tangga *peasant* sendiri dan ditujukan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga itu sendiri. Sedangkan *farmer* dalam mengolah lahan biasanya memiliki buruh tani atau petani penggarap yang orientasi utamanya adalah mencari keuntungan dengan menjual hasil pertanian ke pasar.

Pembedaan antara petani pedesaan/petani tradisional/*peasant* dan petani modern/pengusaha pertanian/petani pengusaha/*agricultural entrepreneur/farmer* juga dilakukan oleh Wolf (dalam Soetarto dan Sihaloho, 2014: 19) pada analisisnya. Wolf mengungkapkan bahwa *peasant* merupakan golongan petani yang usaha pertaniannya masih tergantung pada alam dengan penggunaan teknologi serta pengetahuan tradisional yang relatif sederhana. Produksi pertanian yang dihasilkan oleh *peasant* mempunyai tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga

sendiri dan bukan untuk mengejar keuntungan. Sebaliknya *farmer* merupakan golongan petani yang usaha pertaniannya pada umumnya mempunyai tujuan untuk mengejar keuntungan. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka tanaman budidaya disesuaikan dengan komoditas pertanian yang laku di pasar. Sistem pertanian juga tergolong maju dengan penggunaan teknologi dan sistem pengelolaan usaha modern demi mencapai tujuan mengejar keuntungan tersebut.

Warsana (2008: 2-10) mengartikan *farmer* sebagai petani pengusaha, dalam arti bahwa usaha tani yang dijalankan mirip sebagai bangun perusahaan, di mana orientasi pasar menjadi landasan utama dalam produksi pertaniannya. Oleh karenanya, sebagian besar *farmer* biasanya memiliki cakupan lahan yang cukup luas untuk meningkatkan skala produksinya. Sedangkan *peasant* menjalankan usaha tani secara tradisional dengan lahan yang cenderung sempit karena sebagian besar ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga.

Bab 4

Kendala Pembangunan Wilayah Pedesaan

Pembangunan wilayah pedesaan sangat erat kaitannya dengan upaya pengembangan sektor pertanian, termasuk petani di dalamnya. Petani, terutama dalam pengertian *peasant* mempunyai tempat tinggal di wilayah pedesaan seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Desa sendiri menurut sebagian besar literatur juga menjadi tempat tinggal petani yang mempunyai mata pencaharian yang menyesuaikan dengan tipologi desa yang ditempati. Oleh karena itu, pengembangan sektor pertanian, maupun peningkatan taraf kesejahteraan petani terutama *peasant* secara holistik harus dipandang sebagai upaya pembangunan desa. Melalui upaya pembangunan desa ini, diharapkan dapat disusun suatu rencana strategis dalam upaya mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat serta mengembangkan potensi yang dimiliki, terutama sektor pertanian yang dominan ada di wilayah pedesaan.

Sebelum lebih lanjut mendiskusikan kebijakan dan strategi pembangunan desa, sebaiknya perlu diketahui dahulu apa kendala dan permasalahan yang ada terkait dengan pembangunan desa. Pengumpulan informasi dan analisis ini sangat penting diketahui yang menjadi pertimbangan utama bagaimana strategi pembangunan desa yang akan dijalankan. Melalui pengumpulan informasi secara holistik, serta analisis yang cermat, maka pembangunan desa dapat diarahkan pada aspek-aspek yang memang menjadi pengganjal kehidupan masyarakat desa.

Kendala yang dihadapi masyarakat pedesaan dalam melakukan pembangunan menurut Surahman (2014:3) antara lain:

1. Kemampuan masyarakat yang masih rendah dalam **mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada** di lingkungan desa;
2. Kondisi sarana dan prasarana desa yang masih terbatas dan cenderung terisolir;
3. Belum terbangun kelembagaan yang kuat dalam menampung peluang yang ada dalam kaitannya dengan pengembangan sektor usaha jasa dan perdagangan;
4. Keterbatasan akses masyarakat pada aspek permodalan, pengembangan teknologi produksi, pengembangan manajemen usaha, kondisi pasar, rendahnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, serta keberlanjutan usaha produksi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui kendala pembangunan desa mencakup aspek-aspek penting yang ada di dalam masyarakat. Kualitas manusia, lingkungan fisik dalam penyediaan fasilitas,

aspek kelembagaan, dan aksesibilitas masyarakat yang rendah dipandang masih menjadi ganjalan dalam pembangunan desa.

Dimensi pembangunan yang kurang berpihak pada masyarakat selain dilihat dari beberapa kendala yang telah disebutkan di atas, juga dapat dilihat dari bagaimana mengkonstruksikan konsep pembangunan dari ide yang mendasarinya. Faizal (2015: 36) berpendapat bahwa diskursus tentang pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek dari perubahan sosial atas implementasi pembangunan yang kurang berpihak pada kepentingan dan partisipasi masyarakat secara merata. Hal ini diperkuat dengan tiga alasan utama yang diungkapkan Faizal, antara lain:

1. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pendekatan *top-down* yang berlangsung utamanya selama masa orde baru, sehingga berakibat pada masyarakat yang terbelenggu dan tidak bisa berpartisipasi aktif;
2. Orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan *top-down* hanya meningkatkan kesejahteraan segelintir orang utamanya pada pihak yang berkuasa atas modal dan kebijakan;
3. Pembangunan ekonomi industri besar dan pengembangan teknologi sebagai lanjutan dari orientasi pertumbuhan ekonomi menyebabkan tenaga kerja lokal kehilangan lapangan pekerjaan dan hanya mampu menjadi objek, buruh kerja, dan atau penonton.

Masalah pembangunan, termasuk pembangunan desa, bukan hanya masalah bagaimana pembangunan itu diimplementasikan, tetapi juga bagaimana konstruksi pembangunan yang dibangun dan dilihat dari arah orientasi pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilakukan

dengan pendekatan *top-down* seperti yang diungkapkan Faizal, mempunyai berbagai kelemahan seperti rendahnya partisipasi masyarakat serta polarisasi penyebaran kesejahteraan yang terfokus pada pihak yang berkuasa atas modal dan kebijakan. Selain itu, pendekatan ini tentu juga tidak bisa menampung ide, kreativitas, budaya, potensi, serta keluhan kesah masyarakat yang tentu bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Bagaimana mungkin dapat mengoptimalkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi dan lokalitas daerah jika belum mengakomodasi fakta heterogenitas yang ada di masyarakat.

Orientasi pembangunan yang tertuju dan terpusat pada pertumbuhan ekonomi juga menimbulkan tanda tanya besar tentang bagaimana pemerataan kesejahteraan. Efek menetes ke bawah yang dijadikan dalih atas pengembangan industri besar dan penembangan teknologi sudah lama menjadi pertanyaan para ekonom kritis apakah benar konsep tersebut dapat diwujudkan. Pada akhirnya yang menjadi kenyataan di masyarakat adalah terenggutnya sumber daya masyarakat lemah, kesejahteraan yang kurang merata, serta terbukanya jurang kesenjangan di masyarakat.

Kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan desa, salah satunya dapat dilihat dari pengabaian sektor pertanian. Pengabaian sektor pertanian ini disebabkan oleh bermacam faktor, antara lain (Little; Lewis; dalam Daryanto, 2003: 2):

1. Sebagian besar para pengambil keputusan dan para pakar di bidang ekonomi pembangunan berasal dari kaum elit kota dan mereka tidak begitu memahami perbedaan sifat dan karakteristik sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa;

2. Orientasi pembangunan yang terfokus pada pentingnya akumulasi kapital yang diterjemahkan dengan pembangunan industri;
3. Pandangan bahwa sektor pertanian merupakan penyedia surplus tenaga kerja sehingga dapat diserap sektor industri tanpa membutuhkan biaya transfer;
4. Pandangan bahwa masyarakat petani pedesaan sangat terikat dengan nilai-nilai tradisi sehingga tidak responsif pada insentif dari luar (pasar).

26 Kesenjangan pembangunan antar daerah disebabkan akibat adanya distorsi perdagangan antar daerah, distorsi pengelolaan sumber daya alam, dan distorsi sistem perkotaan-pedesaan. Kesenjangan pembangunan ini terwujud dan dapat ditelaah pada berbagai aspek. Aspek tersebut contohnya seperti kesenjangan dalam 67 kualitas sumber daya manusia, pendapatan per kapita, ketersediaan sarana dan prasarana, pelayanan publik, dan akses permodalan dari perbankan (Daryanto, 2003:1).

Meskipun biasanya hubungan sektor pertanian dan sektor industri mempunyai hubungan yang dilematis, ternyata pemerintah China justru berhasil melakukan integrasi antar kedua sektor tersebut. Slogan filosofis yang didengungkan adalah *"leave agriculture, but not the country side"* dan *"enter the factory, but not the city"*. Hal ini diartikan bahwa pemerintah mempersilahkan warga desa untuk meninggalkan sektor pertanian namun sebaiknya jangan meninggalkan desa serta memperbolehkan masyarakat untuk memasuki sektor industri manufaktur, tetapi sebaiknya tidak memasuki kota.

Bab 5

Perencanaan Pembangunan Pedesaan

Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan dan pendekatan yang digunakan mempunyai peran penting dalam mengatasi kendala pembangunan yang ada. Pertimbangan partisipasi masyarakat juga harus diperhatikan, dengan pandangan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga menjadi subjek pembangunan. Meskipun pembangunan melibatkan pihak di luar masyarakat dengan mengusung pengetahuan dan teknologi yang dianggap dapat menyelesaikan masalah pembangunan suatu wilayah, tetapi pembaharuan ini seyogianya tetap menyesuaikan dengan bagaimana kondisi sosial budaya dan lingkungan fisik di masyarakat. Sehingga yang diharapkan dari kebijakan pembangunan yang

demikian adalah pembangunan yang bernilai lokalitas daerah, melibatkan partisipasi dan potensi masyarakat, serta dilaksanakan pada sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan pembangunan menurut Surahman (2014: 7) harus dilandasi kebijaksanaan dalam memandang nilai tradisional, lokalitas, dan budaya yang mendarah daging di masyarakat. Pembangunan identik dengan perubahan masyarakat tradisional menuju modern dengan diikuti perubahan nilai dari nilai tradisional yang dirasa sebagai penghambat untuk kemudian digantikan dengan nilai dan budaya modern yang dianggap lebih mendukung pembangunan. Pandangan tersebut seharusnya dapat dikelola dengan lebih bijak, mengingat asas kerakyatan serta nilai-nilai dan kelembagaan yang ada di masyarakat justru dapat dijadikan dasar pijakan dalam membina kelangsungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Surahman menambahkan bahwa bantuan teknis atau fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat dalam upaya pembangunan desa kadang menemui kendala karena implementasi kerangka modernisasi dengan menempatkan masyarakat sebagai kesatuan yang homogen. Sehingga yang terjadi adalah keragaman pola perubahan yang dilaksanakan untuk keperluan seluruh sasaran pembangunan. Padahal dalam kenyataannya di masyarakat cenderung memiliki keragaman nilai dan kelembagaan antara masyarakat satu dan yang lain. Keberagaman nilai dan kelembagaan tersebut seyogianya tidak dipandang mudah sebagai suatu keseragaman.

Haeruman mengungkapkan bahwa penyusunan kebijakan pembangunan pedesaan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam kebijakan (Direktorat Permukiman dan Perumahan, Tanpa Tahun: 1).

Pertama, kebijakan secara tidak langsung yang bertujuan untuk menjamin pembangunan desa seperti penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kedua, kebijakan yang langsung diarahkan pada tujuan meningkatkan kegiatan ekonomi desa. Ketiga, kebijakan khusus yang dicanangkan untuk menjangkau desa dengan upaya khusus seperti penjaminan hukum demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Selanjutnya, Haeruman juga mengatakan bahwa dalam memandang pembangunan desa dapat melihatnya dari dua sudut pandang yang berbeda terkait campur tangan pihak di luar masyarakat desa. Pandangan pertama melihat pembangunan desa merupakan sesuatu yang alamiah berdasarkan pada optimalisasi potensi dan kemampuan masyarakat desa, sehingga yang terjadi adalah minimnya campur tangan pihak luar desa. Pandangan kedua melihat pembangunan desa terjadi karena proses interaksi antara potensi yang dimiliki masyarakat desa dengan dorongan dari pihak luar desa dalam konteks pembangunan desa.

Strategi dalam menjalankan pembangunan desa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan harus melibatkan masyarakat serta mengakomodasi potensi serta kondisi lingkungan masyarakat baik budaya dan lingkungan fisiknya. Interaksi dengan pihak di luar desa dalam kerangka pembangunan masyarakat bukanlah sesuatu yang salah, yang terpenting adalah bagaimana interaksi ini menguntungkan masyarakat secara umum. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menjadi perhatian utama dalam interaksi ini.

Pembangunan pedesaan diharapkan bukan menjadi ajang rutinitas penerapan kebijakan yang belum tentu sesuai dengan kondisi lokal masyarakat. Apalagi pembangunan desa justru menjadi dalih yang

sebenarnya membuka pintu segelintir pihak untuk mengeruk keuntungan lebih. Industrialisasi pedesaan contohnya jangan sampai menjadi wahana marginalisasi masyarakat desa. Kehilangan sumber daya yang telah menjadi sumber penghidupan seperti alih fungsi lahan pertanian serta ditambah perubahan mata pencaharian menjadi buruh, menempatkan masyarakat desa menjadi penonton kemajuan yang dibangun di tanah mereka sendiri.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Merancang konsep pembangunan yang berpihak pada masyarakat desa secara umum serta berkomitmen pada peningkatan kemakmuran masyarakat desa, maka diperlukan partisipasi masyarakat desa sendiri sebagai subjek dan objek pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan *top-bottom* yang kurang mengakomodasi partisipasi masyarakat, potensi serta kendala yang sebenarnya dihadapi, dapat digantikan dengan pendekatan *bottom-up*. Melalui pendekatan *bottom-up*, partisipasi masyarakat menjadi lebih tertampung dan terarahkan. Masyarakat juga dapat dilatih untuk memahami potensi yang dimiliki, mengenali kendala yang dihadapi, serta menentukan prioritas kegiatan yang akan dijalankan dengan mempertimbangkan sumber daya serta keterbatasan yang dimiliki.

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai suatu proses di mana kesempatan untuk ikut andil atau ikut ambil bagian dan mempengaruhi keputusan publik dimiliki oleh setiap individu yang terkait. Sehingga masyarakat ikut menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan secara demokratis (Long *dalam* Kolopaking, *et. al.*, 2016:3). Keikutsertaan

masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan ini pada akhirnya juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat pada program atau kegiatan yang dijalankan dalam skema pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif diharapkan dapat menimbulkan berbagai manfaat seperti yang diungkapkan Kolopaking, *et. al.* (2016:15-16) sebagai berikut.

1. Mengembangkan kemampuan masyarakat agar dapat menggali potensi dan pengetahuan yang dimiliki serta kecakapan dalam memilah informasi;
2. Melatih masyarakat agar memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan;
3. Mengembangkan kemampuan masyarakat agar dapat bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan dan sesuai dengan perencanaan pembangunan;
4. Melatih masyarakat agar mampu menilai dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan;
5. Memberikan kesempatan bagi pihak luar agar dapat berinteraksi dan memahami kondisi masyarakat;
6. Meningkatkan kelancaran komunikasi dan kelembagaan yang terbangun di masyarakat.

Bab 6

Strategi Pembangunan Pedesaan

Strategi pembangunan pedesaan khususnya pada sektor pertanian merupakan aktualisasi dari analisis yang dibangun dengan melihat dari potensi dan kendala yang ada di masyarakat. Strategi pembangunan dirancang melalui perencanaan pembangunan yang mengakomodasi partisipasi masyarakat seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pembangunan pada desa diwujudkan contohnya seperti melalui pelaksanaan berbagai program.

Program Pembangunan Pedesaan

Berbagai program telah dicetuskan pemerintah Indonesia dalam upaya membangun desa sesuai bidang yang dirasa perlu ditangani. Seperti contohnya dalam tujuan mengejar ketertinggalan pembangunan daerah

perkotaan, pemerintah menginisiasikan ⁴³ program Inpres Desa Tertinggal, dan Program Pengembangan Terpadu Antar Desa (PPTAD). Upaya peningkatan sektor pangan dijalankan melalui program KOGM (Komando Gerakan Makmur), Bimas (Bimbingan Massal, Innas (Intensifikasi Massal), Insus (Intensifikasi Khusus), dan Supra Insus. Serta dalam upaya menyokong program pangan, pemerintah menginisiasikan program bantuan permodalan bagi petani dalam bentuk Kredit Usaha Tani (KUT) (Direktorat Permukiman dan Perumahan, Tanpa Tahun: 1).

Kolopaking, *et. al.* (2016: 1) menjelaskan ⁴² bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengatasi masalah kemiskinan yang ada di desa. Pembangunan desa dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat desa, penyediaan sarana dan prasarana desa, pengelolaan sumber daya alam, serta mengoptimalkan potensi desa. Program pembangunan desa yang dilakukan dapat diprioritaskan pada kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjamin kemudahan aksesnya oleh masyarakat desa;
2. Mendasarkan sumber daya lokal dan kemampuan teknis yang ada di masyarakat dan lingkungan desa untuk membangun dan merawat infrastruktur yang bermanfaat;
3. Mengembangkan ekonomi pertanian yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat desa;
4. Mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan teknologi yang menunjang pembangunan desa dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kondisi masyarakat desa;

5. Meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat desa dengan asas gotong royong.

Primahendra (2009: 6) berpendapat bahwa solusi permasalahan di pedesaan harus dimulai dari perubahan mindset serta diikuti dengan program yang komprehensif dengan mempertimbangkan modal dan potensi yang ada sebagai fondasi dasar. Primahendra mengungkapkan kebijakan dan program yang perlu dikembangkan mencakup beberapa hal seperti:

1. Penguatan akses masyarakat desa pada informasi, pasar, pelayanan keuangan, dan lainnya;
2. Perhatian pada kapasitas dan kelembagaan masyarakat desa;
3. Pembangunan infrastruktur desa yang menunjang kegiatan ekonomi pedesaan;
4. Fasilitasi pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat desa;
5. Penataan kelembagaan pada perdagangan dan tata niaga pertanian untuk melindungi hasil tani dari desa dapat didistribusikan secara *fair*;
6. Pengembangan kebijakan yang bertujuan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi pedesaan.

Pengelolaan kegiatan pembangunan desa dapat dilakukan melalui berbagai tindakan sistematis seperti yang dirumuskan Surahman (2014: 8) sebagai berikut.

1. Perumusan visi dan misi bersama tentang makna, urgensi dan prioritas-prioritas pembangunan;

2. Pengkajian potensi dan modal sosial yang dimiliki masyarakat;
3. Melaksanakan dan mengendalikan program;
4. Melakukan evaluasi dan refleksi bersama terhadap pelaksanaan program;
5. Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) program.

Kessa (2015:21-23) mengungkapkan berbagai bidang terkait pelaksanaan pembangunan desa antara lain:

1. Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa.
Contoh dari bidang pembangunan pengadaan infrastruktur desa seperti mengoptimalkan tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan menuju lahan pertanian, pembangkit listrik, dan lain sebagainya.
2. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
Contoh dari bidang pembangunan bidang sarana dan prasarana kesehatan seperti perhatian kepada ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi lingkungan.
3. Pelayanan Kesehatan Desa.
Contohnya seperti mengoptimalkan fungsi pelayanan posyandu yang terdapat di desa untuk menunjang pemberian fasilitas kesehatan terdepan bagi masyarakat desa.
4. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan.

Contohnya seperti pengadaan dan mengoptimalkan pada taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan, serta pengembangan dan pembinaan sanggar seni.

5. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Sarana dan Prasarana Ekonomi.

Contohnya seperti pembangunan dan mengoptimalkan pasar Desa, BUMDesa, pengembangan pembibitan tanaman pangan, fasilitasi tempat penggilingan padi, mengoptimalkan fungsi lumbung Desa, pembukaan lahan pertanian, perbaikan pengelolaan usaha hutan Desa, pengembangan usaha ternak ikan, fasilitasi kolam ikan dan pembenihan ikan, perhatian pada kapal penangkap ikan, fasilitasi gudang pendingin, mengoptimalkan fungsi tempat pelelangan ikan, tambak garam, pengembangan mesin pakan ternak, dan lain sebagainya.

6. Pelestarian Lingkungan Hidup.

Contoh pembangunan dalam bidang ini dapat dilakukan dengan cara penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai, dan perlindungan terumbu karang.

7. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Contoh pelaksanaan pembangunan pada bidang ini dapat dilakukan dengan pembinaan lembaga kemasyarakatan yang ada, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, serta pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Contoh pelaksanaan pembangunan dalam bidang ini seperti pengadaan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pengadaan pelatihan teknologi tepat guna; peningkatan kapasitas aparatur desa; peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan yang menjangkau semua kelompok dan lapisan masyarakat yang ada.

Prinsip Pembangunan Desa

Berbagai prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa pada terminologi desa membangun adalah sebagai berikut (Eko, 2015: 56):

1. Kemandirian desa dalam perencanaan.
2. Pembangunan didasarkan pada kearifan lokal dalam pengelolaan tata ruang dan sumber daya lokal.
3. Pembangunan dilakukan di desa dan berskala desa.
4. Pelaksanaan pembangunan berdasarkan pada kewenangan desa pada kewenangan asal-usul (mengelola *communal goods*) dan kewenangan nyata (mengelola *public goods*).
5. Pelaksanaan pembangunan merupakan kewenangan pemerintah desa dan masyarakat.
6. Pembangunan desa harus mengikutsertakan tokoh masyarakat lokal maupun pendamping dari pihak luar yang memahami lokalitas desa.
7. Peran pemerintah dalam pembangunan desa melalui pengakuan, dukungan, penguatan dan supervisi.

8. Terkait dengan alokasi dana dari pemerintah sebaiknya dikelola melalui satu pintu yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sedangkan prinsip dalam pembangunan desa pada terminologi membangun desa, antara lain (Eko, 2015: 60):

1. Pembangunan desa mempunyai desa atau lintas desa sehingga mempunyai cakupan yang lebih luas.
2. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota.
3. Pembangunan ini mengandung sektor-sektor (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air minum, pertanian, kehutanan, dan lain-lain).
4. Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi yang perlu dikembangkan dan permasalahan yang sedang dihadapi.
5. Pembangunan desa termasuk penyediaan ruang-ruang mobilitas sosial ekonomi masyarakat desa.
6. Pembangunan desa didasari analisis dan pendekatan spasial yang terintegrasi serta didukung dengan pertimbangan penganggaran yang jelas
7. Membutuhkan pendekatan teknokratik yang canggih
8. Membutuhkan keseimbangan antara *pro poor*, *pro-growth*, dan *pro jobs*.
9. Melibatkan partisipasi desa.
10. Responsif pada masalah lingkungan dan sosial.

Berbagai dampak pengembangan masyarakat desa salah satunya akibat dari kedudukan desa sebagai daerah otonom. Nugroho (2013:256-257) mengungkapkan beberapa dampak tersebut antara lain:

1. Pembangunan desa mempunyai orientasi utama pada *community development*. Pendidikan masyarakat menjadi prioritas utama dalam membuka wawasan dan kesadaran masyarakat desa pada segala potensi komunitas pada pembangunan.
2. Menumbuh-kembangkan komunitas masyarakat dengan cara komunikasi warga yang intensif dan menumbuhkan tradisi berkumpul serta bertukar pikiran antar warga.
3. Pembangunan desa dilakukan melalui pengembangan usaha yang berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
4. Pembangunan desa bertujuan untuk mengembangkan fasilitas yang dapat menampung kegiatan-kegiatan keorganisasian warga maupun pengembangan sosial-budaya masyarakat desa.
5. Memperkuat kelembagaan lokal di masyarakat desa seperti organisasi pemuda, desa wisata, dan lain sebagainya.

Bab 7

Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Pedesaan

Upaya pembangunan desa yang ditujukan untuk mengoptimalkan potensi desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Karena pada dasarnya pembangunan desa seharusnya dari desa dan untuk kemakmuran desa. Masyarakat desa bukanlah sebagai objek pembangunan, melainkan juga berpartisipasi aktif sebagai subjek pembangunan.

Salah satu langkah yang dapat dijalankan dalam mengoptimalkan pembangunan desa adalah melalui upaya pemberdayaan pada masyarakat desa, khususnya petani. Melalui proses pemberdayaan, masyarakat dilatih untuk mengembangkan diri dan lingkungannya. Kalaupun ada bantuan pihak dari luar dalam proses pemberdayaan, maka

pihak tersebut merupakan fasilitator yang membantu mengantarkan masyarakat yang kurang berdaya menjadi lebih berdaya.

Upaya pemberdayaan melatih kesadaran masyarakat untuk lebih peka dalam membaca kendala yang dihadapi, potensi sumber daya yang dimiliki, keterbatasan yang dimiliki, serta memandang tujuan ke depan untuk hidup lebih baik. Kesadaran ini menjadi penting sehingga pada akhirnya masyarakat yang diberdayakan mampu menjalankan rangkaian pemberdayaan secara mandiri, bertanggungjawab serta berkelanjutan karena menyangkut hajat hidup masyarakat itu sendiri.

Gonsalves (*dalam* Widiastuti, 2015: 14) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah pilihan, kebebasan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, martabat, penghargaan, kerja sama, dan menumbuhkan rasa solidaritas dalam komunitas. Sedangkan Freire *dalam* Zubaedi (2013: 75-76) mengungkapkan konsep konsientasi sebagai suatu proses pemahaman dan penumbuhan kesadaran atas situasi yang sedang terjadi, baik dalam kaitannya dengan relasi-relasi politik, ekonomi dan sosial. Seseorang sudah berada dalam tahap konsientisasi jika ia sanggup menganalisis masalah mereka, mengidentifikasi sebab-sebabnya, menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru secara mandiri. Dalam kerangka ini, pemberdayaan identik dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya. Kesadaran kritis dalam diri seseorang dapat dicapai dengan cara melihat ke dalam diri sendiri serta menggunakan apa yang didengar dan dilihat, dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya.

Kemampuan masyarakat untuk menganalisis masalah yang dihadapi dan menentukan prioritas dengan mempertimbangkan potensi sumber daya

yang dimiliki merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan. Masyarakat dituntun untuk terus belajar dan berkreasi sesuai kondisi sosial dan lingkungannya untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Proses ini perlu sokongan dari berbagai ⁷² stakeholder terkait dengan masing-masing peran yang berbeda, tetapi tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat desa seluruhnya yang mandiri dan berdaya.

Terkait dengan konsep pemberdayaan, Hutomo (2000: 6) merangkum berbagai pandangan Sumodiningrat mengenai konsep pemberdayaan ekonomi dan meringkasnya menjadi enam pokok pikiran utama sebagai berikut.

1. Perekonomian rakyat merupakan ³⁴ perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat yang mendasarkan pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian;
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan dengan langkah perubahan struktural dalam usaha mewujudkan ekonomi rakyat yang kuat, besar, dan berdaya saing dalam mekanisme pasar yang benar;
3. Perubahan struktural dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan perubahan dari ekonomi tradisional ke modern, dari ekonomi lemah ke kuat, dari ekonomi subsisten ke pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Pencapaian perubahan struktural tersebut dilakukan melalui perbaikan alokasi sumber daya, penguatan kelembagaan, peningkatan teknologi, dan pemberdayaan manusia dalam meningkatkan kualitasnya;
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat hendaknya menjamin pada

- terwujudnya kerja sama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang;
5. Kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat seperti, pertama, memperbesar akses rakyat pada aset produksi. Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha rakyat. Ketiga, peningkatan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Keempat, penguatan industri kecil. Kelima, mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru. Keenam, perlunya perhatian pada pemerataan spasial;
 6. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan kualitas manusia, serta peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung.

Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat mempunyai sasaran strategis seperti membangun basis-basis ekonomi yang mendasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya lokal yang ada. Pemberdayaan masyarakat juga harus mendorong terciptanya proses ekonomi yang lebih demokratis dan berkeadilan serta terwujudnya kemandirian dan keberlanjutan (Karsidi, 2001: 122). Selain itu, Suharto (dalam Sa`adah, 2015: 39) berpendapat bahwa pemberdayaan bertujuan untuk mengembangkan individu atau kelompok masyarakat melalui penguatan kapasitas yang diperlukan dalam peningkatan kualitas hidup komunitasnya.

Tujuan pemberdayaan ditekankan pada upaya penyelesaian kendala yang dihadapi masyarakat desa yang menjadi kebutuhannya. Segala

potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat desa harus dicermati sebagai fondasi menjalankan kegiatan pemberdayaan. Potensi tersebut contohnya seperti lahan yang dapat dioptimalkan fungsinya, kuatnya modal sosial yang ada di masyarakat desa, nilai dan budaya yang masih dijunjung tinggi, dan lain sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat desa tentunya melibatkan berbagai pihak yang mempunyai peran dan kepentingan masing-masing. Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, Akademisi, dan lain sebagainya dapat ikut ambil bagian dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pihak-pihak ini harus sadar bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan mempunyai orientasi kepada kepentingan perkembangan masyarakat desa. Serta masyarakat desa sendiri juga harus menyadari bahwa bantuan dalam berbagai bentuk serta upaya fasilitasi yang dilakukan pihak luar tentu tidak akan berjalan selamanya. Sehingga pemberdayaan harus mampu membangkitkan kesadaran masyarakat akan kemandirian dan rasa tanggung jawab bukan justru menimbulkan ketergantungan.

Pemberdayaan juga mempunyai tujuan seperti yang dirilis *United Nations* dalam poin-poin proses pemberdayaan masyarakat (Tampubolon dalam Zubaedi, 2013:77-79). Poin-poin tersebut antara lain sebagai berikut.

1. *Getting to Know The Local Community*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat/lokal yang akan diberdayakan, termasuk dapat membedakan dengan karakteristik masyarakat lain.

2. *Gathering Knowledge About The Local Community*

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Informasi yang dikumpulkan mengenai distribusi penduduk menurut umur, seks, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan tentang nilai, sikap, ritual, dan *custom*, jenis pengelompokan masyarakat, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

3. *Identifying The Local Leaders*

Mengidentifikasi siapa saja tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Hal ini perlu dipertimbangkan demi menunjang keberhasilan pemberdayaan nantinya.

4. *Stimulating The Community to Realize That it has Problems*

Tujuan utama dari langkah ini adalah agar masyarakat dapat mengutarakan masalah-masalah apa yang dihadapi dan perlu dicarikan pemecahannya.

5. *Helping People to Discuss Their Problem*

Proses ini mendorong masyarakat agar dapat mendiskusikan masalah yang dihadapi, dan merumuskan pemecahannya.

6. *Helping People to Identify Their Most Pressing Problems*

Proses ini mendorong masyarakat untuk dapat mengidentifikasi prioritas masalah mana yang paling menekan, sehingga masalah inilah yang harus diutamakan dicarikan pemecahannya.

7. *Fostering Self-Confidence*

Proses ini bertujuan untuk mendorong masyarakat menjadi lebih

percaya diri.

8. *Deciding on A Program Action*

Pada tahap ini masyarakat perlu diberdayakan untuk dapat menetapkan program atau aksi nyata apa yang bisa dilakukan dengan skala prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.

9. *Recognition of Strengths and Resources*

Tahapan ini merupakan upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka memiliki potensi yang dapat mereka gali dan kembangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

10. *Helping People to Continue to Work on Solving Their Problems*

Mengingat pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang berkesinambungan, maka masyarakat juga harus disadarkan bahwa upaya yang dilakukan harus berjalan secara berkelanjutan.

11. *Increasing People's Ability for Self-Help*

Kemandirian merupakan tujuan dari adanya pemberdayaan, oleh karena itu masyarakat yang berhasil dalam proses pemberdayaan ialah masyarakat yang mandiri yaitu masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri.

Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan pemberdayaan menyangkut berbagai pihak yang berorientasi pada kepentingan masyarakat desa yang diberdayakan. Selain kesepahaman dalam memandang tujuan pemberdayaan, harus disadari juga pendekatan pemberdayaan apa yang dinilai cocok dengan kondisi masyarakat desa yang akan diberdayakan.

Upaya pemberdayaan masyarakat menurut Munandar (2008:153) dapat dijalankan melalui tiga pendekatan. Ketiga pendekatan tersebut antara lain:

1. Pendekatan Mikro

Melalui pendekatan mikro, pemberdayaan utamanya dilakukan langsung pada individu yang akan diberdayakan. Kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui proses bimbingan, konseling, *stress management*, dan intervensi krisis. Pendekatan mikro mempunyai tujuan utama untuk membimbing dan melatih individu dalam menjalankan tugas dalam kehidupannya.

2. Pendekatan Mezzo

Melalui pendekatan mezzo, upaya pemberdayaan dilakukan melalui kelompok masyarakat sebagai media intervensi. Kelompok masyarakat diajarkan agar dapat memecahkan masalah dan mencari jalan keluar terbaik dengan cara meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu.

3. Pendekatan Makro

Melalui pendekatan makro, upaya pemberdayaan dilakukan dengan langkah yang terfokus pada strategi seperti perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobi, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Hal ini karena pendekatan ini memang ditujukan pada sasaran perubahan dengan lingkungan yang relatif lebih luas.

Ketiga pendekatan pemberdayaan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat

desa yang akan diberdayakan. Terdapat masyarakat desa yang kendalanya dapat dipecahkan dengan pendekatan pemberdayaan mikro, mezzo, maupun makro. Seperti contohnya jika ditemukan bahwa masalah utama ada pada kebijakan yang kurang mengakomodasi kepentingan perkembangan masyarakat desa secara umum, maka pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan makro. Demikian juga apabila masyarakat desa mempunyai kendala dalam kondisi ekonomi rumah tangga, maka pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara pendekatan mikro yang langsung pada masing-masing individu maupun melalui kelompok masyarakat terutama yang sudah lama terbentuk.

Pendekatan mikro mempunyai kelebihan dalam proses pemberdayaan karena pihak pemberdaya secara langsung dapat berinteraksi dengan individu masyarakat desa yang diberdayakan. Interaksi yang intensif ini memungkinkan transfer pengetahuan yang lebih lancar, dan proses monitoring yang lebih mudah. Namun pendekatan ini mempunyai kelemahan salah satunya tidak dapat menjangkau banyak individu dalam waktu yang singkat.

Tahapan Pemberdayaan

Proses pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai proses yang direncanakan dengan cermat berdasarkan analisis kendala masyarakat desa serta pendekatan yang digunakan. Tahapan pemberdayaan secara umum seperti yang dijabarkan oleh Aziz (*dalam* Widiastuti, 2015: 13) sebagai berikut.

1. Membantu masyarakat dalam menemukan masalah yang dirasa memberatkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Melakukan analisis atas permasalahan tersebut secara mandiri dan partisipatif.
3. Setelah menemukan masalah dan menganalisisnya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan skala prioritas masalah, untuk menemukan masalah mana yang paling mendesak untuk segera diselesaikan.
4. Mencari pemecahan masalah dengan pendekatan sosiokultural.
5. Melakukan aksi nyata di lapangan untuk menjalankan solusi pemecahan masalah.
6. Melakukan evaluasi atas seluruh rangkaian pemberdayaan yang dilakukan.

Peran Fasilitator Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dimaknai sebagai upaya memberikan daya pada pihak yang dirasa kurang berdaya. Diperlukan kesadaran untuk mengetahui ketidakberdayaan yang dihadapi, bagaimana cara mengatasinya, dan tujuan lebih besar apa yang hendaknya dijadikan sasaran. Oleh karena itu, pihak yang mempunyai kelebihan terutama dalam hal pengetahuan mempunyai peran penting dalam membantu proses pemberdayaan masyarakat. Pihak ini dapat berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi, LSM, pemerintah, dan lain sebagainya. Nantinya pihak ini akan memfasilitasi masyarakat dalam rangkaian tahapan pemberdayaan yang dijalankan. Peran pendamping atau fasilitator pemberdayaan, salah satunya dijelaskan oleh Sa`adah (2015: 42) antara lain:

1. *Facilitative Role*

Merupakan peran untuk membantu masyarakat menemukan informasi yang diperlukan untuk diberdayakan. Peran ini dapat dilakukan baik dengan pendekatan formal dan informal. Pendekatan formal dilakukan dengan pertemuan formal seperti rapat dengan perangkat desa, pertemuan warga, maupun kegiatan pemerintah setempat. Sedangkan pendekatan informal dilakukan dengan berbaur dan mengikuti kegiatan sehari-hari masyarakat. Informasi ini penting untuk mengetahui potensi masyarakat, membentuk, dan menyusun langkah pengembangan potensi tersebut.

2. *Educational Role*

Peran ini pada intinya merupakan peran seorang pendamping untuk dapat memotivasi anggota komunitas untuk dapat ikut andil dalam proses pemberdayaan. Selain itu juga perlu meyakinkan anggota kelompok bahwa kontribusi yang diberikan akan dihargai dan bermanfaat bagi kelompok masyarakat. Sehingga dukungan ini akan memudahkan proses pemberdayaan karena seluruh komponen kelompok dapat ikut berkontribusi.

3. *Representative Role*

Peran ini hampir sama dengan peran sebelumnya yang berupaya meyakinkan masyarakat agar percaya diri dan ikut berkontribusi. Lebih jauh, peran representatif dilakukan dengan meyakinkan representasi masyarakat untuk ikut merasa memiliki dan aktif dalam program pemberdayaan. Sehingga mereka juga ikut merasa bertanggungjawab akan keberhasilan program pemberdayaan, selain itu juga lebih menjamin keberlanjutan program pemberdayaan.

4. *Technical Role*

Peran ini dimaksudkan agar masyarakat ikut serta secara teknis dalam berjalannya proses pemberdayaan. Sehingga diharapkan masyarakat merasa memiliki program, ikut melaksanakan, dan pada akhirnya akan menerima manfaat.

Pemberdayaan Masyarakat Petani Pedesaan

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Pemberdayaan ini ditujukan untuk mengembangkan kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya ini dapat dilakukan dengan penetapan kebijakan, pengadaan program dan kegiatan, serta pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat desa (Kessa, 2015: 18).

Pemberdayaan masyarakat desa terutama ditujukan bagi para petani karena memang sebagian besar masyarakat desa bertahan hidup dengan mengandalkan hasil olah lahan pertanian. Melalui pemberdayaan, petani dibangkitkan kesadaran untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilannya dalam usaha tani untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik. Program pemberdayaan disesuaikan dengan analisis kendala yang dihadapi oleh petani dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan juga bisa bermacam-macam, baik yang secara langsung seperti pendekatan mikro dan mezzo, ataupun untuk tujuan perubahan struktural dengan pendekatan makro.

Elizabeth (2007: 38) mengungkapkan salah satu tujuan

pemberdayaan masyarakat petani adalah terciptanya suatu iklim yang kondusif dan menguatkan daya tawar petani dalam melakukan usaha tani. Penciptaan iklim yang kondusif ini meliputi:

1. Perbaikan sistem dan mekanisme pemasaran hasil usaha tani, termasuk peningkatan harga jual di tingkat petani.
2. Perubahan persepsi secara sosial dalam memandang profesi petani, sehingga nilai kerja petani tidak dianggap sebagai pekerjaan alternatif, kurang terhormat, serta tidak mampu mengangkat status kehidupan dalam masyarakat.
3. Adopsi teknologi pertanian harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan peran petani serta pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) yang mungkin lebih potensial dalam merawat kelestarian lingkungan maupun nilai-nilai lokal.

Tujuan ekonomi merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi rumah tangga petani pedesaan. Akses yang lebih minim pada berbagai fasilitas serta informasi berakibat petani pedesaan sulit berkembang. Oleh karena itu perbaikan dalam sistem usaha tani dengan pengembangan pengetahuan dan teknologi dalam mengelola lahan pertanian perlu dilakukan melalui upaya pemberdayaan. Adopsi teknologi maupun pengetahuan baru pada petani juga harus memperhatikan lokalitas sosial, budaya dan kondisi lingkungan fisik desa di mana petani tinggal. Sehingga pengembangan ini selaras dengan kebutuhan dan potensi petani pedesaan untuk mengangkat derajat hidup mereka menjadi lebih berdaya dan mandiri.

Pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat petani pedesaan disokong oleh karakteristik masyarakat yang mendukung upaya

pemberdayaan. Tentu, setiap kondisi desa satu dengan lainnya mempunyai karakteristik yang berbeda, tetapi secara garis besar, faktor yang dapat mendukung dalam pelaksanaan upaya pemberdayaan petani adalah sebagai berikut (Elizabeth, 2007: 37).

1. Solidaritas yang dimiliki masyarakat petani pedesaan.
2. Kelembagaan petani berupa struktur dan aturan main yang diciptakan sendiri akan lebih ditaati, dihargai, dan dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat petani.
3. Kelembagaan petani dengan struktur sederhana dan bersifat informal serta mekanisme yang berjalan adalah mencapai keputusan yang adil bukan persaingan.
4. Petani dan buruh tani mempunyai persepsi yang baik pada kedudukan dan peran usahatani.
5. Petani cenderung mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi.
6. Petani dapat menyesuaikan pada agroekosistem setempat, mekanisme pembangunan yang diterapkan serta dinamikanya dalam upaya menyasati eksploitasi oleh petani lapisan atas.

Peran Stakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Noor (2011:98) berpendapat jika pelaksanaan pemberdayaan masyarakat seharusnya melibatkan berbagai elemen yang ada di masyarakat dan mengoptimalkan potensi yang ada, seperti yang beberapa aspek berikut:

1. Pemerintah yang mampu berperan dalam meningkatkan partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan kebijakan dan

peraturan yang mendukung.

2. Keikutsertaan berbagai lembaga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lokal maupun nasional.
3. Keikutsertaan lembaga masyarakat yang tumbuh dalam masyarakat (*local community organization*) seperti BPD, PKK, Karang Taruna dan sebagainya,
4. Pengoptimalan peran koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat.
5. Keikutsertaan pendamping dalam membantu mengembangkan potensi masyarakat.
6. Perencanaan pembangunan harus mencakup pemberdayaan dengan pendekatan *bottom-up*.
7. Keterlibatan semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat yang lebih mampu.

Penjabaran di atas merupakan contoh mengenai stakeholder yang terlibat dan peran yang dijalankan dalam upaya pemberdayaan masyarakat petani pedesaan. Analisis stakeholder tidak dapat dikesampingkan dalam pelaksanaan upaya pemberdayaan. Karena dengan demikian, diharapkan terwujud hubungan yang sinergis dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Sehingga yang terpenting adalah keikutsertaan semua pihak terkait dengan mengusung tujuan yang sama yaitu membuat masyarakat petani pedesaan menjadi lebih berdaya.

Bab 8

Introduksi Teknologi dan Inovasi dalam Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Petani Pedesaan

Bahasan pada bagian ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat petani pedesaan. Sedikit mengulas kembali bahwa pembangunan desa yang berusaha mencapai kesejahteraan masyarakat desa serta memupuk kemandirian desa dapat dilakukan dengan pemberdayaan. Pemberdayaan didasarkan atas kesadaran masyarakat desa sendiri untuk dapat menganalisa kendala, potensi, serta menentukan prioritas kegiatan yang akan dijalankan. Kegiatan pemberdayaan pada masyarakat desa sebagai suatu upaya membangun masyarakat desa salah satunya dapat dilakukan dengan mengenalkan pengetahuan, inovasi, serta teknologi baru yang

memudahkan masyarakat desa terutama dalam mengoptimalkan potensi pada mata pencaharian utamanya. Tentunya pengetahuan, inovasi, dan teknologi baru ini disesuaikan dengan lokalitas masyarakat desa, seperti lingkungan alam, sosial, dan budaya.

Sektor pertanian dijadikan contoh karena sebagian besar tipologi desa adalah desa pertanian, sehingga mayoritas masyarakat desa mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Petani yang menjadi fokus utama dalam pemberdayaan difokuskan pada *peasant* yang rentan pada kemiskinan. *Peasant* merupakan golongan petani yang hidup sederhana dengan menggantungkan olah lahan pada kondisi lingkungan, menggunakan teknologi sederhana, serta mempunyai tujuan utama memenuhi kebutuhan rumah tangga secara subsisten. Paradigma ini bukanlah suatu yang salah, di mana *peasant* tidak harus diubah menjadi *farmer*. Pada kenyataannya, *peasant* justru dapat memelihara dengan baik nilai budaya yang ada secara turun-temurun serta melestarikan lingkungan alam.

Pemberdayaan pada *peasant* paling tidak dapat memberikan suatu jaring pengaman ketika lingkungan alam sedang tidak bersahabat sehingga berdampak pada hasil panen lahan pertanian di mana mereka menggantungkan hidup dan rumah tangganya. Nilai-nilai modal sosial yang ada pada *peasant* bukanlah suatu penghalang dalam upaya pembangunan, tetapi justru menjadi potensi kuat yang harus dipertahankan. Maka pengembangan teknologi juga harus seiring dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Introduksi teknologi pada sektor pertanian perlu mempertimbangkan aspek petani sebagai subjek utamanya. Seperti keterangan Scott yang

dijelaskan oleh Chiari (2015: 14), sebagian besar petani pada kenyataan di lapangan lebih cenderung mengedepankan aspek moral dibandingkan dengan rasionalitas dalam hal ini penggunaan teknologi pertanian. Sehingga yang ditekankan adalah timbulnya kerja sama baik itu dalam keluarga atau antar individu petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti contohnya dalam hal pembagian kerja rumah tangga petani yang bersifat fleksibel dan tidak mengikat secara adaptif. Usaha tani dilakukan secara bergotong royong oleh anggota keluarga. Meskipun istri seorang petani dalam sehari-hari bertugas mengurus pekerjaan rumah tangga, namun pada kondisi tertentu ia dapat membantu suaminya untuk menambah penghasilan keluarga dengan ikut bekerja.

Introduksi teknologi pada petani yang mendasarkan petani sendiri sebagai subjek utama, maka mereka juga mempunyai pertimbangan tertentu terkait dengan teknologi baru yang akan digunakan. Fliegel et al. (dalam Abdullah, 2008: 191) mengungkapkan bahwa terdapat Lima hal yang menjadi pertimbangan petani dalam mengadopsi teknologi baru pertanian, antara lain:

1. Pertimbangan penambahan keuntungan dari pengadopsian teknologi baru.
2. Kesesuaian teknologi dengan sosial budaya masyarakat.
3. Rasa percaya petani dari pengamatan pada penerapan teknologi di petani lain.
4. Mencoba sendiri keberhasilan teknologi.
5. Pertimbangan pada ketersediaan modal dan perhitungan harga hasil pertanian karena konsekuensi kenaikan produksi.

Maamun et al. (dalam Abdullah, 2008: 191) menambahkan empat faktor lain yang menjadi pertimbangan ketersediaan petani dalam mengadopsi teknologi pertanian, yaitu:

1. Pertimbangan sifat dan karakter pada petani baik secara individu maupun kelompok.
2. Pertimbangan faktor sosial, ekonomi dan budaya.
3. Penampakan teknologi serta bagaimana kesesuaian teknologi jika diterapkan.
4. Pertimbangan faktor eksternal seperti aspek pelayanan dan kebijaksanaan dari lembaga terkait.

Pemanfaatan Lahan pekarangan

Pekarangan diartikan sebagai sebidang tanah yang memiliki batas tertentu, di atasnya terdapat bangunan tempat tinggal dan berhubungan secara fungsional dengan penghuni dalam aspek ekonomi, biofisik, maupun sosial budaya. Pekarangan terletak di sekitar perumahan yang kebanyakan berpagar keliling dan ditanami dengan tanaman untuk kebutuhan sehari-hari maupun diperjualbelikan. Pekarangan juga sering disebut dengan lumbung hidup, warung hidup, atau juga apotek hidup. Penyebutan ini terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan tersebut. Disebut lumbung hidup karena tanah pekarangan dapat digunakan untuk menanam tanaman padi, jagung, dan umbi-umbian yang ditanam di pekarangan sebagai cadangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebagai warung hidup karena pekarangan dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman sayuran, buah-buahan, maupun bumbu dapur yang biasanya didapatkan dengan cara membeli dari warung. Pekarangan disebut juga sebagai apotek hidup karena dapat digunakan untuk

membudidayakan berbagai tanaman obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit jika penghuni rumah sedang menderita penyakit tertentu (Mardikanto; Hartono et al; Sajogyo dalam Ashari dan Purwantini, 2012: 15).

Pemanfaatan lahan pekarangan bukan saja sekadar efisiensi pemanfaatan lahan yang tersedia tetapi ada tujuan yang lebih besar dari itu. Pemanfaatan lahan pekarangan di sekitar rumah yang ditujukan untuk budidaya tanaman sebenarnya dapat menunjang ketahanan pangan nasional dan pemenuhan gizi masyarakat. Karena salah satu masalah penting yang dihadapi Indonesia adalah kerawanan pangan dan konsumsi pangan yang masih di bawah anjuran pemenuhan gizi (Ashari dan Purwantini, 2012: 14).

Lahan pekarangan di sekitar rumah mempunyai kontribusi pada kehidupan petani dalam hal penyediaan kebutuhan sehari-hari keluarga petani secara berkesinambungan. Salah satu pemanfaatannya seperti budidaya ternak dan tanaman yang dikelola di pekarangan rumah yang memberi kontribusi terhadap pendapatan keluarga petani. Pemanfaatan pekarangan selanjutnya juga dapat didayagunakan sebagai penghasil bahan makanan sebagai tambahan hasil dari sawah dan tegal, pekarangan dapat dimanfaatkan untuk membudidayakan sayur dan buah-buahan, unggas, ternak kecil dan ikan, tanaman rempah, tanaman untuk bumbu dapur dan wangi-wangian, serta tanaman bahan kerajinan tangan (Sajogyo; Salikin; Arifin dalam Ariati, 2017:77).

Pemanfaatan lahan pekarangan menurut Mardiharini (dalam Ashari dan Purwantini, 2012:14) dapat digunakan untuk budidaya tanaman pangan, tanaman obat, hortikultura, dan ternak yang berpotensi dapat

memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, pemanfaatan pekarangan juga dapat menjadi sumber tambahan pendapatan keluarga juga direncanakan dengan baik. Akan tetapi, perhatian petani dalam pemanfaatan lahan pekarangan masih sangat minim, sehingga inovasi dalam pemanfaatan lahan pekarangan belum menemui hasil yang diharapkan.

Harijati dalam Manyamsari dan Mujiburrahmad (2014:59) melihat keberhasilan petani dalam usaha tani sebenarnya berkaitan dengan kompetensi agribisnis yang dimiliki petani. Kompetensi agribisnis sendiri merupakan kemampuan untuk berpikir, bersikap, dan bertindak dalam mengelola usaha tani untuk mengoptimalkan manfaat, membangun kerja sama antar subsistem usaha tani, pengelolaan hasil usaha tani, dan berwawasan kegiatan usaha tani yang berkelanjutan. Manyamsari dan Mujiburrahmad (2014:60) menambahkan dalam kerangka berpikir agribisnis, petani dapat mengoptimalkan usaha tani bahkan di lahan sempit dengan menerapkan manajemen agribisnis dalam usahatani. Petani disarankan tidak hanya berfokus pada upaya peningkatan produksi, tetapi juga mengembangkan pengelolaan hasil usaha tani untuk menambah nilai jualnya.

Inovasi dan Teknologi Vertikultur Sebagai Upaya Pengembangan Potensi Desa

Salah satu pemanfaatan lahan pekarangan sebagai lahan budidaya tanaman dapat dilakukan dengan berbagai metode penanaman. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknik vertikultur, di mana budidaya tanaman dilakukan secara vertikal dengan penanaman tanaman yang dilakukan dengan bertingkat. Vertikultur menyesuaikan dengan

kondisi lahan pekarangan yang memang tidak terlalu luas bahkan pada area rumah yang tidak memiliki halaman rumah sekalipun. Melalui budidaya tanaman secara vertikultur, keuntungan yang didapatkan adalah memanfaatkan lahan yang ada secara efisien serta menambah segi estetika rumah dengan menyuguhkan pemandangan indah berbagai warna sesuai tanaman yang ditanam. Vertikultur sebenarnya dapat dilakukan dengan metode yang mudah dengan bahan-bahan yang dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan sekitar (Kusmiati dan Solikhah, 2015:95).

Pengenalan pemanfaatan lahan pekarangan pada rumah tangga petani pedesaan dapat dijadikan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani pedesaan dengan pendekatan mikro atau langsung pada masing-masing individu petani oleh pihak pemberdaya. Melalui upaya ini, diharapkan hasil panen pertanian petani terutama *peasant* menjadi lebih variatif terutama jika untuk memenuhi kebutuhan hidup skala rumah tangga petani. Pemberdayaan melalui pendekatan mikro memungkinkan interaksi yang intensif antara pihak pemberdaya dengan yang diberdayakan. Diharapkan dengan berhasilnya salah satu petani mengembangkan sistem vertikultur, maka pengembangan ini dapat menjalar pada petani lain.

Peran pemberdaya dalam hal ini adalah membantu mengenalkan petani pada sistem vertikultur serta membantu menganalisis bagaimana bangun vertikultur yang sesuai. Sebagai sebuah variasi sistem budidaya tanaman, vertikultur dapat digunakan untuk membudidayakan berbagai macam jenis tanaman. Tetapi akan lebih baik jika tanaman yang dipilih sesuai dengan kebutuhan serta kondisi yang ada di lingkungan pekarangan rumah tangga petani pedesaan. Pemanfaatan lahan pekarangan dengan teknik vertikultur yang ditujukan untuk menanam sayuran dan buah ternyata mempunyai alasan kuat karena kedua varian tanaman tersebut merupakan

satu dari empat pilar pangan berimbang yang dianjurkan dalam pemenuhan gizi keluarga (Prihatmmoko dalam Ariati, 2017: 78). Penanaman dengan vertikultur pada jenis tanaman buah dan sayuran maka dapat meningkatkan asupan gizi rumah tangga petani pedesaan. Apabila petani terutama *peasant* mempunyai pola hidup yang subsisten, maka dengan mengoptimalkan sistem vertikultur, *peasant* tetap dapat menghasilkan hasil panen yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dengan standar gizi yang terpenuhi.

Vertikultur yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari akan lebih baik jika diolah dengan menggunakan konsep bebas pestisida kimia atau dengan kata lain menggunakan biopestisida. Dengan begitu, vertikultur bukan saja sumber penambahan kuantitas asupan makanan ke keluarga tetapi juga meningkatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Pengembangan ini dapat dihubungkan dengan usaha tani yang lain seperti pemeliharaan hewan ternak, dimana kotoran hewan ternak ini dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman secara vertikultur yang diolah di pekarangan rumah.

Tanaman Vertikultur

Menurut Kusmiati dan Solikhah (2015:95) tanaman yang ditanam dengan teknik vertikultur harus memperhatikan kriteria tanaman yang bernilai ekonomis, berumur pendek atau tanaman semusim, dan tanaman yang perakarannya tidak terlalu luas sehingga dapat hidup di media tanam yang digunakan pada vertikultur. Pendapat ini sejurus dengan apa yang diungkapkan Lukman (2011:1) bahwa tanaman yang sebaiknya ditanam dengan sistem vertikultur sebaiknya memenuhi persyaratan bahwa tanaman

tersebut sesuai kebutuhan dan mempunyai nilai ekonomis, berumur pendek, dan berakar pendek. Rangkaian sistem vertikultur yang dipersiapkan juga harus kuat dan dapat dipindah-pindahkan. Beberapa jenis sayuran yang dapat ditanam dengan sistem vertikultur contohnya seperti bayam, mentimun, selada, kacang panjang, kangkung, pare, pakcoi, tomat, caisim, kemangi dan katuk.

Rasapto (2006:425-426) mengelompokkan berbagai jenis tanaman khususnya sayuran berdasarkan bagian yang dimanfaatkan dan dapat dibudidayakan dengan sistem penanaman secara vertikultur. Rasapto membaginya menjadi 5 jenis tanaman, yaitu:

1. Sayuran Buah

Sayuran buah dibudidayakan dengan tujuan untuk dipanen dan dikonsumsi bagian buahnya. Secara garis besar, sayuran yang dapat ditanam dengan pot dengan sistem vertikultur contohnya seperti terung, cabai rawit, cabai besar, tomat, pare, mentimun, buncis, kacang panjang, paprika, kapri, dan kecipir.

2. Sayuran Daun

Sayuran daun dibudidayakan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagian daunnya. Sayuran yang dapat ditanam dengan sistem vertikultur seperti selada, caisim, kangkung, bayam, bawang daun, seledri, kobis, talas daun, pakcoi, kemangi, dan kailan.

3. Sayuran Bunga

Sayuran ini merupakan sayuran yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan bagian bunganya. Jenis sayuran yang dapat ditanam secara vertikultur seperti bunga kol dan brokoli. Tetapi sayuran ini

juga harus memperhatikan kondisi iklim lokasi pembudidayaan, karena pada umumnya sayuran ini ditanam di dataran tinggi.

4. Sayuran Umbi

Penanaman sayuran yang dimanfaatkan umbinya memang jarang dibudidayakan dengan sistem vertikultur karena media tanam hanya terbatas pada ruang pot, sehingga pot yang dipakai harus yang tinggi agar pertumbuhan umbi dapat maksimal. Sayuran umbi yang dapat dibudidayakan contohnya seperti lobak, kentang, wortel, bawang Bombay, bawang merah, bawang putih, dan radish.

5. Tanaman Empon-empon

Penanaman tanaman empon-empon secara vertikultur di lahan pekarangan dapat memudahkan keluarga petani jika membutuhkan dan tidak perlu membeli ke warung. Tanaman ini dapat digunakan sebagai bumbu dapur, sehingga pasti dibutuhkan oleh rumah tangga petani. Tanaman empon-empon yang dapat dibudidayakan dengan sistem vertikultur contohnya seperti temu kunci, kencur, serai, lengkuas, dan kunyit.

Ariati (2017:80) menambahkan jenis-jenis sayuran yang dapat ditanam dengan sistem vertikultur adalah sebagai berikut.

1. Sawi hijau (*brassica sinensis L*) merupakan sayuran yang dapat ditanam sepanjang tahun, dapat hidup di dataran rendah maupun tinggi meskipun biasanya ditanam pada dataran rendah dengan medium ketinggian 5-1200 dpl. Sawi merupakan tanaman yang relatif mudah untuk dibudidayakan karena tanaman ini tahan terhadap berbagai jenis cuaca, baik pada musim hujan maupun kemarau (dengan penyiraman rutin). Sawi hijau dapat dipanen setelah

umur 40-50 hari setelah penyemaian. Sawi hijau dipanen dengan cara dipotong pangkal batang, mencabut seluruh tanaman, atau daunnya dipetik satu per satu.

2. Bayam (*Amaranthus spt.*) merupakan sayuran dengan ciri batangnya berair dan kurang berkayu, daun bertangkai berbentuk bulat telur, lemas, berwarna hijau, merah atau hijau keputihan. Bayam mempunyai bunga yang tersusun majemuk tipe tukul yang rapat bagian bawah dan memiliki biji yang berwarna hitam, kecil dan keras. Bayam termasuk jenis sayuran yang relatif mudah untuk dibudidayakan termasuk dengan teknik vertikultur. Hal ini karena bayam memiliki perakaran pendek dan termasuk tanaman semusim yang membutuhkan iklim hangat dan cahaya kuat.
3. Tomat (*Solanum lycopersicum syn.*) sebenarnya merupakan tanaman asli dari daerah Amerika Tengah dan Amerika Selatan, dari Meksiko sampai Peru. Tomat berwarna mulai dari hijau, kuning, sampai merah yang memiliki siklus hidup yang singkat dan dapat tumbuh setinggi 1-3 m. Tomat dibudidayakan karena dapat dimakan langsung ataupun diolah sebagai sayur dalam masakan.
4. Kangkung (*Ipomoea aquatica forsk*) merupakan jenis sayuran yang dapat dibudidayakan dengan dua cara penanaman, yaitu dengan penanaman kering dan basah. Kangkung dapat ditanam dari biji maupun keratan akar dan biasanya disemai dulu sebelum dipindahkan ke kebun.
5. Terung (*Solanum melongena*) merupakan sayuran yang dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun tinggi. Terung baik ditanam pada daerah dengan suhu antara 22 – 30 derajat celsius, pada jenis tanah

lempung berpasir, mendapat sinar matahari cukup dan baik ditanam pada musim kemarau.

6. Cabai juga merupakan tanaman yang potensial untuk dibudidayakan secara vertikultur di lahan pekarangan. Pada umumnya cabai dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun sebagai komoditas untuk diperdagangkan.

Kelebihan dan Kekurangan Vertikultur

Damastuti (*dalam* Kusmiati dan Solikhah, 2015: 95) mengungkapkan sistem budidaya tanaman dengan teknik vertikultur mempunyai berbagai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem vertikultur yaitu:

1. Efisiensi penggunaan lahan karena penanaman dengan vertikultur dapat menggunakan lahan yang sempit untuk budidaya berbagai macam tanaman.
2. Menghemat biaya perawatan tanaman dengan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida.
3. Lebih mudah dirawat karena tanaman pengganggu seperti rumput dan gulma lebih sedikit kemungkinan untuk tumbuh
4. Sistem vertikultur memungkinkan untuk memindah tanaman dengan lebih mudah karena diletakkan pada wadah tertentu.
5. Karena ditanam di pekarangan rumah maka tanaman lebih mudah diawasi.
6. Jika sistem vertikultur menggunakan tambahan atap plastik, maka dapat mencegah kerusakan karena hujan dan mengurangi penguapan tanaman sehingga menghemat air untuk penyiraman.

Sedangkan kekurangan sistem vertikultur menurut Damastuti yaitu:

1. Tanaman budidaya rawan terkena serangan jamur yang dapat merusak tanaman karena kelembaban udara yang tinggi akibat adanya atap plastik.
2. Sistem vertikultur memerlukan investasi awal yang cukup tinggi.
3. Sistem penyiraman harus diperhatikan dan rutin dijalankan.

Hasyim dan Mirajuddin (2013:83-86) juga mengungkapkan bahwa budidaya tanaman dengan sistem vertikultur mempunyai banyak kelebihan. Kelebihan tersebut di antaranya adalah pemeliharaan yang relatif mudah, penghematan penggunaan air dan pupuk, pemanfaatan lahan secara efisien, mudah untuk dipindahkan, serta relatif menghasilkan hasil panen tanaman yang lebih bersih dan sehat. Sistem vertikultur juga memudahkan petani untuk mengontrol pertumbuhan rumput dan gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Sedangkan tanaman yang biasanya diprioritaskan untuk dibudidayakan dengan sistem ini seperti budidaya tanaman obat yang bermanfaat untuk pertolongan pertama bagi kesehatan keluarga.

Pembuatan Vertikultur

Banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam adopsi sistem vertikultur pada rumah tangga petani pedesaan. Peran pemberdaya menjadi penting dalam membantu petani menganalisis bangun vertikultur apa yang cocok untuk diupayakan. Bahan-bahan yang digunakan sebaiknya juga yang mudah ditemukan di sekitar lingkungan petani dan tidak berbiaya mahal. Sehingga upaya pengenalan vertikultur sebagai upaya pemberdayaan

masyarakat petani pedesaan ini mudah ditiru dan nantinya dapat diusahakan secara mandiri oleh petani sekitar.

Sastro (*dalam* Kusmiati dan Solikhah, 2015:96) mengungkapkan bahwa dalam mempersiapkan vertikultur, setidaknya harus memperhatikan tiga aspek yaitu, pertama pembuatan rak vertikultur. Bangunan ini dapat menggunakan bangunan khusus dengan modifikasi dari sistem *greenhouse* ataupun dengan lebih sederhana yakni tanpa menggunakan bangunan khusus dengan menggantung pot atau menempelkan pada dinding. Bentuk bangunan rak dapat menyesuaikan dengan lokasi, kebutuhan, dan bahan yang tersedia. Dapat menggunakan bahan yang ditemukan di lingkungan sekitar seperti kayu, paralon, bambu, kantong plastik, pot, dan gerabah. Kedua yang harus diperhatikan adalah penyiapan dan penggunaan pupuk organik. Ketiga adalah pada penanaman dan pemeliharaan tanaman budidaya.

Tempat menanam tanaman dalam sistem vertikultur dapat menggunakan pot dengan berbagai macam bahan, seperti pot tanah, semen, ember, plastik, kaleng bekas, pipa paralon, polybag, dan bambu. Sedangkan pot sebagai tempat menanam tanaman pada sistem vertikultur dapat disusun dengan pot tunggal, pot horizontal bertingkat, maupun pot vertikal (Rasapto, 2006:426). Penggunaan bahan dan penyusunan pot ini tentu dapat disesuaikan dengan bahan dan tempat yang tersedia untuk sistem vertikultur.

Penerapan Vertikultur

Penelitian Ariati (2017:84) menunjukkan jenis sayuran bayam, cabe lokal, terung, tomat, dan kangkung dapat ditanam dengan sistem

vertikultur. Akan tetapi setelah melakukan percobaan dan pengamatan dalam penelitiannya, Ariati berkesimpulan bahwa sayuran bayam dan cabe lokal sangat baik apabila dijadikan pilihan untuk dibudidayakan dengan sistem vertikultur. Sedangkan terung dan kangkung mempunyai produktivitas yang sama apabila ditanam dengan sistem vertikultur ataupun ditanam di kebun. Sedangkan tanaman tomat lebih baik ditanam di kebun karena mempunyai produktivitas rendah jika ditanam dengan sistem vertikultur.

Keberhasilan dalam sistem vertikultur juga dipengaruhi oleh media tanam yang digunakan dan juga bahan yang digunakan sebagai wadah vertikultur. Media tanam yang digunakan juga sebaiknya memperhatikan tanaman yang dibudidayakan akan optimal tumbuh pada jenis media tanam yang mana. Beberapa contoh media tanam yang dapat digunakan dalam sistem vertikultur seperti serbuk pakis, sekam bakar, *moss*, *coco peat*, dan pupuk kandang (Noverita dalam Izhar, et. al.: 2016). Aspek ini dibuktikan pada penelitian Izhar, et. al. (2016: 568) yang menunjukkan bahwa media tanam berupa humus, *coco peat*, tanah, dan arang sekam serta bahan vertikultur berupa terpal plastik, karpet, dan karung goni ternyata berpengaruh pada tumbuh kembang tanaman.

Hasil penerapan ini bukan menjadi acuan mutlak penggunaan vertikultur. Hal ini karena adanya perbedaan lingkungan terutama alam yang berdampak pada kesesuaian tanaman yang dibudidayakan dengan sistem vertikultur. Maka yang paling penting adalah kemampuan analisis yang baik berdasarkan pada kebutuhan dan potensi yang ada dalam menerapkan sistem budidaya tanaman secara vertikultur.

Daftar Pustaka

Abdullah, Agustina. 2008. Peranan Penyuluhan dan Kelompok Tani Ternak untuk Meningkatkan Adopsi Teknologi dalam Peternakan Sapi Potong. *Prosiding Seminar Nasional Sapi Potong*. Diakses dari <http://peternakan.litbang.pertanian.go.id/fullteks/lokakarya/puntad08-22.pdf> pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 15.23.

Agusta, Ivanovich. 2014. Transformasi Desa Indonesia 2003-2025. *Prosiding Konferensi Nasional VII dan Kongres XVI Perhepi*. Diakses dari http://www.perhepi.org/wp-content/uploads/2014/11/Transformasi-Desa-Indonesia-2003-2025_Dr.-Ivanovich-Agusta.pdf pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 15.22 WIB.

Ariati, Putu Eka Pasmidi. 2017. Produksi Beberapa Tanaman Sayuran dengan Sistem Vertikultur di Lahan Pekarangan. *Jurnal Agrimeta* 7 (13): 76-86. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/195577-ID-produksi-beberapa-tanaman-sayuran-dengan.pdf> pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 13.40 WIB.

Ashari, Saptana, dan T. B. Purwantini. 2012. Potensi dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 30 (1): 13 – 30. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/62886-ID-potensi-dan-prospek-pemanfaatan-lahan-pe.pdf> pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 16.04 WIB.

Chiari, Anwar. 2015. Strategi Bertahan Hidup Petani Saat Musim Kemarau: Studi Pada Petani Sayur Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. *Jurnal Mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya* 2 (4). Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/111518-ID-strategi-bertahan-hidup-petani-saat-musi.pdf> pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 16.15 WIB.

Daryanto, Arief. 2003. Disparitas Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia. *Jurnal Agrimedia* 8 (2): 30-39. Diakses dari <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/29129> pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 15.35 WIB.

Direktorat Permukiman dan Perumahan. Tanpa Tahun. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa untuk Mengatasi Kemiskinan. *Artikel Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia*. Diakses dari https://www.bappenas.go.id/files/5013/5080/2310/ekonomidesa__20090929140041__2080__1.pdf pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 13.38 WIB.

Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Diakses dari <http://www.keuangandesia.com/wp-content/uploads/2015/04/REGULASI-BARU-DESA-BARU-Ide-Misi-dan-Semangat-UU-Desa.pdf> pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.25 WIB.

Elizabeth, Roosganda. 2007. Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpihakan pada Masyarakat Petani di Pedesaan yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 25 (1): 29 – 42. Diakses dari <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3963> pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 15.51 WIB.

Faizal. 2015. Diskursus Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ijtimaiyya* 8 (1): 35-51. Diakses dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/861> pada tanggal 16 November 2017 pukul 15.30 WIB.

Hakim, Lukman. 2011. *Modul Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala. Diakses dari <http://www.rp2u.unsyiah.ac.id/index.php/welcome/prosesDownload/448/2> pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.25 WIB.

4
Harianto. 2007. *Peranan Pertanian dalam Ekonomi Perdesaan. Prosiding Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Mencari Alternatif Arah Pengembangan Ekonomi Rakyat*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian . Diakses dari http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/Pros_2007-MU_Harianto.pdf pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 16.05 WIB.

40
Hasyim, Moh dan M. Mirajuddin. 2013. *Pendampingan Pembuatan Media Vertikultur untuk Penanaman Tumbuhan Obat dalam Pemaksimalan Pekarangan Rumah*. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan Seri Pengabdian Masyarakat* 2 (2): 82-87. Diakses dari <http://jurnal.uii.ac.id/ajie/article/download/7855/6805> pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 15.53 WIB.

37
Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. *Artikel Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia*. Diakses dari https://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/mardi_2009_1015151035_2384_0.pdf pada tanggal 20 November 2017 pukul 17.36.

8
Izhar, Achmad, Sitawati dan S. Heddy. 2016. *Pengaruh Media Tanam dan Bahan Vertikultur Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Pakcoy (Brassica Juncea L.)*. *Jurnal Produksi Tanaman* 4 (7): 562-569. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/132376-ID-none.pdf> pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 17.28 WIB.

48
Karsidi, Ravik. 2001. *Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Mediator* 2 (1): 115-125. Diakses dari <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/711> pada tanggal 20 November 2017 pukul 16.38.

- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Diakses dari <http://www.keuandangdesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Buku-6-Perencanaan-Pembangunan-Desa.pdf> pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 15.47 WIB.
- Kolopaking, Lala M, C. Apriande, dan R. Syaharbian. 2016. *Mekanisme Perencanaan Desa Membangun dan Membangun Desa*. Working Paper Pusat Studi Pembangunan Pertanian Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor 1 (1): 1-27. Diakses dari <http://psp3.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2016/05/WPMekanisme-Perencanaan-Desa-Membangun-dan-Membangun-Desa.pdf> pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.26 WIB.
- Kusmiati, Ati dan U. Solikhah. 2015. Peningkatan Pendapatan Keluarga Melalui Pemanfaatan Pekarangan Rumah dengan Menggunakan Teknik Vertikultur. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* 4 (2): 94-101. Diakses dari <http://journal.uui.ac.id/index.php/ajie/article/view/3662> pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 13.41 WIB.
- Lukman, Liferdi. 2011. Teknologi Budidaya Tanaman Sayuran Secara Vertikultur. *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 33 (4). Diakses dari <http://www.litbang.pertanian.go.id/berita/one/918/file/verikultur.pdf> pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 17.25 WIB.
- Manyamsari, Ira dan Mujiburrahmad. 2014. Karakteristik Petani dan Hubungannya dengan Kompetensi Petani Lahan Sempit (Kasus: di Desa Sinar Sari Kecamatan Dramaga Kab. Bogor Jawa Barat). *Jurnal Agrisepe* 15 (2): 58-74. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/13184-ID-karakteristik-petani-dan-hubungannya-dengan-kompetensi-petani-lahan-sempit-kasus.pdf> pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 15.33 WIB.

- Munandar, Aris. 2008. Peran Negara dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Poelitik: Kajian Politik, dan Masalah Pembangunan* 4 (1): 151-162. Diakses dari http://sps.unas.ac.id:8080/detail_publicasi.do?id=369 pada tanggal 20 November 2017 pukul 16.39.
- Noor, Munawar. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Civis* 1 (2): 87-99. Diakses dari <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/download/591/541> pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 15.23.
- Nugroho, Setyo. 2013. Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kelurahan. *Jurnal Cita Hukum* 1 (2): 247-262. Diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2633> pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.23 WIB.
- Primahendra, Riza. 2009. *Marginalisasi Perdesaan*. Brief Note Amerta Social Consulting & Resourcing. Diakses dari http://www.amerta.id/wp-content/uploads/2014/02/Brief_4.pdf pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 15.41 WIB.
- Rasapto, Pujo. 2006. Budidaya Sayuran Dengan Vertikultur. *Artikel Ilmiah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia*. Diakses dari http://balitnak.litbang.pertanian.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=70:3&download=1282:3&start=80&Itemid pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 15.43 WIB.
- Rejeki, MC Ninik Sri. 2007. Perbedaan Budaya dan Adaptasi Antarbudaya dalam Relasi Kemitraan Inti Plasma. *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4 (2): 167-177. Diakses dari <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/224> pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 16.15 WIB.
- Sa`adah, Nurul. 2015. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal" dalam Widiastuti, Siti Kurnia, N. Sa`adah, M. Amin, dan M. D. A.

Sofia. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sjaf, Sofyan. 2010. Batasan Definisi Petani (Peasant). *Artikel Ilmiah*. Diakses dari [http://mahmudisiwi.staff.ipb.ac.id/wp-content/plugins/as-pdf/Sofyan%20Sjaf%20Online-Batasan%20Definisi%20Petani%20\(Peasant\).pdf](http://mahmudisiwi.staff.ipb.ac.id/wp-content/plugins/as-pdf/Sofyan%20Sjaf%20Online-Batasan%20Definisi%20Petani%20(Peasant).pdf) pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 16.11 WIB.

Soetarto, Endriatmo dan M. Sihaloho. 2014. Desa dan Kebudayaan Petani. *Artikel Ilmiah*. Diakses dari <http://repository.ut.ac.id/4389/1/LUHT4208-M1.pdf> pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.25 WIB.

Surahman, Fajar. 2014. Model Penguatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Memperkuat Kemandirian Desa. *Artikel Ilmiah*. Diakses dari <http://fia.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/1.-Fajar-Surahman.pdf> pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 15.45 WIB.

Warsana. 2008. Strategi Melakukan Penyuluhan Pertanian untuk Petani Kecil. *Tabloid Sinar Tani*. Diakses dari <http://www.litbang.pertanian.go.id/artikel/one/202/pdf/Strategi%20Melakukan%20Penyuluhan%20Pertanian%20untuk%20Petani%20%26quot;kecil%26quot;.pdf> pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 16.13 WIB.

Widiastuti, Siti Kurnia. 2015. "Pemberdayaan Masyarakat Marginal Berbasis Penelitian Komunitas" dalam Widiastuti, Siti Kurnia, N. Sa'adah, M. Amin, dan M. D. A. Sofia. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Pemberdayaan Pemb Desa

ORIGINALITY REPORT

% **10**
SIMILARITY INDEX

% **9**
INTERNET SOURCES

% **2**
PUBLICATIONS

% **3**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.unair.ac.id Internet Source	% 1
2	www.jogloabang.com Internet Source	<% 1
3	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<% 1
4	media.neliti.com Internet Source	<% 1
5	famorganic.com Internet Source	<% 1
6	anggi-arga.blogspot.com Internet Source	<% 1
7	repository.unpar.ac.id Internet Source	<% 1
8	protan.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<% 1
9	docslide.us Internet Source	<% 1
10	repository.unpad.ac.id Internet Source	<% 1

11	ppjp.unlam.ac.id Internet Source	<% 1
12	repository.upi.edu Internet Source	<% 1
13	journal.ui.ac.id Internet Source	<% 1
14	intrisula.com Internet Source	<% 1
15	es.scribd.com Internet Source	<% 1
16	e-journal.upstegal.ac.id Internet Source	<% 1
17	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<% 1
18	www.scribd.com Internet Source	<% 1
19	unhas.ac.id Internet Source	<% 1
20	Abdullah Sanusi, Hendragunawan S. Thayf, Nur Alamzah. "Customer Satisfaction, Efficiency, and Capital Structure as Determinants of Performance Transportation Companies in Indonesia", Mediterranean Journal of Social Sciences, 2017 Publication	<% 1

tarowangjeneponto.blogspot.com

21	Internet Source	<% 1
22	jmsos.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<% 1
23	Submitted to iGroup Student Paper	<% 1
24	portalgaruda.org Internet Source	<% 1
25	anzdoc.com Internet Source	<% 1
26	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<% 1
27	kandanglara.blogspot.com Internet Source	<% 1
28	booksreadr.org Internet Source	<% 1
29	psp-kumkm.lppm.uns.ac.id Internet Source	<% 1
30	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<% 1
31	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<% 1
32	perencanaanpenelitian.blogspot.com Internet Source	<% 1
33	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman	

Student Paper

<% 1

34

Submitted to Universiti Sains Malaysia

Student Paper

<% 1

35

adisuara.blogspot.com

Internet Source

<% 1

36

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<% 1

37

ejournal.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<% 1

38

mutilerablog.blogspot.my

Internet Source

<% 1

39

eprints.uny.ac.id

Internet Source

<% 1

40

docplayer.info

Internet Source

<% 1

41

ojs.unmas.ac.id

Internet Source

<% 1

42

repository.unib.ac.id

Internet Source

<% 1

43

bombanakab.go.id

Internet Source

<% 1

44

feryboys.blogspot.com

Internet Source

<% 1

45

ejournal.unisba.ac.id

Internet Source

<% 1

46

jurnal.ugm.ac.id

Internet Source

<% 1

47

abcd.unsiq.ac.id

Internet Source

<% 1

48

jurnalaspikom.org

Internet Source

<% 1

49

journal.ugm.ac.id

Internet Source

<% 1

50

thejhp.com

Internet Source

<% 1

51

www.bbppbatu.info

Internet Source

<% 1

52

fkip.serambimekkah.ac.id

Internet Source

<% 1

53

repository.unika.ac.id

Internet Source

<% 1

54

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<% 1

55

fithryauliya.blogspot.com

Internet Source

<% 1

56

mustofahidayat.blogspot.com

Internet Source

<% 1

57

sawahan.madiunkab.go.id

Internet Source

<% 1

58

desablimbing.wordpress.com

Internet Source

<% 1

59

eprints.upnjatim.ac.id

Internet Source

<% 1

60

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<% 1

61

biodiversitas.mipa.uns.ac.id

Internet Source

<% 1

62

www.rp2u.unsyiah.ac.id

Internet Source

<% 1

63

www.khasiatsehat.com

Internet Source

<% 1

64

www.crc.uri.edu

Internet Source

<% 1

65

www.cs.unsyiah.ac.id

Internet Source

<% 1

66

fadlilaw.blogspot.com

Internet Source

<% 1

67

eoffice.banyumaskab.go.id

Internet Source

<% 1

68

www.pariamankota.go.id

Internet Source

<% 1

69

www.slideshare.net

	Internet Source	<% 1
70	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<% 1
71	arisbudimansp.blogspot.co.id Internet Source	<% 1
72	cupk.org Internet Source	<% 1
73	www.yskk.org Internet Source	<% 1
74	ikakurniasyari.blogspot.com Internet Source	<% 1
75	fitriannahadi.blogspot.com Internet Source	<% 1
76	aminiarin.blogspot.com Internet Source	<% 1

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF